

RENCANA AKSI PERCEPATAN PENANGANAN STUNTING



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
RISET DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN PASURUAN**

2026

PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan petunjuk-Nya sehingga dokumen Rencana Aksi Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Pasuruan Tahun 2026 ini dapat disusun dengan baik sebagai wujud dedikasi bersama dalam membangun generasi masa depan yang berkualitas.

Penanganan stunting sejatinya bersifat multidimensional dan jauh lebih kompleks daripada sekadar indikator fisik semata. Dampak *irreversible* yang mengancam perkembangan kognitif dan produktivitas anak menjadikan percepatan penurunan stunting bukan sekadar isu kesehatan, melainkan agenda prioritas pembangunan sumber daya manusia guna menyongsong visi Indonesia Emas 2045. Menyadari urgensi tersebut, Pemerintah Kabupaten Pasuruan secara tegas telah menetapkan Persentase Prevalensi Stunting sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) strategis di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), selaras dengan amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029.

Sebagai manifestasi dari komitmen tersebut, dokumen Rencana Aksi Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Pasuruan Tahun 2026 ini disusun sebagai instrumen navigasi strategis lintas Perangkat Daerah. Berdasarkan rekam jejak evaluasi pengukuran riil (E-PPGBM) pada Semester II Tahun 2025, angka prevalensi stunting Kabupaten Pasuruan telah berhasil ditekan secara drastis hingga menyentuh angka 3,91%. Capaian fundamental ini tidak boleh menghentikan langkah intervensi, melainkan harus diorkestrasikan menjadi landasan pacu (*springboard*) yang kuat. Oleh karena itu, dokumen Renaksi 2026 ini tidak lagi difokuskan pada tahapan inisiasi, melainkan pada optimalisasi, ekspansi cakupan, dan peningkatan kualitas pelaksanaan 8 Aksi Konvergensi.

Penyusunan kerangka kerja teknokratis di dalam dokumen ini dirancang secara presisi untuk mengamankan trayektori target makro prevalensi stunting sebesar 17,50% pada tahun 2026, menuju target akhir 14,20% pada tahun 2029. Melalui pendekatan tanggung jawab kolektif (*shared responsibility*), postur intervensi spesifik dan sensitif dari setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) telah dianalisis dan dikalibrasi. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap program, kegiatan, dan

alokasi pendanaan dapat tereksekusi secara efektif, terukur, dan tepat sasaran pada lima faktor determinan utama di lapangan.

Harapan kami, dokumen Rencana Aksi ini dapat menjadi pedoman yang mengikat serta parameter evaluasi yang objektif bagi seluruh pemangku kepentingan. Resiliensi program lintas sektor dan efisiensi birokrasi adalah kunci utama dalam mengawal kesinambungan pembangunan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing di Kabupaten Pasuruan.

Pasuruan, Maret 2026

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan,
Riset, dan Inovasi Daerah Kabupaten Pasuruan



BAKTI JATI PERMANA, S.Sos., MM.

DAFTAR ISI

PENGANTAR.....	I
DAFTAR ISI	III
DAFTAR TABEL	VI
DAFTAR GAMBAR.....	VII
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Dasar Hukum	8
A. Dasar Hukum Tingkat Nasional.....	8
B. Dasar Hukum Tingkat Daerah.....	9
1.3. Maksud dan Tujuan.....	10
A. Maksud	10
B. Tujuan	11
1.4. Sasaran Program.....	13
A. Remaja Putri (Rematri)	13
B. Calon Pengantin (Catin).....	14
C. Ibu Hamil (Bumil)	14
D. Ibu Pasca Persalinan (Nifas).....	14
E. Anak Usia 0 - 59 Bulan (Balita).....	15
1.5. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH.....	18
2.1. Posisi dan Peran Strategis Daerah	18
2.2. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup	20
A. Daya Dukung Air	20
B. Daya Dukung Pangan.....	22
2.3. Ketahanan Energi	23
2.4. Lingkungan Hidup Berkualitas	25
2.5. Demografi	29

A. Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk	30
B. Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur.....	32
C. Persebaran Penduduk & Rasio Jenis Kelamin Menurut Kecamatan	35
D. Komposisi Penduduk berdasarkan Ketenagakerjaan	40
E. Komposisi Penduduk berdasarkan Pendidikan.....	43
F. Proyeksi Demografi.....	44
2.6. Kondisi Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat.....	50
A. Laju Pertumbuhan Ekonomi.....	50
B. Indeks/Rasio Gini.....	51
C. Angka Kemiskinan	53
D. Tingkat Pengangguran Terbuka	56
E. PDRB Perkapita.....	58
F. Indeks Pembangunan Manusia.....	59
BAB III CAPAIAN KINERJA DAN HASIL PELAKSANAAN	63
3.1. Perkembangan Angka Prevalensi Stunting	65
A. Analisis Komparatif Data SSGI dan E-PPGBM.....	66
B. Tren Penurunan Stunting Berdasarkan Bulan Timbang	67
3.2. Capaian Indikator Intervensi Spesifik (Sektor Kesehatan)	68
A. Pelayanan Kesehatan Remaja Putri	69
B. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil dan Nifas.....	71
C. Pelayanan Kesehatan Balita	72
3.3. Capaian Indikator Intervensi Sensitif (Lintas Sektor)	74
A. Pelayanan dan Pendampingan Calon Pengantin (Catin).....	74
B. Dukungan Sanitasi dan Lingkungan Hidup	75
C. Penguatan Pola Asuh dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).....	76
3.4. Kinerja Tim Pendamping keluarga (TPK).....	77
A. Konsolidasi Kekuatan Personil dan Sinergitas Peran	78

B.	Efektivitas Pendampingan Berbasis Aplikasi Elsimil	78
C.	Peningkatan Kapasitas dan Manajemen Insentif Kinerja	79
3.5.	Realisasi Kinerja Keuangan dan Pemanfaatan Insentif Fiskal	80
3.6.	Analisis Kesenjangan (<i>Gap Analysis</i>) Indikator Kinerja.....	83
3.7.	Penetapan Wilayah Prioritas (Lokus) Intervensi Tahun 2026	85
BAB IV Rencana Aksi Lintas Sektor dan Proyeksi Pendanaan.....		87
4.1.	Analisis Rencana Aksi dan Proyeksi Anggaran Perangkat Daerah	87
A.	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	87
B.	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.....	88
C.	Dinas Kesehatan Daerah, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	89
D.	Dinas Pendidikan	91
E.	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	92
F.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.....	93
G.	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang	95
H.	Dinas Komunikasi dan Informatika.....	96
I.	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	96
J.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa.....	98
4.2.	Kompilasi Matriks Rencana Aksi Lintas Sektor	99
BAB V PENUTUP		104
5.1.	Kesimpulan	104
5.2.	Rekomendasi	105

DAFTAR TABEL

2.1	Daftar Kecamatan di Kabupaten Pasuruan dan Luas Wilayahnya.....	18
2.2	Jumlah Penduduk menurut Kelompok Umur Tahun 2024	33
2.3	Persebaran Penduduk Tahun 2020-2024.....	36
2.4	Kepadatan Penduduk per Kecamatan Tahun 2021-2024.....	37
2.5	Rasio Jenis Kelamin per Kecamatan Tahun 2021-2024.....	39
2.6	Kondisi Ketenagakerjaan di Kabupaten Pasuruan Tahun 2021-2024	41
2.7	Komposisi Penduduk Menurut Pekerjaan	42
2.8	Komposisi Penduduk Menurut Pendidikan	44
2.9	Persentase Komposisi Penduduk Menurut Pendidikan	44
2.10	Proyeksi Jumlah dan Kepadatan Penduduk Tahun 2025-2030.....	46
2.11	Proyeksi Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Tahun 2025-2030 ..	48
2.12	Perkembangan Kemiskinan Tahun 2020-2024	55
2.13	Perkembangan IPM dan Komponen IPM Tahun 2017-2021 (SP2010).....	59
2.14	Perkembangan IPM dan Komponen IPM Tahun 2022-2024 (SP2020).....	60
3.1	Alokasi Pemanfaatan Dana Insentif Fiskal Stunting.....	80
3.2	Sebaran Wilayah Lokus Stunting Kabupaten Pasuruan Tahun 2026	85
4.1	Matriks Rencana Aksi Percepatan Penanganan Stunting	99

DAFTAR GAMBAR

1.1	Hasil Survei RISKESDAS, SKI.....	3
1.2	Hasil Survei Status Gizi Indonesia	4
1.3	E-PPGBM Bulan Timbang Agustus	6
1.4	Target Prevalensi Stunting RPJMD	7
2.1	Peta Administrasi Wilayah Kabupaten Pasuruan	20
2.2	Daya Dukung Air Tahun 2024 dan Tahun 2029	22
2.3	Grafik Daya Dukung Pangan Tahun 2024 dan Tahun 2029	23
2.4	Jumlah Konsumsi Listrik Perkapita di Kab. Pasuruan Tahun 2020-2024 ...	25
2.5	Kualitas Lahan dan Indeks LH Kabupaten Pasuruan Tahun 2020-2024	27
2.6	Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk	31
2.7	Piramida Penduduk Kabupaten Pasuruan Tahun 2024	34
2.8	Ekonomi Kab. Pasuruan, Jawa Timur, dan Nasional Tahun 2020-2024.....	51
2.9	Indeks Gini Kab. Pasuruan, Jawa Timur dan Nasional Tahun 2020-2024..	53
2.10	Kemiskinan Kab. Pasuruan, Jawa Timur dan Nasional Tahun 2020-2024 .	55
2.11	TPT Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, dan Nasional Tahun 2020-2024 ..	57
2.12	IPM Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur dan Nasional Tahun 2020-2024 ...	62
3.1	Roda Aksi Konvergensi	63
3.2	Perbandingan SSGI dan E-PPGBM.....	65
3.3	Tren Prevalensi Stunting Berdasarkan E-PPGBM Tahun 2019-2025	67
3.4	Grafik Tren Kepatuhan Konsumsi TTD Rematri Semester I, Semester II ..	70
3.5	Konseptual Alur Berpikir	84

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Stunting atau kerdil didefinisikan secara medis sebagai kondisi gagal tumbuh pada anak balita (bayi di bawah lima tahun) yang diakibatkan oleh akumulasi kekurangan gizi kronis, infeksi berulang, serta kurangnya stimulasi psikososial yang memadai dalam jangka waktu yang lama. Kondisi ini terutama terjadi pada periode emas pertumbuhan yang dikenal sebagai 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), yakni fase krusial sejak janin dalam kandungan hingga anak berusia dua tahun. Secara antropometri, manifestasi fisik utama stunting ditandai dengan panjang atau tinggi badan anak yang berada di bawah standar deviasi minus dua (-2 SD) dari standar median pertumbuhan anak seusianya yang ditetapkan oleh *World Health Organization (WHO) Child Growth Standards*.

Namun, permasalahan stunting sejatinya bersifat multidimensional dan jauh lebih kompleks daripada sekadar indikator fisik semata. Dampak yang paling mengkhawatirkan dan bersifat *irreversible* (tidak dapat dipulihkan) adalah terhambatnya sinapsis sel-sel otak yang berujung pada penurunan kemampuan kognitif, motorik, dan verbal anak. Dalam jangka panjang, kondisi ini berimplikasi serius terhadap rendahnya prestasi pendidikan, meningkatnya risiko penyakit degeneratif atau tidak menular (seperti diabetes, hipertensi, obesitas, dan penyakit jantung) pada usia dewasa, serta menurunnya potensi produktivitas ekonomi individu yang pada akhirnya akan menghambat pertumbuhan ekonomi daerah maupun nasional. Oleh karena itu, percepatan penurunan stunting bukan hanya isu kesehatan, melainkan agenda prioritas pembangunan sumber daya manusia untuk menyongsong visi Indonesia Emas 2045.

Identifikasi faktor determinan penyebab stunting menjadi langkah fundamental dalam merumuskan strategi intervensi yang presisi. Berdasarkan analisis situasi dan rujukan dokumen *Global Nutrition Report*, penyebab stunting di Kabupaten Pasuruan dapat dipetakan ke dalam beberapa faktor utama yang saling berkaitan, antara lain:

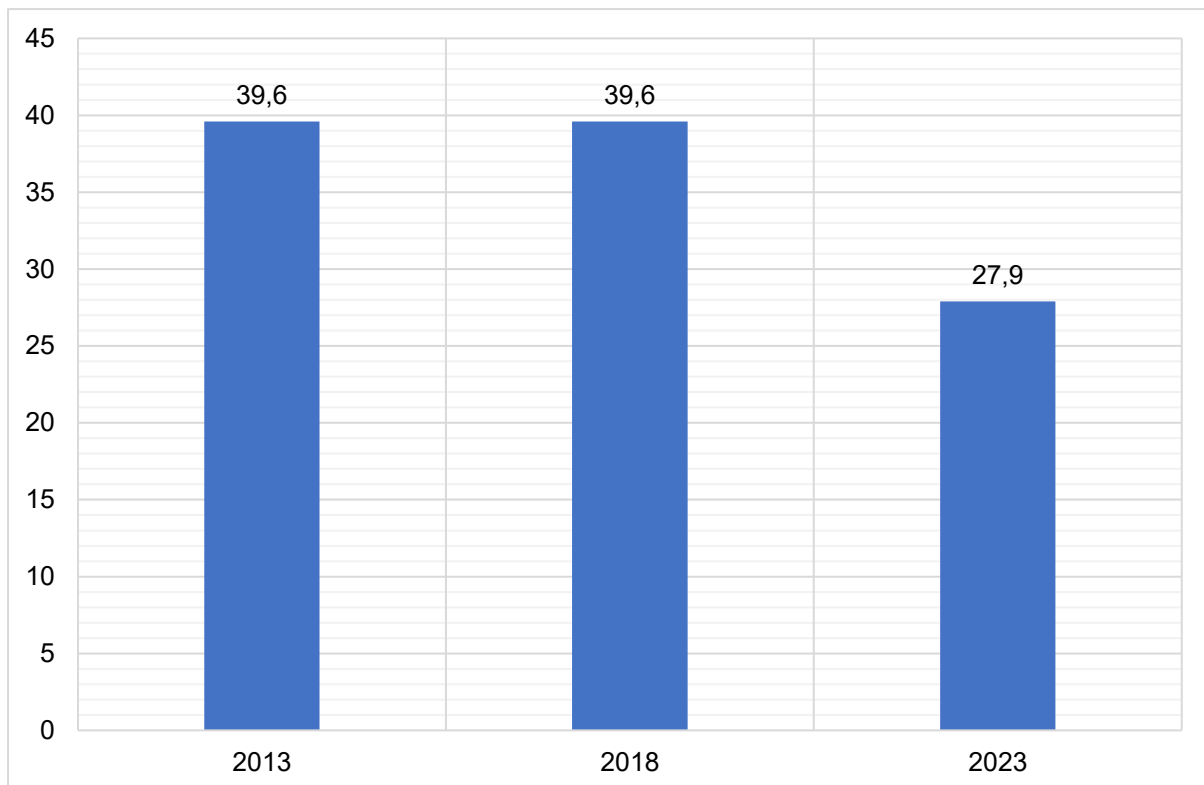
1. Kekurangan Asupan Gizi (Nutrient Intake): Asupan makanan yang tidak adekuat baik dari sisi kuantitas maupun kualitas makronutrien dan

mikronutrien. Defisiensi protein hewani, zat besi, zink, dan vitamin A pada masa kehamilan ibu dan masa pertumbuhan balita (MP-ASI) menjadi kontributor utama kegagalan pertumbuhan jaringan tubuh.

2. Infeksi Penyakit Berulang: Tingginya prevalensi penyakit infeksi seperti Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA), diare kronis, dan kecacingan yang mengganggu proses absorpsi (penyerapan) nutrisi dalam tubuh anak. Kondisi sakit yang berulang menyebabkan energi yang seharusnya digunakan untuk pertumbuhan dialihkan untuk pemulihan sistem imun.
3. Status Kesehatan Ibu (Maternal Health): Siklus stunting seringkali dimulai dari kondisi ibu hamil yang mengalami Kurang Energi Kronis (KEK) dan Anemia. Ibu dengan status gizi buruk memiliki risiko tinggi melahirkan bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) dan panjang badan lahir pendek, yang merupakan bibit utama terjadinya stunting.
4. Akses Sanitasi dan Air Bersih: Faktor lingkungan memegang peranan vital. Ketersediaan akses terhadap air minum yang aman dan sanitasi layak (jamban sehat/ODF) sangat menentukan paparan patogen penyebab infeksi pada anak. Lingkungan yang tercemar menjadi media transmisi penyakit yang memperburuk status gizi.
5. Faktor Sosial Ekonomi dan Pola Asuh: Tingkat pendidikan orang tua, pengetahuan tentang kesehatan dan gizi, serta daya beli masyarakat berpengaruh signifikan terhadap praktik pemberian makan bayi dan anak (PMBA). Pola asuh yang kurang tepat seringkali ditemukan pada keluarga dengan keterbatasan akses informasi dan ekonomi.

Mengingat kompleksitas faktor penyebab tersebut, penanganan stunting menuntut tanggung jawab kolektif (*shared responsibility*) dari pemerintah pusat hingga pemerintah desa melalui pendekatan Aksi Konvergensi yang terintegrasi. Dalam konteks pemantauan kinerja di Kabupaten Pasuruan, evaluasi dilakukan dengan menyandingkan berbagai sumber data untuk mendapatkan potret yang utuh. Terdapat dinamika data prevalensi yang perlu dianalisis secara kritis dan objektif sebagai berikut:

Survei ini dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan dengan siklus lima tahunan untuk memotret indikator kesehatan masyarakat dalam skala makro. Data historis menunjukkan tren penurunan yang signifikan di Kabupaten Pasuruan; jika hasil RISKESDAS tahun 2018 mencatat angka prevalensi yang sangat tinggi yaitu 39,6%, hasil survei SKI terakhir pada tahun 2023 menunjukkan penurunan tajam dimana prevalensi Kabupaten Pasuruan berada di angka 27,9%. Penurunan lebih dari 10 digit persen dalam periode lima tahun ini mengindikasikan adanya perbaikan fundamental pada sistem pelayanan kesehatan dasar di daerah.

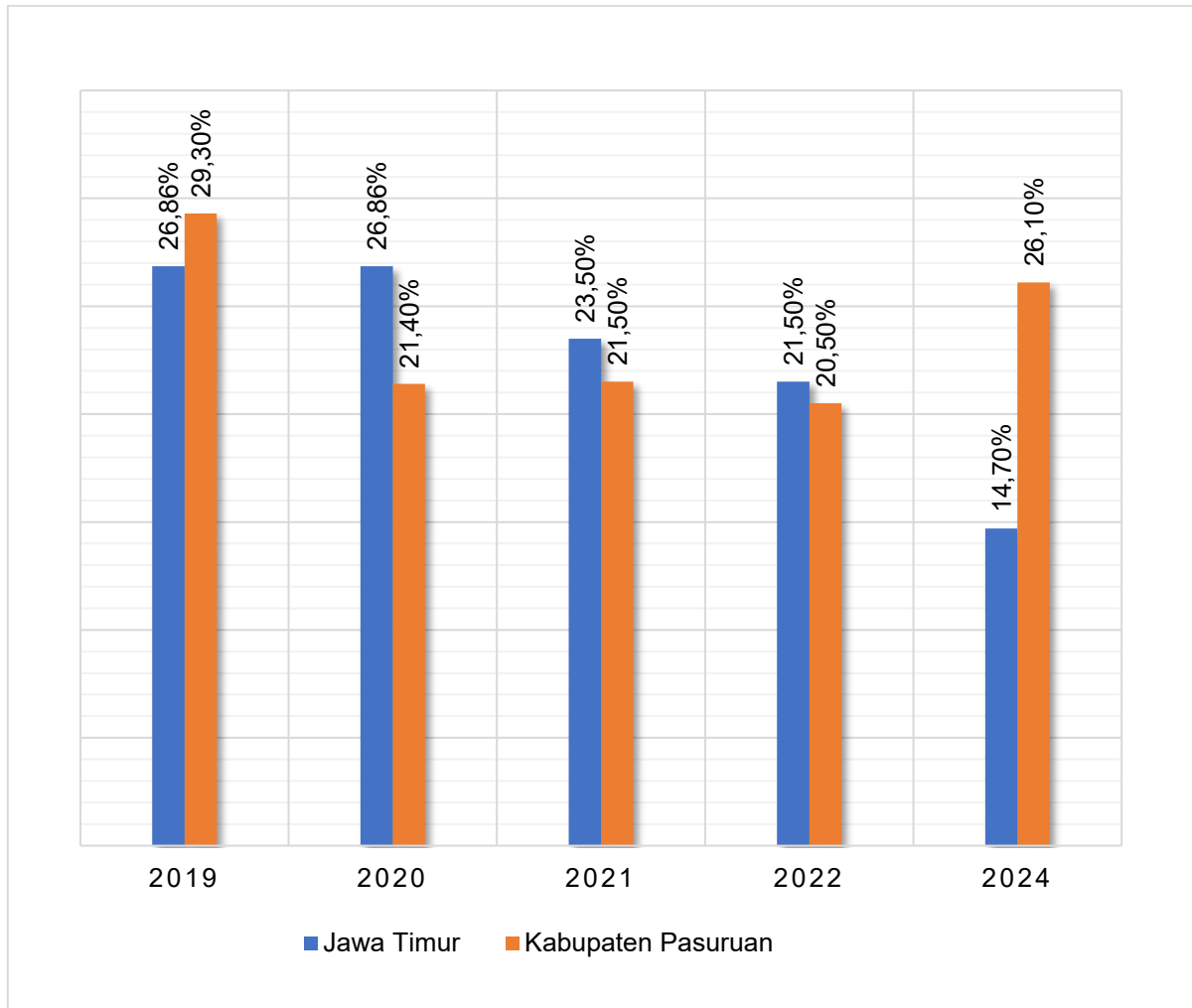


Gambar 1.1 Hasil Survei RISKESDAS, SKI

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan, 2025

Survei ini dilaksanakan setiap tahun oleh Kementerian Kesehatan dengan metode sampling blok sensus. Data SSGI bagi Kabupaten Pasuruan menunjukkan fluktuasi angka yang cukup dinamis dan menjadi tantangan tersendiri. Pada tahun 2021 prevalensi tercatat sebesar 21,50%, kemudian mengalami tren positif dengan penurunan pada tahun 2022 menjadi 20,50%. Namun, berdasarkan rilis data SSGI tahun 2024, tercatat adanya kenaikan angka prevalensi menjadi 26,10%. Lonjakan angka survei ini menjadi anomali yang perlu disikapi dengan validasi data lapangan,

mengingat metode survei memiliki *margin of error* dan keterbatasan sampel yang mungkin tidak sepenuhnya merepresentasikan intervensi masif yang telah dilakukan di seluruh desa/kelurahan.



Gambar 1.2 Hasil Survei Status Gizi Indonesia

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan, 2025

E-PPGBM hadir sebagai sumber data ketiga yang memegang peranan paling krusial karena sifatnya yang operasional, *real-time*, dan benar-benar merefleksikan hasil pengukuran riil di lapangan melalui sensus menyeluruh. Berbeda dengan metode sampling, sistem ini berfungsi sebagai instrumen pencatatan data sasaran balita yang sangat detail dengan prinsip *by name by address*. Data ini dikumpulkan secara rutin dan masif di tingkat akar rumput, khususnya melalui Posyandu pada momentum Bulan Timbang yang dilaksanakan secara serentak setiap bulan Februari dan Agustus. Karena pendekatannya yang bersifat sensus, E-PPGBM memiliki cakupan sasaran

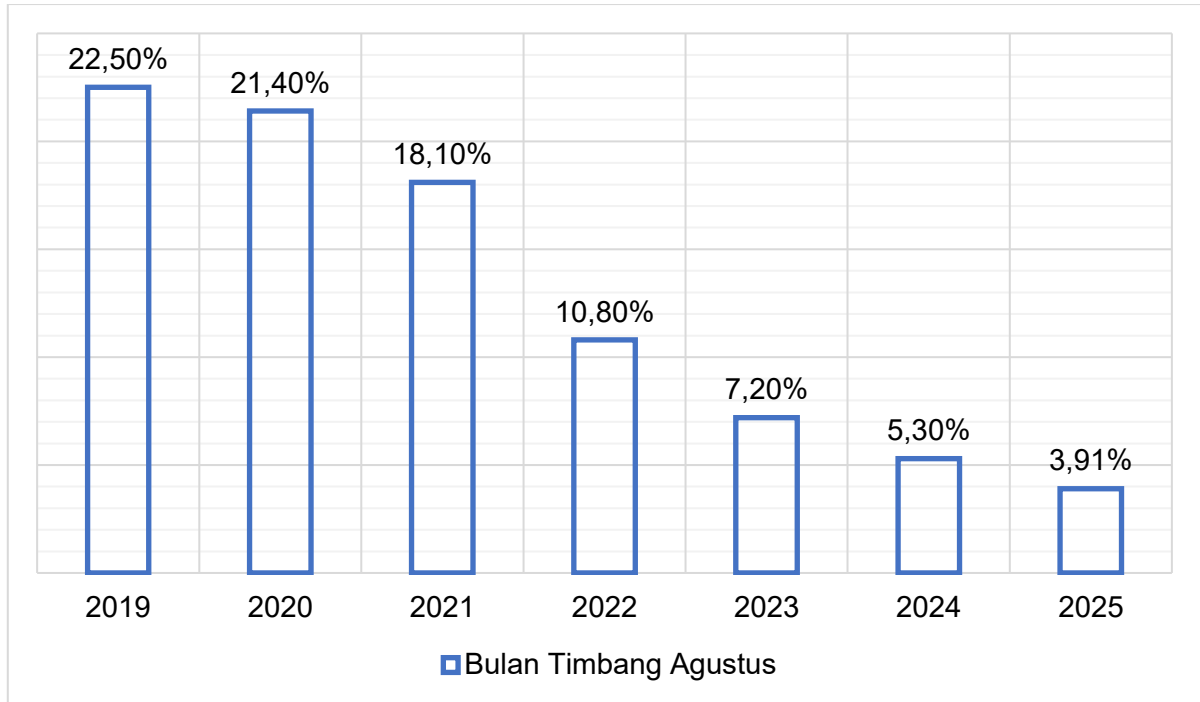
yang sangat luas mendekati 100% dari total populasi balita di suatu wilayah sehingga tingkat validitas dan akurasi untuk menentukan intervensi individu menjadi sangat tinggi dan tepat sasaran dibandingkan dengan data survei yang sering kali bias karena keterbatasan sampel.

Analisis mendalam terhadap tren data E-PPGBM di Kabupaten Pasuruan menunjukkan pola konsistensi kinerja penanganan stunting yang jauh lebih meyakinkan dan terukur jika dibandingkan dengan fluktuasi data survei yang sering kali tidak stabil. Rekam jejak data historis memperlihatkan dinamika upaya penurunan angka stunting di daerah ini:

- Pada tahun 2019, prevalensi tercatat sebesar 29,30%, yang menjadi titik awal evaluasi.
- Terjadi penurunan signifikan pada tahun 2020 menjadi 21,40%.
- Angka ini relatif stabil pada tahun 2021 di posisi 21,50%.
- Penurunan kembali terjadi pada tahun 2022 menjadi 20,50%.
- Meskipun sempat tercatat kenaikan pada tahun 2023 menjadi 26,10%, data ini memberikan transparansi yang diperlukan untuk evaluasi program.

Puncak keberhasilan dari berbagai intervensi spesifik dan sensitif yang dilakukan pemerintah daerah terlihat sangat nyata pada data tahun 2025. Berdasarkan rekapitulasi hasil pengukuran Bulan Timbang pada Agustus 2025, partisipasi masyarakat sangat tinggi dengan total sasaran balita yang diukur mencapai 101.252 balita. Dari jumlah populasi balita yang sangat besar tersebut, ditemukan jumlah balita stunting hanya sebanyak 3.962 anak.

Dengan demikian, angka prevalensi stunting Kabupaten Pasuruan pada Semester II Tahun 2025 berhasil ditekan secara drastis hingga tercatat sebesar 3,91%. Pencapaian angka di bawah 4% ini merupakan prestasi luar biasa. Namun, keberhasilan ini tidak boleh menghentikan langkah intervensi. Momentum positif pada tahun 2025 justru harus diorkestrasikan menjadi landasan pacu (*springboard*) yang kuat untuk perumusan dan eksekusi Rencana Aksi (Renaksi) Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2026. Tahun 2026 merupakan titik kritis untuk menguji resiliensi dan keberlanjutan (*sustainability*) dari program-program lintas sektor yang telah berjalan.



Gambar 1.3 Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat Bulan Agustus

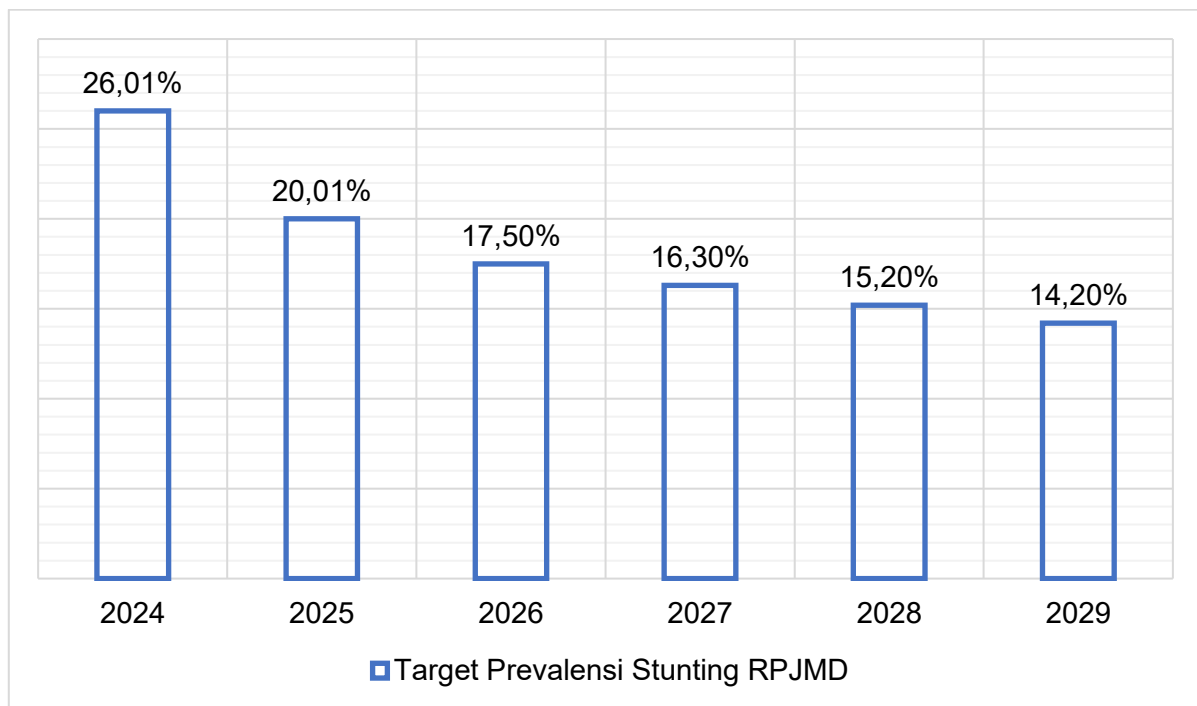
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan, 2025

Mendasari dinamika data prevalensi yang terus berkembang di lapangan, Pemerintah Daerah menyadari sepenuhnya bahwa penanganan stunting bukan sekadar persoalan pemenuhan gizi sesaat. Lebih dari itu, stunting memberikan dampak destruktif jangka panjang yang secara langsung mengancam kualitas dan daya saing sumber daya manusia (SDM) di masa depan, mulai dari hambatan perkembangan kognitif, penurunan produktivitas, hingga hilangnya peluang emas untuk mengoptimalkan bonus demografi. Mengingat urgensi tersebut, serta sebagai bentuk komitmen nyata dalam mempersiapkan generasi penerus yang unggul, maka Persentase Prevalensi Stunting telah ditetapkan sebagai salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU) strategis yang menjadi prioritas dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Penetapan IKU ini juga merupakan bentuk sinergitas yang tegak lurus dengan arah kebijakan nasional. Merujuk pada amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025 - 2029, Pemerintah Daerah diwajibkan untuk mengambil langkah percepatan yang komprehensif. Sebagai tindak lanjut

penyelarasan kebijakan (*cascading*) dari tingkat pusat tersebut, Pemerintah Kabupaten Pasuruan telah merumuskan dan mengintegrasikannya ke dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Melalui RPJMD ini, proyeksi target penurunan angka prevalensi stunting didesain secara rasional, bertahap, dan terukur dengan mempertimbangkan kapasitas sumber daya daerah agar setiap intervensi dapat berjalan efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan.

Untuk memberikan panduan yang terarah serta menjadi parameter evaluasi kinerja lintas sektor pada setiap tahun berjalan, pemetaan arah kebijakan tersebut telah diformulasikan ke dalam sebuah peta jalan (*roadmap*) pembangunan daerah. Adapun trayektori target pencapaian IKU Prevalensi Stunting di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan, sebagaimana yang telah diamanatkan dan tertuang di dalam dokumen RPJMD, secara lebih rinci dijabarkan dalam matriks berikut:



Gambar 1.4 Target Prevalensi Stunting RPJMD

Sumber: Kementerian Dalam Negeri, 2025

Berdasarkan matriks target RPJMD di atas, terlihat jelas bahwa pada Tahun 2026, Kabupaten Pasuruan diwajibkan untuk mencapai target prevalensi stunting makro (survei) sebesar 17.50%. Penurunan target yang progresif dari tahun ke tahun ini menuntut akselerasi kinerja yang luar biasa. Oleh karena itu, penyusunan Rencana

Aksi (Renaksi) Stunting Tahun 2026 tidak lagi berfokus pada tahapan inisiasi, melainkan pada optimalisasi, ekspansi cakupan, dan peningkatan kualitas pelaksanaan 8 Aksi Konvergensi lintas Perangkat Daerah. Dokumen Renaksi 2026 ini hadir sebagai instrumen navigasi strategis untuk memastikan seluruh sumber daya daerah terkalibrasi secara presisi demi mengamankan target 17.50% tersebut, menuju pencapaian target akhir 14.20% pada tahun 2029.

1.2. Dasar Hukum

Pelaksanaan program Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting (PPPS) di Kabupaten Pasuruan didasarkan pada kerangka regulasi yang komprehensif, hierarkis, dan mengikat, baik di tingkat nasional maupun daerah. Landasan hukum ini menjadi fondasi legitimasi, pengorganisasian, tata kelola, serta penganggaran seluruh intervensi spesifik maupun sensitif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Adapun regulasi yang menjadi acuan utama pelaksanaan program pada Semester II Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

A. Dasar Hukum Tingkat Nasional

Regulasi tingkat nasional menjadi pedoman strategis dalam penyelarasan target dan indikator kinerja daerah, yang meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
2. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, yang menetapkan Strategi Nasional (Stranas) Percepatan Penurunan Stunting sebagai rujukan utama konvergensi pusat dan daerah.
3. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia (RAN-PASTI) Tahun 2021-2024.

4. Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 400.5.7/1685/Bangda tanggal 17 Maret 2025, perihal Pelaksanaan Aksi Konvergensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting (PPPS) di Daerah.

B. Dasar Hukum Tingkat Daerah

Di tingkat daerah, Pemerintah Kabupaten Pasuruan telah menetapkan serangkaian Peraturan Bupati (Perbup) dan Surat Keputusan (SK) Bupati yang menjadi landasan operasional teknis pelaksanaan Aksi Konvergensi, sebagai berikut:

1. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 130 Tahun 2021 tentang Percepatan Pencegahan Stunting Terintegrasi di Kabupaten Pasuruan.
2. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Gerakan Keluarga Bersih Bersama Sadari Stunting Menuju Masyarakat Sejahtera.
3. Surat Keputusan Bupati Pasuruan Nomor 050/279/Hk/424.013/2021 Tanggal 4 Januari 2021 Tentang Tim Teknis Percepatan Pencegahan Dan Penurunan Stunting Terintegrasi Di Kabupaten Pasuruan.
4. Surat Keputusan Bupati Pasuruan Nomor 050/280/Hk/424.013/2021 Tanggal 4 Januari 2021 Tentang Penetapan Prioritas Lokasi Fokus Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi Di Kabupaten Pasuruan.
5. Surat Keputusan Bupati Pasuruan Nomor 050/563/Hk/424.013/2021 Tanggal 9 Juni 2021 Tentang Prioritas Lokasi Fokus Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi Di Kabupaten Pasuruan Tahun 2022.
6. Keputusan Bupati Pasuruan Nomor 100.3.3.2/548/HK/424.013/2025 Tentang Tim Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Pasuruan Periode 2025-2029.
7. Keputusan Bupati Pasuruan Nomor 100.3.3.2/884/HK/424.013/2025 Tentang Tim Operator, Verifikator, dan Approver Website Aksi Konvergensi Dalam Upaya Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Pasuruan Tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

A. Maksud

Penyusunan dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) Gerakan Masyarakat Hidup Sehat terintegrasi penanganan *stunting* Kabupaten Pasuruan Tahun 2025-2029 ini pada hakikatnya dimaksudkan sebagai instrumen teknokratik, manajerial, dan panduan strategis yang bersifat mengikat bagi seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan. Secara lebih terperinci dan mendalam, maksud dari perumusan dokumen perencanaan ini adalah untuk:

1. Mengejawantahkan Tanggung Jawab Kolektif (*Shared Responsibility*) melalui Orkestrasi Lintas Sektor: Dokumen ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman induk yang mendeskripsikan pembagian peran, kewenangan, dan tanggung jawab setiap Perangkat Daerah (OPD) dalam pelaksanaan 8 (delapan) Aksi Konvergensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting yang diamanatkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Hal ini sangat krusial guna mendekonstruksi pola kerja sektoral (ego-sektoral) dan memastikan bahwa seluruh sumber daya pemerintah, mulai dari tingkat kabupaten hingga eselon pemerintahan terendah di tingkat desa, terintegrasi secara padu dalam satu komando penanganan yang sinkron.
2. Harmonisasi Hierarki Regulasi dan Kebijakan Publik: Rencana Aksi ini disusun dengan maksud untuk menyelaraskan implementasi kebijakan daerah secara vertikal maupun horizontal. Secara vertikal, dokumen ini memastikan kepatuhan terhadap Strategi Nasional (Stranas) yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 dan Rencana Aksi Nasional (RAN-PASTI). Secara horizontal, dokumen ini merupakan manifestasi dari Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 130 Tahun 2021 dan Nomor 2 Tahun 2022, sekaligus memberikan legitimasi operasional terhadap penetapan prevalensi *stunting* sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam kerangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasuruan.
3. Penyusunan Kerangka Intervensi Berbasis Bukti (*Evidence-Based Intervention*) dan Mitigasi Anomali Data: Dokumen ini dimaksudkan untuk menyediakan panduan rasional yang berlandaskan pada analisis data yang presisi dan tidak terbantahkan. Merespons disparitas data antara hasil Survei

Status Gizi Indonesia (SSGI) yang fluktuatif dan capaian Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (E-PPGBM) yang berbasis sensus riil, Rencana Aksi ini mengukuhkan E-PPGBM dengan pencapaian prevalensi sebesar 3,91% pada Semester II Tahun 2025 dari 101.252 balita yang diukur sebagai instrumen navigasi utama. Keputusan ini dimaksudkan agar penentuan lokus intervensi, mitigasi determinan *stunting* (seperti infeksi berulang, ketiadaan sanitasi/ODF, dan ketidakcukupan asupan gizi), serta penyaluran bantuan dapat dilakukan secara presisi dengan prinsip *by name by address*.

4. Optimalisasi dan Pengawasan Ketat Pendekatan Siklus Hidup (*Life Cycle Approach*): Maksud operasional dari dokumen ini adalah menjamin ketersediaan alur intervensi yang tidak terputus pada setiap fase kehidupan manusia. Dokumen ini mendesain skema jaring pengaman kesehatan yang menyentuh fase pra-konsepsi (mitigasi anemia pada Remaja Putri dan skrining kesehatan Calon Pengantin), mengawal secara ketat periode kritis 1.000 Hari Pertama Kehidupan/HPK (pemantauan Ibu Hamil Risiko Tinggi/KEK dan pelayanan nifas), hingga fase evaluasi akhir (pemantauan tumbuh kembang Anak Usia 0-59 Bulan di Posyandu).

B. Tujuan

Tujuan utama dari RAD ini adalah mengakselerasi, mengawal, dan mempertahankan keberlanjutan (*sustainability*) tren penurunan angka prevalensi *stunting* di Kabupaten Pasuruan yang telah berhasil melampaui target nasional. Melalui intervensi yang sistematis, dokumen ini bertujuan untuk mencegah dampak *irreversible* (tidak dapat dipulihkan) berupa penurunan kemampuan kognitif dan risiko penyakit degeneratif di masa depan, sehingga terwujud transformasi kualitas sumber daya manusia yang unggul, berdaya saing, dan produktif guna menyongsong visi Indonesia Emas 2045. Adapun target kumulatif akhir prevalensi *stunting* pada penutup periode perencanaan di tahun 2029 secara definitif ditetapkan sebesar 14.20%.

Berpijak pada landasan filosofis, urgensi permasalahan kesehatan masyarakat yang bersifat multidimensional, serta maksud yang telah diuraikan di atas, Rencana Aksi Daerah ini ditetapkan dengan klasifikasi tujuan umum dan tujuan khusus sebagai berikut:

1. Tujuan utama dari RAD ini adalah mengakselerasi, mengawal, dan mempertahankan keberlanjutan (*sustainability*) tren penurunan angka prevalensi *stunting* di Kabupaten Pasuruan yang telah berhasil melampaui target nasional. Melalui intervensi yang sistematis, dokumen ini bertujuan untuk mencegah dampak *irreversible* (tidak dapat dipulihkan) berupa penurunan kemampuan kognitif dan risiko penyakit degeneratif di masa depan, sehingga terwujud transformasi kualitas sumber daya manusia yang unggul, berdaya saing, dan produktif guna menyongsong visi Indonesia Emas 2045.
2. Guna mencapai tujuan umum tersebut, ditetapkan serangkaian tujuan khusus yang terukur dan terarah:
 - a. Meningkatkan Konvergensi Kualitas Intervensi Spesifik (Kesehatan) dan Sensitif (Non-Kesehatan): Memastikan tingkat keterpaduan pelaksanaan program layanan medis dasar dan jaring pengaman sosial berjalan secara optimal. Tujuan ini diarahkan agar setiap kelompok sasaran yang memiliki faktor risiko determinan seperti Ibu Hamil Kurang Energi Kronis (KEK), Ibu Hamil Anemia, bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR), serta keluarga tanpa akses air bersih dan sanitasi layak mendapatkan tata laksana penanganan gizi dan perbaikan lingkungan yang holistik dan berkelanjutan.
 - b. Memperkuat Validitas, Akurasi, dan Cakupan Data Pemantauan Antropometri: Meningkatkan kualitas dan kapasitas pelaksanaan sensus riil di lapangan melalui momentum Bulan Timbang secara serentak (setiap bulan Februari dan Agustus). Tujuan operasional ini sangat krusial untuk mempertahankan tingkat partisipasi sasaran balita mendekati angka 100%, meminimalisasi potensi bias atau *margin of error* dari metode sampling, serta menjamin bahwa setiap intervensi penanganan masalah gizi (*weight faltering*, gizi kurang, gizi buruk) terpantau ketat secara *real-time* melalui sistem E-PPGBM.
 - c. Meningkatkan Efektivitas dan Jangkauan Pendampingan Berbasis Keluarga: Mengoptimalkan kinerja dan kapasitas Tim Pendamping Keluarga (TPK) sebagai garda terdepan di tingkat akar rumput. Tujuan ini mencakup pengawalan Calon Pengantin melalui skrining aplikasi Elektronik Siap Nikah dan Hamil (Elsimil), peningkatan cakupan

pelayanan Keluarga Berencana (KB) Pasca Persalinan untuk mengatur jarak ideal kehamilan (*birth spacing*), serta pemberian edukasi intensif terkait Praktik Pemberian Makan Bayi dan Anak (PMBA) kepada keluarga dengan keterbatasan akses informasi dan ekonomi.

- d. Menjamin Akuntabilitas, Efisiensi, dan Proporsionalitas Alokasi Anggaran: Menyediakan justifikasi teknis dan logis bagi proses pengalokasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun intervensi pendanaan lainnya (seperti Dana Desa). Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap rupiah dana publik yang diinvestasikan memiliki korelasi yang terukur dan berdampak langsung terhadap indikator keberhasilan penurunan *stunting* di masing-masing pemangku kepentingan.

1.4. Sasaran Program

Pelaksanaan Aksi Konvergensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Pasuruan tidak dilakukan secara parsial, melainkan menggunakan pendekatan intervensi berbasis siklus hidup manusia (*Life Cycle Approach*). Pendekatan ini didasarkan pada pemahaman bahwa status gizi anak sangat ditentukan oleh akumulasi status gizi pada fase-fase kehidupan sebelumnya. Oleh karena itu, sasaran program pada Semester II Tahun 2025 ini mencakup rentang sasaran yang luas, mulai dari fase pra-konsepsi hingga masa pertumbuhan balita, dengan fokus utama pada periode emas 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).

Secara rinci, kelompok sasaran prioritas yang menjadi objek intervensi spesifik dan sensitif dalam laporan ini diklasifikasikan sebagai berikut:

A. Remaja Putri (Rematri)

Kelompok remaja putri merupakan sasaran hulu yang sangat strategis dalam upaya memutus mata rantai stunting antar-generasi. Fokus intervensi pada kelompok ini diarahkan untuk pencegahan anemia (kekurangan sel darah merah) sejak dini, mengingat remaja putri yang menderita anemia berisiko tinggi tumbuh menjadi calon ibu yang tidak sehat dan berpotensi melahirkan bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR). Pada semester ini, layanan difokuskan pada suplementasi Tablet Tambah Darah (TTD) secara rutin di institusi pendidikan (sekolah/pesantren) serta

edukasi gizi seimbang untuk mempersiapkan kesehatan reproduksi mereka di masa depan.

B. Calon Pengantin (Catin)

Pasangan calon pengantin adalah sasaran krusial dalam fase pra-konsepsi. Intervensi pada kelompok ini bertujuan untuk mendeteksi dan mengoreksi faktor risiko kesehatan sebelum terjadinya pernikahan dan pembuahan. Sasaran mencakup seluruh calon pengantin yang terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) maupun Lembaga Agama lainnya. Fokus layanan meliputi skrining kesehatan pranikah (pemeriksaan kadar Hb, Lingkar Lengan Atas/LiLA, dan Indeks Massa Tubuh) serta pendampingan intensif melalui aplikasi Elektronik Siap Nikah dan Hamil (Elsimil) oleh Tim Pendamping Keluarga (TPK), guna memastikan setiap Catin berada dalam kondisi ideal untuk hamil.

C. Ibu Hamil (Bumil)

Ibu hamil menempati posisi sentral dalam periode kritis 1.000 HPK (fase janin). Status gizi dan kesehatan ibu selama 9 bulan kehamilan memiliki korelasi langsung dengan kualitas otak dan fisik janin yang dikandungnya. Sasaran program mencakup seluruh ibu hamil di wilayah Kabupaten Pasuruan, dengan atensi prioritas atau pemantauan khusus diberikan kepada Ibu Hamil Risiko Tinggi (Risti), Ibu Hamil dengan Kekurangan Energi Kronis (KEK), dan Ibu Hamil Anemia. Intervensi meliputi jaminan pemeriksaan kehamilan (Antenatal Care/ANC) terpadu minimal 6 kali, pemberian makanan tambahan bagi bumil KEK, serta suplementasi mikronutrien.

D. Ibu Pasca Persalinan (Nifas)

Pasca proses persalinan, fokus sasaran beralih kepada ibu nifas. Fase ini sangat menentukan keberlangsungan kesehatan ibu dan bayi baru lahir. Sasaran program diarahkan untuk mendukung pemulihan kesehatan ibu pasca melahirkan serta memastikan keberhasilan inisiasi menyusui. Intervensi kunci pada kelompok ini adalah pelayanan Keluarga Berencana (KB) Pasca Persalinan. Hal ini sangat vital untuk mengatur jarak kehamilan (*birth spacing*), karena jarak kelahiran yang terlalu dekat terbukti secara ilmiah meningkatkan risiko stunting pada anak berikutnya serta mengganggu pola asuh dan pemberian ASI.

E. Anak Usia 0 - 59 Bulan (Balita)

Kelompok balita merupakan sasaran hilir yang menjadi indikator akhir keberhasilan seluruh intervensi. Sasaran ini meliputi seluruh populasi balita yang menjadi target pengukuran di Posyandu. Penanganan pada kelompok ini dibagi menjadi dua skema utama: skema pencegahan bagi balita sehat melalui pemantauan pertumbuhan rutin dan imunisasi dasar lengkap; serta skema penanganan bagi balita yang terindikasi mengalami masalah gizi (*weight faltering*, gizi kurang, gizi buruk, dan stunting). Bagi balita dengan masalah gizi, intervensi difokuskan pada tata laksana gizi medis, rujukan ke fasilitas kesehatan, dan pemberian Makanan Tambahan (PMT) lokal yang terpantau ketat hingga status gizinya membaik.

1.5. Sistematika Penulisan

Guna menjamin alur pemikiran yang logis, sistematis, dan komprehensif, serta memenuhi kaidah penyusunan dokumen perencanaan birokrasi pemerintahan daerah yang koheren, dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) ini disusun dengan struktur tata urutan yang saling berkesinambungan antar-bab. Pendekatan sistematika ini didesain secara deduktif, beranjak dari fondasi konseptual dan regulatori menuju penjabaran operasional teknis di lapangan. Adapun garis besar sistematika penulisan dokumen Rencana Aksi ini adalah sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN Bab ini difungsikan sebagai landasan filosofis, empiris, dan yuridis dari keseluruhan dokumen perencanaan. Konstruksi pemikiran pada bab ini diawali dengan menguraikan Latar Belakang permasalahan *stunting* di Kabupaten Pasuruan secara multidimensional, dilanjutkan dengan inventarisasi Dasar Hukum yang memayungi pelaksanaan program lintas sektor dari tingkat pusat hingga daerah secara hierarkis. Selanjutnya, bab ini menjabarkan secara terukur Maksud dan Tujuan penyusunan dokumen, merumuskan Sasaran Program yang berorientasi pada pendekatan siklus hidup (*Life Cycle Approach*) mulai dari fase pra-konsepsi hingga balita, dan diakhiri dengan Sistematika Penulisan yang memandu tata baca dokumen secara utuh.

BAB II: GAMBARAN UMUM DAERAH Bab ini mendeskripsikan secara holistik potret ekologi, demografi, dan ekonomi Kabupaten Pasuruan sebagai lokus utama intervensi kebijakan. Analisis situasi pada bab ini membedah faktor-faktor determinan sosial dan

lingkungan yang berkorelasi langsung dengan status gizi masyarakat, yang mencakup Posisi dan Peran Strategis Daerah, evaluasi kapasitas Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup, Ketahanan Energi, dan upaya perwujudan Lingkungan Hidup Berkualitas. Selain itu, bab ini juga menyajikan analisis Demografi serta Kondisi Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat, yang menjadi variabel kunci dalam memetakan daya beli serta aksesibilitas masyarakat terhadap pangan sehat, sanitasi, dan layanan kesehatan dasar.

BAB III: CAPAIAN KINERJA DAN HASIL PELAKSANAAN Bab ini merupakan manifestasi dari prinsip kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*). Di dalam bab ini, disajikan analisis evaluatif yang tajam terhadap kinerja penanganan *stunting* pada periode sebelumnya dengan merujuk pada data sensus Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (E-PPGBM). Evaluasi dijabarkan secara rinci melalui pemetaan Perkembangan Angka Prevalensi Stunting, pengukuran efektivitas Capaian Indikator Intervensi Spesifik (berfokus pada layanan medis dan asupan gizi langsung), evaluasi Capaian Indikator Intervensi Sensitif (berfokus pada faktor lingkungan dan infrastruktur non-medis), serta penilaian komprehensif terhadap Kinerja Tim Pendamping Keluarga (TPK) sebagai garda terdepan pengawalan di tingkat akar rumput.

BAB IV: RENCANA AKSI LINTAS SEKTOR DAN PROYEKSI PENDANAAN Bab ini memegang peranan sebagai jantung atau inti teknokratik dari Rencana Aksi Daerah, yang memproyeksikan strategi dan intervensi ke depan secara terukur. Bagian ini mendetailkan Sinergitas Rencana Aksi Lintas Perangkat Daerah (OPD) untuk menjamin Orkestrasi 8 Aksi Konvergensi. Substansi utama dijabarkan melalui Matriks Rencana Aksi Daerah yang memuat rincian nomenklatur program, kegiatan, sub-kegiatan, indikator kinerja, target tahunan, serta lokus intervensi yang presisi. Lebih lanjut, bab ini menguraikan Identifikasi dan Alokasi Kebutuhan Anggaran dari masing-masing pemangku kepentingan guna menjamin ketersediaan sumber daya fiskal secara proporsional dan akuntabel sepanjang periode perencanaan.

BAB V: PENUTUP Bab terakhir ini menyajikan sintesis akhir dari keseluruhan analisis situasi dan rumusan rencana aksi. Bagian ini memuat Kesimpulan yang merefleksikan benang merah penyelesaian masalah *stunting* di Kabupaten Pasuruan. Berpijak pada kesimpulan tersebut, bab ini ditutup dengan perumusan Rekomendasi strategis yang

ditujukan bagi para pengambil kebijakan tingkat pimpinan daerah dan legislatif, guna mengawal komitmen politik, memastikan ketersediaan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta menjamin keberlanjutan (*sustainability*) pelaksanaan program pada tahun-tahun mendatang.

BAB II

GAMBARAN UMUM DAERAH

2.1. Posisi dan Peran Strategis Daerah

Secara geografis, Kabupaten Pasuruan terletak pada koordinat 7°32'42.14" - 7°57'24.32" Lintang Selatan dan 112°34'29.31"-113° 6'0.29" Bujur Timur. Luas wilayah Kabupaten Pasuruan sebesar 1.474,02 km² dengan batas administrasi Kabupaten Pasuruan meliputi:

Sebelah Utara : Kabupaten Sidoarjo, Kota Pasuruan, dan Selat Madura

Sebelah Timur : Kabupaten Probolinggo

Sebelah Selatan : Kabupaten Malang

Sebelah Barat : Kabupaten Mojokerto dan Kota Batu

Secara administratif, struktur kewilayahan di Kabupaten Pasuruan terorganisasi ke dalam pembagian unit pemerintahan yang jelas dan terperinci. Wilayah ini terbagi menjadi 24 kecamatan sebagai satuan administratif utama. Selanjutnya, di lingkup yang lebih spesifik yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, terdapat 24 kelurahan serta 341 desa yang tersebar di seluruh kecamatan tersebut. Rincian lengkap mengenai pembagian wilayah administratif ini disajikan secara mendetail pada Tabel berikut:

Tabel 2.1 Daftar Kecamatan di Kabupaten Pasuruan dan Luas Wilayahnya

No	Nama Kecamatan	Jumlah		Luas Wilayah (Km ²)	Presentase (%)
		Desa	Kelurahan		
1	Purwodadi	13	-	102,46	6,95
2	Tutur	12	-	86,30	5,85
3	Puspo	7	-	58,35	3,96
4	Lumbang	12	-	125,55	8,52
5	Pasrepan	17	-	89,95	6,10
6	Kejayan	24	1	79,15	5,37
7	Wonorejo	15	-	47,30	3,21
8	Purwosari	14	1	59,87	4,06

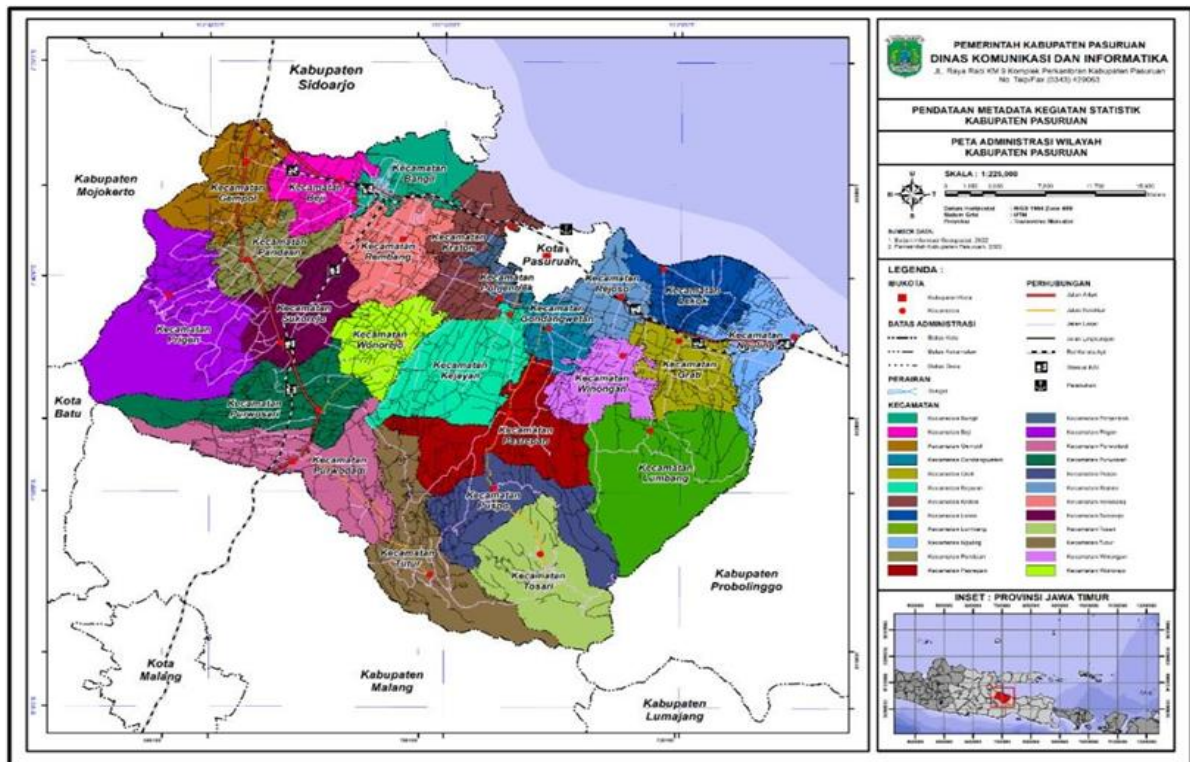
No	Nama Kecamatan	Jumlah		Luas Wilayah (Km2)	Presentase (%)
		Desa	Kelurahan		
9	Sukorejo	19	-	58,18	3,95
10	Prigen	9	-	121,90	8,27
11	Pandaan	14	4	43,27	2,94
12	Gempol	15	-	64,92	4,40
13	Beji	12	2	39,90	2,71
14	Bangil	4	11	44,60	3,03
15	Rembang	17	-	42,52	2,88
16	Kraton	25	-	50,75	3,44
17	Pohjentrek	11	3	11,88	0,81
18	Gondang Wetan	19	1	26,25	1,78
19	Winongan	18	-	45,97	3,12
20	Grati	14	1	50,78	3,45
21	Nguling	15	-	42,60	2,89
22	Lekok	11	-	46,57	3,16
23	Rejoso	16	-	37,00	2,51
24	Tosari	8	-	98,00	6,65
Kabupaten Pasuruan Total:		341	24	1.474,2	100

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan, 2024

Ditinjau dari perspektif ekonomi, letak geografis wilayah Kabupaten Pasuruan memiliki posisi yang sangat strategis dan menguntungkan. Hal ini dikarenakan keberadaannya yang berada tepat di simpul segitiga jalur ekonomi vital yang menghubungkan koridor Surabaya - Jember / Banyuwangi / Bali, koridor Surabaya - Malang, serta lintas Malang - Jember / Banyuwangi / Bali. Konektivitas wilayah ini semakin diperkuat dengan adanya lintasan jalur kereta api yang melayani angkutan penumpang maupun barang untuk rute Surabaya - Bangil - Banyuwangi dan Surabaya - Bangil - Malang.

Nilai strategis tersebut kian bertambah dengan adanya dukungan infrastruktur jalan bebas hambatan yang terintegrasi, meliputi ruas Tol Porong - Gempol, Gempol - Pandaan, Pandaan - Malang, Gempol - Pasuruan, hingga Pasuruan - Probolinggo. Pembangunan akses tol ini secara signifikan memangkas waktu tempuh menuju Surabaya, sehingga menjadikan Kabupaten Pasuruan sebagai destinasi investasi yang sangat tepat dan menarik bagi pengembangan sektor industri. Adapun

visualisasi mengenai peta wilayah Kabupaten Pasuruan secara keseluruhan telah disajikan secara rinci pada Gambar berikut:



Gambar 2.1 Peta Administrasi Wilayah Kabupaten Pasuruan

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika

2.2. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

A. Daya Dukung Air

Evaluasi yang bersifat komprehensif dan mendalam mengenai keberlanjutan sumber daya alam, dengan fokus utama pada aspek daya dukung air, telah berhasil dilaksanakan sebagai bagian integral dari penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Kajian ini disusun sebagai landasan ilmiah untuk mendukung perumusan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasuruan untuk periode perencanaan tahun 2025-2029. Dalam pelaksanaannya, analisis mengenai kondisi daya dukung air tanah di seluruh wilayah Kabupaten Pasuruan dilakukan dengan menggunakan pendekatan spasial yang memiliki tingkat presisi tinggi, yakni dengan menerapkan metode sistem grid (grid system). Penggunaan pendekatan teknis ini dinilai sangat krusial karena

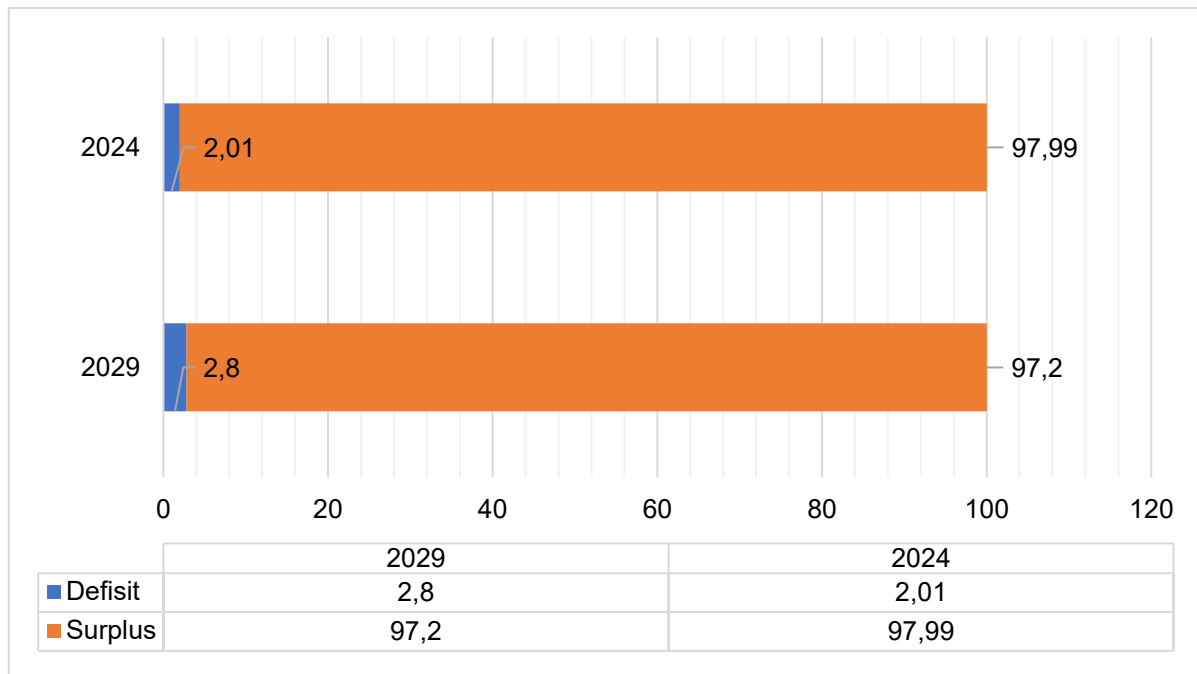
memungkinkan dilakukannya pemetaan yang akurat dan terperinci mengenai sebaran neraca air di setiap segmen wilayah secara spesifik.

Berdasarkan hasil visualisasi dan interpretasi data spasial tersebut, dapat diidentifikasi secara jelas bagaimana kondisi ketersediaan air yang diklasifikasikan berdasarkan proporsi wilayah surplus dan wilayah defisit. Pada kondisi eksisting tahun 2024, ketahanan air di Kabupaten Pasuruan secara umum menunjukkan status yang relatif aman dan terkendali. Hal ini dibuktikan dengan fakta bahwa mayoritas kebutuhan air di wilayah ini masih dapat terpenuhi dengan sangat baik, yang terindikasi secara statistik dengan cakupan wilayah yang berada dalam kondisi surplus mencapai angka dominan sebesar 97,99%. Kendati demikian, terdapat sinyal kerawanan dini yang sama sekali tidak boleh diabaikan oleh para pemangku kepentingan, yaitu adanya 2,01% bagian wilayah yang telah teridentifikasi mulai mengalami tekanan dan berada dalam kondisi defisit air.

Lebih lanjut, apabila ditinjau berdasarkan analisis proyeksi untuk jangka menengah hingga tahun 2029, terlihat adanya tren pergeseran neraca air yang mengarah pada kondisi yang perlu diwaspadai secara serius. Berdasarkan model proyeksi tersebut, diprediksi akan terjadi peningkatan luas wilayah yang mengalami defisit menjadi 2,80%. Peningkatan area defisit ini secara otomatis akan diikuti dengan penurunan proporsi wilayah yang memiliki surplus air menjadi 97,20%. Meskipun secara kuantitatif angka pergeseran menuju defisit tersebut tampak relatif kecil, namun adanya tren kenaikan defisit yang terjadi secara konsisten dalam kurun waktu lima tahun memberikan indikasi kuat mengenai potensi penurunan daya dukung air yang berlangsung secara bertahap di masa mendatang.

Fenomena penurunan kapasitas daya dukung lingkungan ini disinyalir kuat merupakan dampak akumulatif dari berbagai faktor tekanan (driver) pembangunan. Faktor utamanya adalah peningkatan permintaan kebutuhan air baku yang beriringan dengan laju pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi, serta dampak dari fenomena perubahan iklim global yang secara signifikan mempengaruhi pola curah hujan dan siklus pengisian kembali (recharge) ketersediaan sumber daya air tanah. Oleh sebab itu, indikasi peningkatan tren defisit ini menuntut adanya langkah antisipatif yang konkret dan segera, melalui perumusan kebijakan pengelolaan tata kelola air yang lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan. Langkah ini menjadi sangat

krusial untuk menjaga stabilitas keseimbangan antara sisi kebutuhan (demand) dan sisi ketersediaan (supply) air di masa depan agar tidak terjadi krisis air. Adapun visualisasi lengkap mengenai peta sebaran kondisi daya dukung air ini telah disajikan secara rinci pada Gambar berikut:



Gambar 2.2 Daya Dukung Air Tahun 2024 dan Tahun 2029

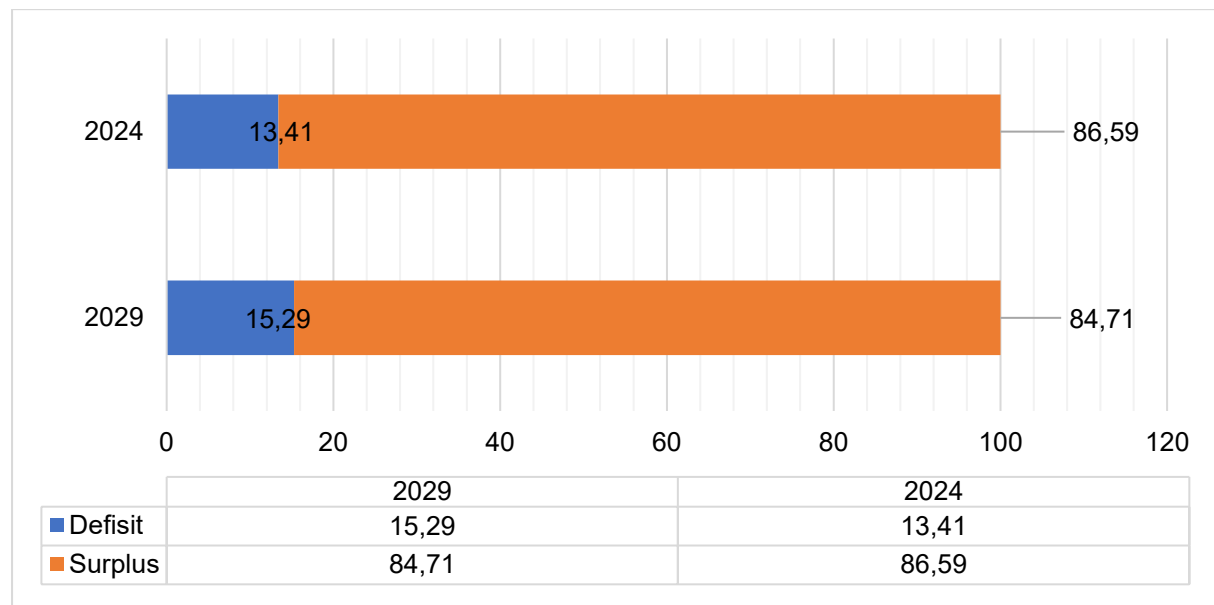
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan, 2024

B. Daya Dukung Pangan

Merujuk pada hasil analisis mendalam yang termuat dalam dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sebagai landasan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2025-2029, gambaran mengenai kondisi daya dukung pangan di wilayah ini pada tahun 2024 menunjukkan performa ketahanan pangan yang kuat. Secara agregat, mayoritas wilayah Kabupaten Pasuruan berada dalam kondisi aman, yang ditandai dengan capaian kondisi surplus sebesar 86,59%. Angka persentase yang dominan ini merepresentasikan suatu kondisi di mana total ketersediaan dan pasokan pangan mampu melampaui jumlah kebutuhan konsumsi masyarakat secara signifikan.

Meskipun demikian, masih terdapat catatan yang perlu mendapatkan perhatian, yakni adanya proporsi wilayah sebesar 13,41% yang teridentifikasi mengalami kondisi defisit. Angka ini menunjukkan bahwa masih terdapat sebagian

kecil wilayah atau kelompok masyarakat tertentu yang kebutuhan pangannya belum dapat terpenuhi secara optimal dari produksi lokal atau pasokan yang ada. Untuk memahami sebaran lokasi antara area yang mengalami surplus dan area yang mengalami defisit secara lebih spesifik, visualisasi spasialnya telah disajikan secara terperinci pada Gambar berikut:



Gambar 2.3 Grafik Daya Dukung Pangan Tahun 2024 dan Tahun 2029

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan, 2024

2.3. Ketahanan Energi

Dalam sebuah ekosistem perencanaan pembangunan daerah yang komprehensif, data demografi kependudukan di Kabupaten Pasuruan tidak hanya berfungsi sebagai catatan statistik semata, melainkan memegang peranan yang sangat vital dan fundamental. Data ini menjadi basis perhitungan utama dalam menyusun proyeksi kebutuhan masa depan serta alat ukur yang presisi untuk menilai tingkat ketahanan energi wilayah. Salah satu indikator kunci yang paling representatif dalam memotret kondisi tersebut adalah tingkat konsumsi listrik per kapita (kWh/kapita). Secara definisi dan teknis, konsumsi listrik per kapita dipahami sebagai rasio perbandingan antara total pemakaian tenaga listrik di suatu area dibagi dengan jumlah total penduduk yang berdomisili di wilayah tersebut dalam kurun waktu periode satu tahun anggaran. Angka rasio ini mencerminkan akumulasi total volume energi listrik dalam satuan kWh (kilo Watt hours) yang dimanfaatkan oleh masyarakat, yang mencakup

penggunaan secara langsung (rumah tangga) maupun tidak langsung (fasilitas publik dan industri) yang bersumber dari berbagai varian sumber energi yang tersedia di jaringan kelistrikan.

Merujuk pada hasil telaah mendalam terhadap data historis yang bersumber dari validasi Perusahaan Listrik Negara (PLN), terekam sebuah fenomena menarik di mana grafik konsumsi listrik per kapita di Kabupaten Pasuruan selama periode tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan tren peningkatan yang sangat signifikan dan konsisten. Sorotan khusus dan atensi mendalam perlu ditujukan pada kondisi aktual di tahun 2024, di mana terjadi sebuah lonjakan angka konsumsi yang tergolong sangat drastis dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Fenomena kenaikan tajam ini bukanlah sekadar anomali statistik, melainkan memberikan indikasi kuat dan bukti empiris adanya akselerasi masif dalam aktivitas ekonomi daerah serta laju industrialisasi yang pesat. Hal ini ditandai secara nyata dengan bertumbuhnya sektor-sektor usaha baru dan ekspansi industri yang beroperasi secara intensif, yang secara otomatis mendongkrak permintaan energi.

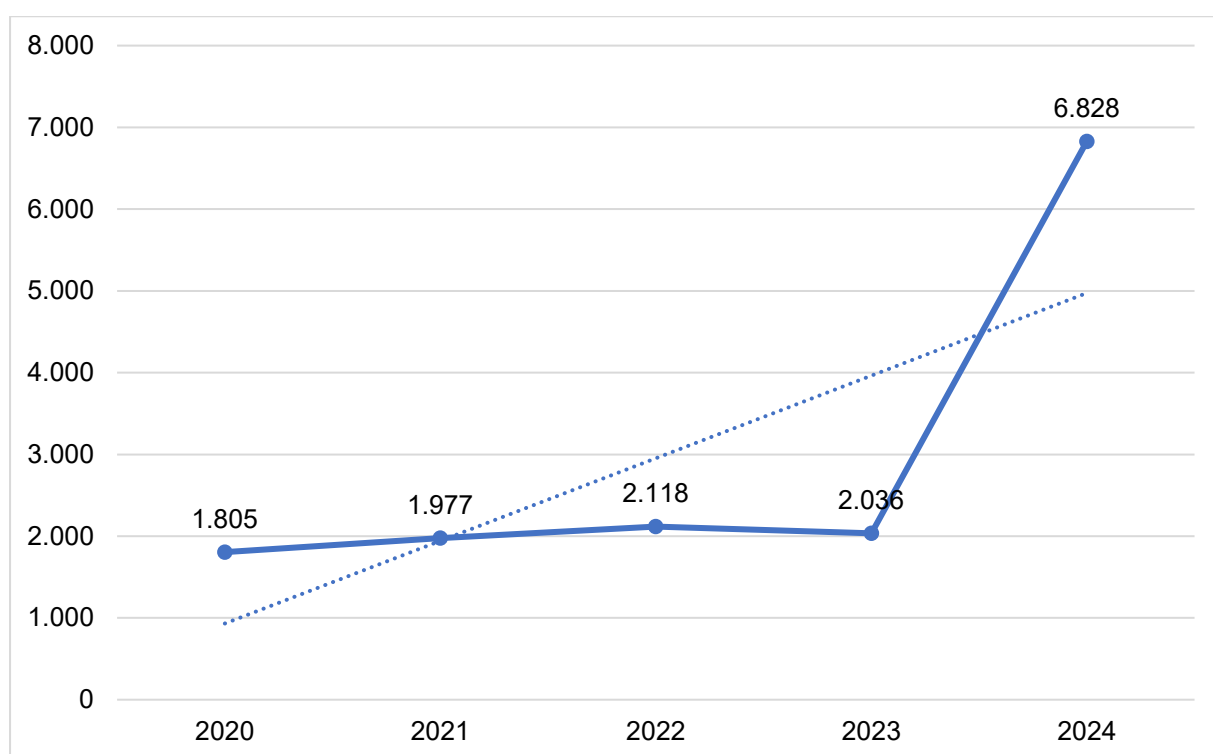
Dinamika lonjakan permintaan energi yang luar biasa ini membawa implikasi strategis yang serius dan menuntut adanya perumusan langkah-langkah penanganan yang bersifat komprehensif dan terukur. Fenomena tersebut mendorong urgensi bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait untuk memperkuat sektor energi melalui tiga langkah prioritas utama, yakni:

Penguatan Infrastruktur Energi secara Masif: Sangat diperlukan upaya percepatan yang konkret dalam hal ekstensifikasi dan perluasan jangkauan jaringan listrik hingga ke seluruh pelosok wilayah untuk menjamin rasio elektrifikasi yang merata. Selain itu, pembangunan unit gardu induk baru di titik-titik lokasi strategis serta peningkatan kapasitas terpasang pada pembangkit listrik menjadi hal yang mutlak dilakukan agar sistem kelistrikan daerah mampu menopang beban puncak (peak load) yang diproyeksikan akan terus bertambah seiring dengan kemajuan ekonomi yang pesat.

Akselerasi Diversifikasi Sumber Energi: Pemerintah perlu mendorong transformasi energi secara progresif dengan memperluas diversifikasi sumber daya energi. Langkah strategis ini diimplementasikan dengan menggali dan

mengembangkan potensi energi baru terbarukan (EBT) yang tersedia di daerah, seperti tenaga surya atau biomassa. Tujuannya adalah untuk mengurangi tingkat ketergantungan daerah yang selama ini masih tinggi terhadap pasokan listrik berbasis bahan bakar fosil, sekaligus mendukung kelestarian lingkungan.

Peningkatan Efisiensi dan Konservasi Energi: Mengimplementasikan manajemen pemakaian listrik atau Demand Side Management yang efisien, hemat, dan efektif di semua sektor. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa ketersediaan pasokan energi tidak hanya sekadar andal (reliable) dalam memenuhi lonjakan kebutuhan saat ini, tetapi juga menjamin prinsip keberlanjutan (sustainable) demi menjaga ketahanan energi jangka panjang bagi generasi masa depan."



Gambar 2.4 Jumlah Konsumsi Listrik Perkapita di Kabupaten Pasuruan Tahun 2020-2024

Sumber: PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Pasuruan, 2025

2.4. Lingkungan Hidup Berkualitas

Pola pemanfaatan dan tata kelola penggunaan lahan di suatu wilayah bukan hanya sekadar aktivitas fisik semata, melainkan memiliki korelasi yang sangat erat serta dampak yang fundamental terhadap fluktuasi nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

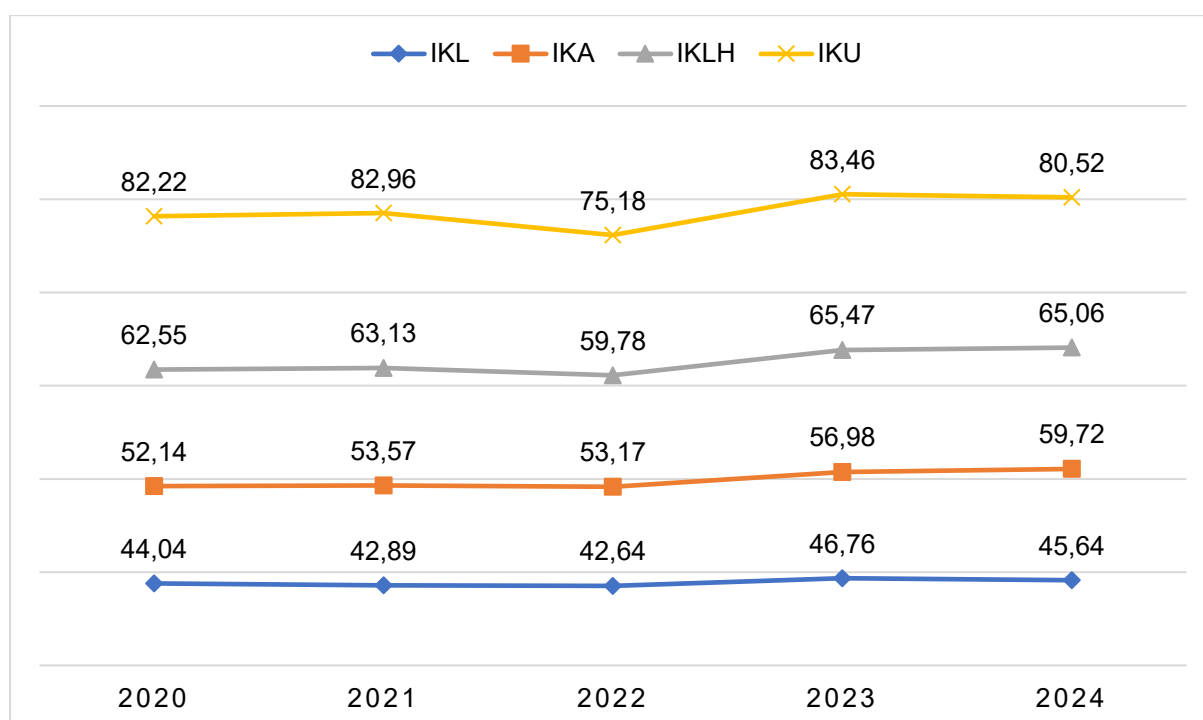
(IKLH). Pengelolaan tata ruang yang tidak seimbang secara langsung memengaruhi kemampuan alam dalam meregenerasi sumber dayanya. Dinamika perubahan bentang alam yang didorong oleh aktivitas antropogenik membawa konsekuensi ekologis yang serius. Alih fungsi lahan hutan menjadi area komersial atau permukiman secara nyata menghilangkan fungsi hutan sebagai penyerap emisi karbon alami. Ekspansi urbanisasi perkotaan yang cepat dan masif sering kali meningkatkan proporsi tutupan permukaan kedap air, seperti beton dan aspal, yang menghalangi infiltrasi air hujan ke dalam tanah dan memicu peningkatan limpasan permukaan. Selain itu, penerapan sistem pertanian intensif yang eksploitatif melalui penggunaan pupuk kimia dan pestisida sintetis secara berlebih turut menyumbang beban pencemaran ke badan air di sekitarnya.

Salah satu dampak utama dari berbagai aktivitas tersebut adalah pengurangan area tutupan vegetasi hijau secara drastis, padahal vegetasi ini berfungsi krusial sebagai penyangga alami ekosistem. Berkurangnya kanopi dan sistem perakaran tanaman secara berantai menghilangkan filter alami lingkungan. Kondisi ini memicu peningkatan pelepasan partikulat debu ke udara dan sedimen ke badan air, memperparah degradasi struktur fisik serta kimiawi tanah, dan menggerus kekayaan keanekaragaman hayati karena hilangnya habitat asli satwa maupun flora endemis. Secara akumulatif, keseluruhan faktor negatif tersebut akan melemahkan daya dukung dan daya tampung lingkungan, yang berujung pada penurunan kualitas lingkungan hidup daerah secara signifikan.

Sebaliknya, pergeseran menuju penerapan paradigma praktik penggunaan lahan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan menjadi solusi strategis yang sangat krusial untuk memitigasi kerusakan tersebut. Strategi konkret seperti pengembangan sistem pertanian organik yang ramah lingkungan mampu meminimalkan residu bahan kimia sintetis sehingga mencegah fenomena eutrofikasi di perairan. Bersamaan dengan itu, upaya rehabilitasi lahan-lahan yang kritis atau terdegradasi melalui reboisasi terbukti secara empiris mampu memberikan kontribusi positif dalam mendorong capaian IKLH. Upaya-upaya konstruktif ini berperan penting dalam memulihkan unsur hara dan menjaga stabilitas kesuburan tanah. Vegetasi yang kembali rapat berfungsi mengatur laju evapotranspirasi dan memfasilitasi penyerapan cadangan air tanah, melindungi siklus hidrologi demi

keberlanjutan sumber daya air, serta menyediakan ruang hidup yang memadai untuk memperkaya ekosistem keanekaragaman hayati.

Pemahaman terhadap konektivitas ini menjadi sangat fundamental, mengingat IKLH itu sendiri sejatinya merupakan nilai komposit yang secara resmi mengintegrasikan pengukuran dari tiga indikator utama performa lingkungan. Ketiga indikator tersebut meliputi Indeks Kualitas Air (IKA) yang mengukur tingkat pencemaran pada badan air seperti sungai dan danau, Indeks Kualitas Udara (IKU) yang menilai konsentrasi parameter polutan gas dan partikulat di udara ambien, serta Indeks Kualitas Lahan (IKL) yang memantau proporsi dan kondisi luasan area tutupan vegetasi atau hutan. Oleh karena itu, manajemen penggunaan lahan yang komprehensif dan tepat sasaran bukan hanya sekadar instrumen pelestarian kondisi fisik tanah, melainkan sebuah tuas pengendali utama yang berpengaruh langsung dan simultan terhadap perbaikan ketiga komponen penyusun indeks tersebut secara berkelanjutan.



Gambar 2.5 Kualitas Lahan dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan Tahun 2020-2024

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan, 2025

Sebagaimana tervisualisasi secara jelas pada Gambar 1.11, tren capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) di Kabupaten Pasuruan pada tahun 2024 menunjukkan adanya penurunan performa apabila disandingkan dengan capaian pada tahun 2023. Penurunan agregat nilai indeks ini salah satunya dipicu oleh merosotnya angka Indeks Kualitas Udara (IKU) dari tahun 2023 ke tahun 2024. Analisis mendalam menunjukkan bahwa degradasi kualitas udara ini terkonsentrasi pada kawasan-kawasan dengan kepadatan transportasi tinggi, di mana emisi gas buang kendaraan bermotor menjadi kontributor pencemar utama. Kondisi ini diperparah dengan minimnya keberadaan tegakan pohon sebagai penyangga (buffer) alami di titik-titik krusial, khususnya yang teridentifikasi pada lokasi sampling di Exit Tol Grati, serta sepanjang koridor jalur lalu lintas utama Pasuruan - Probolinggo, Pasuruan - Malang, dan Pasuruan - Surabaya. Menyikapi kondisi tersebut, diperlukan langkah mitigasi yang konkret berupa intensifikasi penanaman pohon peneduh di sepanjang jalur padat transportasi serta penerapan kebijakan yang ketat terkait pemenuhan baku mutu emisi kendaraan bermotor.

Selain faktor transportasi, penurunan kualitas lingkungan hidup secara umum juga didorong oleh akumulasi berbagai faktor tekanan lingkungan lainnya. Faktor-faktor tersebut meliputi praktik pembuangan air limbah domestik dan/atau air limbah industri yang belum memenuhi standar baku mutu lingkungan hidup, atau bahkan dibuang langsung ke badan air tanpa melalui proses pengolahan yang memadai pada Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Di sisi lain, sektor industri juga berkontribusi melalui belum optimalnya kelengkapan alat pengendali pencemaran udara pada cerobong-cerobong sumber emisi. Masalah ini semakin kompleks dengan terjadinya fenomena alih fungsi lahan yang masif yang memicu degradasi lingkungan, belum terpenuhinya target persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) di wilayah perkotaan, serta tren berkurangnya tutupan lahan vegetasi.

Dalam konteks pengendalian pencemaran, terdapat korelasi yang sangat signifikan antara ketersediaan RTH di wilayah perkotaan maupun peningkatan tutupan lahan terhadap perbaikan kualitas udara. Vegetasi dalam RTH memiliki fungsi vital ekologis dalam kemampuan penyerapan berbagai polutan udara berbahaya (seperti debu partikulat, CO, SO₂, dan NO₂). Saat ini, sebaran aset RTH telah mencakup wilayah perkotaan di seluruh kecamatan (24 Kecamatan). Guna meningkatkan fungsi

ekologis tersebut, serangkaian upaya strategis untuk optimalisasi RTH terus dilakukan, yang meliputi:

1. Ekstensifikasi RTH: Meningkatkan kuantitas ketersediaan RTH di kawasan perkotaan melalui pembangunan titik-titik lokasi RTH baru yang representatif.
2. Pemanfaatan Lahan Sempadan: Mengoptimalkan fungsi lahan sempadan sebagai sabuk hijau (green belt), mencakup area sempadan sungai, sempadan jalan raya, sempadan jalur SUTTET (Saluran Udara Tegangan Tinggi Ekstra Tinggi), sempadan rel kereta api, hingga sempadan danau.
3. Program PJLH: Mengoptimalkan program Penyedia Jasa Lingkungan Hidup (PJLH) yang difokuskan pada penyediaan lahan konservasi tanaman keras baik jenis kayu-kayuan maupun tanaman buah-buahan produktif khususnya pada area di luar Kawasan Hutan Negara.

Sementara itu, pada komponen Indeks Kualitas Lahan (IKL), juga tercatat adanya penurunan nilai indeks dari tahun 2023 ke tahun 2024. Perlu digarisbawahi bahwa penurunan ini utamanya disebabkan oleh kendala administratif teknis dalam proses penetapan delineasi tutupan vegetasi pada sistem aplikasi IKLH Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pada verifikasi data tahun 2023, delineasi tutupan lahan telah terverifikasi valid sehingga berkontribusi pada lonjakan signifikan nilai IKL dibanding tahun 2022. Namun, pada saat proses verifikasi ulang untuk data tahun 2024, sebagian data delineasi mengalami penolakan (reject) oleh tim verifikator pusat. Penolakan ini terjadi akibat ditemukannya tumpang tindih (overlap) delineasi dan titik koordinat dalam satu wilayah yang sama. Konsekuensinya, luasan tutupan vegetasi yang diakui secara sistem menjadi berkurang, sehingga nilai IKL tahun 2024 mengalami koreksi penurunan akibat penyesuaian data tersebut. Sebagai tindak lanjut, diperlukan upaya perbaikan mendasar dalam hal peningkatan akurasi inventarisasi data serta presisi dalam delineasi peta tutupan lahan di masa mendatang.

2.5. Demografi

Dalam perspektif pembangunan daerah yang holistik dan berkelanjutan, penduduk menempati posisi sentral sebagai salah satu modal dasar (*basic capital*) yang paling fundamental. Secara konseptual maupun empiris, penduduk merupakan subjek

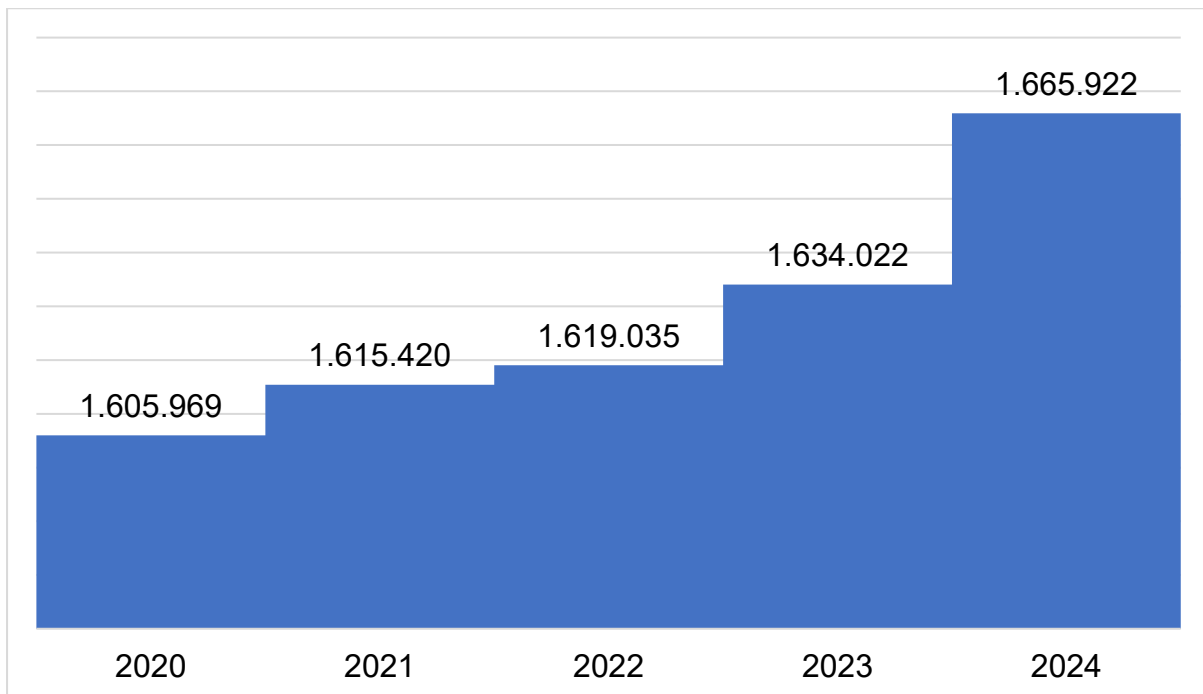
sekaligus objek penggerak dari pembangunan itu sendiri. Mereka berperan vital sebagai motor penggerak perekonomian daerah melalui partisipasi aktif angkatan kerja, dan di saat yang bersamaan, bertindak sebagai pasar domestik yang menyerap hasil produksi barang serta jasa. Namun, keberhasilan pembangunan terpadu tidak cukup hanya disandarkan pada aspek kuantitas atau besaran jumlah penduduk semata, melainkan harus diimbangi secara proporsional dengan perhatian yang serius terhadap aspek kualitas sumber daya manusia. Parameter kualitas ini secara faktual diukur melalui metrik resmi seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang mencakup dimensi umur panjang dan hidup sehat, tingkat pendidikan, serta standar hidup yang layak.

Jumlah penduduk yang besar memang secara teoretis menawarkan potensi keuntungan berupa bonus demografi, tetapi apabila struktur populasi tersebut tidak dibarengi dengan peningkatan kualitas kesehatan, kompetensi akademik, dan produktivitas kerja, kondisi ini justru berpotensi memicu permasalahan sosial-ekonomi yang sangat kompleks. Ketertinggalan dalam hal pendidikan dan minimnya keterampilan akan secara langsung berujung pada tingginya angka pengangguran terbuka serta stagnasi pengentasan kemiskinan. Lebih jauh lagi, ketidakmampuan angkatan kerja untuk terserap oleh pasar industri akan memberikan tekanan yang masif pada infrastruktur dan fasilitas layanan publik dasar milik pemerintah. Pada titik kritis inilah, populasi yang besar tersebut akan kehilangan fungsi potensialnya dan secara nyata bertransformasi menjadi beban atau hambatan demografis (*liability*) struktural yang akan mencederai daya saing wilayah serta memperlambat akselerasi pelaksanaan program pembangunan daerah.

A. Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk

Berdasarkan analisis terhadap data runtun waktu selama periode lima tahun (2020-2024) yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pasuruan, dinamika kependudukan di wilayah ini menunjukkan tren yang dinamis. Tercatat bahwa jumlah penduduk Kabupaten Pasuruan secara konsisten mengalami kenaikan, dengan catatan khusus pada tahun 2024 di mana laju pertumbuhan penduduk mengalami lonjakan peningkatan yang paling tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya dalam periode tersebut.

Data tren demografi ini memegang nilai signifikansi yang tinggi sebagai basis data utama dalam formulasi perencanaan pembangunan strategis maupun perumusan kebijakan sosial di daerah. Hal ini dikarenakan keberadaan populasi penduduk yang besar secara langsung berkorelasi dengan jaminan ketersediaan pasokan tenaga kerja (labor supply). Ketersediaan sumber daya manusia ini sangat krusial untuk mengisi kebutuhan pasar kerja dan menggerakkan roda perekonomian di berbagai sektor unggulan, mulai dari sektor pertanian, sektor industri pengolahan yang masif, hingga sektor jasa. Dengan demikian, pertumbuhan penduduk yang sehat dan terkendali diharapkan mampu menjamin ketersediaan jumlah angkatan kerja yang produktif guna mendukung daya saing ekonomi daerah secara berkelanjutan.



Gambar 2.6 Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan, 2025

Analisis terhadap perkembangan demografi di Kabupaten Pasuruan selama periode lima tahun terakhir (2020-2024) memperlihatkan tren yang cukup dinamis. Berdasarkan data visualisasi grafik, jumlah total penduduk secara konsisten mengalami tren kenaikan positif di setiap tahunnya, bergerak dari angka 1.605.969 jiwa pada tahun 2020 hingga mencapai 1.665.922 jiwa pada tahun 2024. Kenaikan kuantitas ini mencerminkan daya tarik wilayah serta pertumbuhan alami yang terus berjalan.

Namun, jika ditinjau dari sisi laju pertumbuhan penduduk (LPP), tren yang terjadi menunjukkan pola fluktuasi yang signifikan, yang merefleksikan dinamika keberhasilan dan tantangan dalam kebijakan kependudukan:

1. Fase Akselerasi Awal (2021-2022): Terjadi peningkatan laju pertumbuhan dari 0,59% pada tahun 2021 menjadi 0,81% pada tahun 2022. Hal ini mengindikasikan adanya lonjakan pertumbuhan pasca-awal pandemi.
2. Fase Perlambatan (2023): Pada tahun 2023, laju pertumbuhan berhasil ditekan secara signifikan menjadi 0,58%. Angka ini menjadi titik terendah dalam periode pengamatan, yang mengindikasikan efektivitas intervensi program pengendalian penduduk pada tahun tersebut.
3. Fase Percepatan Kembali (2024): Memasuki tahun 2024, terjadi *rebound* atau percepatan kembali laju pertumbuhan yang cukup tajam mencapai angka 0,93%.

Secara keseluruhan, fluktuasi ini khususnya kemampuan daerah dalam menekan laju pertumbuhan pada periode tertentu (seperti tahun 2023) mengindikasikan bahwa instrumen dan program pengendalian penduduk di Kabupaten Pasuruan telah berjalan, meskipun masih menghadapi tantangan volatilitas yang dipengaruhi oleh faktor eksternal maupun internal. Pola naik-turunnya laju pertumbuhan ini menjadi *baseline* penting untuk evaluasi strategi keluarga berencana dan manajemen migrasi di masa mendatang.

B. Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur

Selain evaluasi terhadap aspek pertumbuhan demografis, pemahaman mendalam mengenai struktur umur penduduk merupakan instrumen yang menjadi faktor kunci dalam tahapan perencanaan kebijakan publik tingkat daerah. Variabel demografis ini menempati posisi sentral sebagai landasan utama dalam pengambilan keputusan strategis, baik untuk kerangka intervensi di sektor ekonomi maupun pelaksanaan program sosial kemasyarakatan. Melalui mekanisme pembedahan komposisi umur, pemerintah memiliki landasan faktual yang terukur untuk merancang matriks program pembangunan yang lebih presisi dan efisien. Pemetaan struktural tersebut memfasilitasi otoritas terkait untuk memastikan bahwa rumusan kebijakan dan alokasi

sumber daya benar-benar tepat sasaran, merespons secara spesifik kebutuhan aktual dari kelompok usia dominan yang teridentifikasi. Sebagai representasi profil demografi wilayah terkait, berikut adalah rincian data jumlah penduduk Kabupaten Pasuruan berdasarkan klasifikasi kelompok umur pada tahun 2024:

Tabel 2.2 Jumlah Penduduk Kabupaten Pasuruan menurut Kelompok Umur Tahun 2024

Kelompok Umur	Laki-laki (Ribu Jiwa)	Perempuan (Ribu Jiwa)	Jumlah (Ribu Jiwa)
0-4	56.368	53.125	109.493
5-9	68.274	64.265	132.539
10-14	69.017	63.829	132.846
15-19	56.037	53.250	109.287
20-24	65.200	62.932	128.132
25-29	65.440	61.660	127.100
30-34	61.188	59.399	120.587
35-39	60.187	60.282	120.469
40-44	64.422	66.562	130.984
45-49	58.813	64.015	122.828
50-54	56.437	59.406	115.843
55-59	49.169	54.314	103.483
60-64	39.426	42.340	81.766
65-69	28.007	29.118	57.125
70-74	18.166	18.164	36.330
75+	14.954	22.156	37.110
Jumlah	831.105	834.817	1.665.922

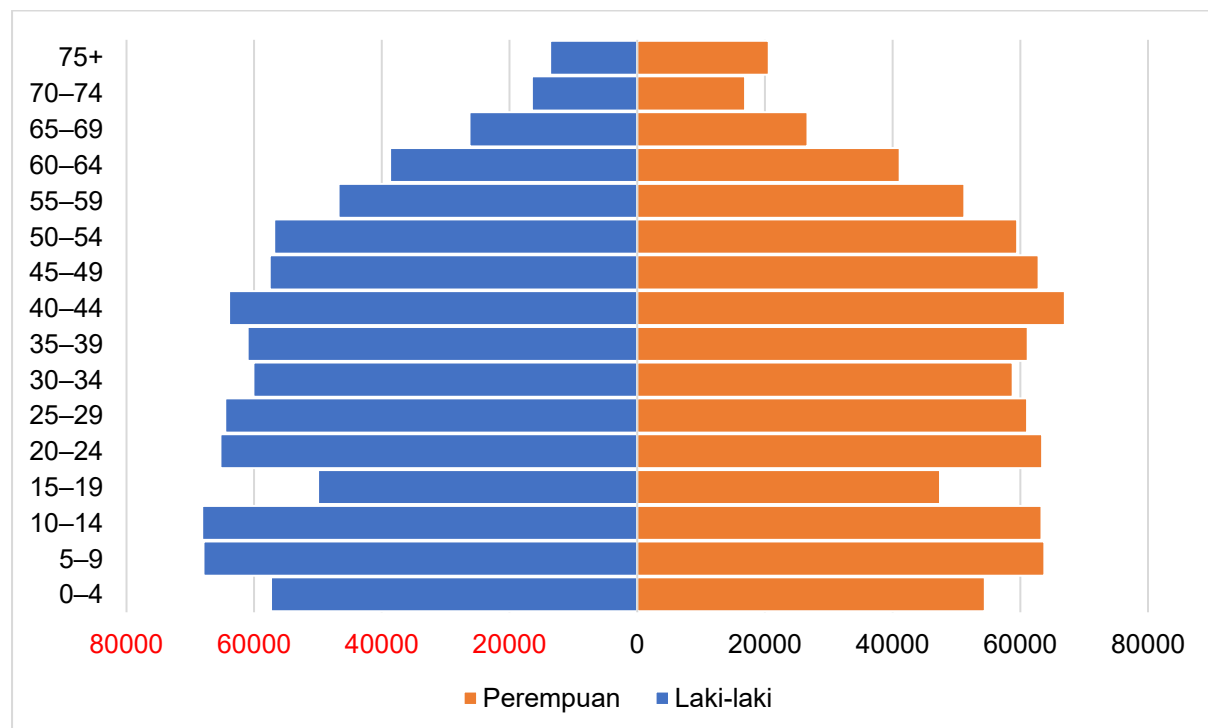
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan, 2025

Merujuk pada Tabel di atas, dapat diidentifikasi pola persebaran usia yang signifikan. Kelompok umur 10-14 tahun tercatat sebagai kelompok dengan jumlah populasi tertinggi. Temuan ini membawa implikasi kebijakan bahwa pemerintah daerah perlu memprioritaskan peningkatan kapasitas fasilitas pendidikan menengah serta program pengembangan anak dan remaja.

Di sisi lain, jumlah penduduk terendah berada pada kelompok lansia (umur 70-74 tahun dan 75+). Angka yang mengecil pada kelompok usia lanjut ini dapat mengindikasikan adanya tingkat mortalitas yang lebih tinggi pada segmen tersebut, yang mungkin dipengaruhi oleh faktor akses terhadap layanan kesehatan geriatri,

kondisi kesehatan umum, atau faktor sosial ekonomi yang perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut.

Pemetaan gambaran yang lebih komprehensif mengenai struktur demografi dapat dievaluasi melalui representasi bentuk piramida penduduk. Instrumen ini secara spesifik mengintegrasikan distribusi variabel umur serta komposisi jenis kelamin secara terstruktur. Visualisasi analitik tersebut bersifat krusial sebagai landasan evaluasi administratif guna menentukan klasifikasi karakteristik demografi spesifik di suatu wilayah. Analisis terhadap bentuk piramida ini mendiagnosis status populasi secara faktual, yang mencakup indikasi apakah komposisi penduduk berstatus sedang tumbuh, stagnan, atau menua. Sebagai pemaparan data aktual, berikut adalah visualisasi Piramida Penduduk Kabupaten Pasuruan pada tahun 2024:



Gambar 2.7 Piramida Penduduk Kabupaten Pasuruan Tahun 2024

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan, 2025

Sebagaimana terlihat pada Gambar tersebut, piramida penduduk Kabupaten Pasuruan dikategorikan sebagai jenis Piramida Ekspansif. Bentuk piramida yang melebar di bagian bawah ini menunjukkan bahwa penduduk di wilayah ini berada dalam fase pertumbuhan (*growing population*).

Karakteristik utama dari piramida ekspansif ini meliputi:

1. Dominasi Penduduk Usia Muda: Sebagian besar populasi terkonsentrasi pada kelompok usia anak-anak dan remaja, yang menjadi basis bagi bonus demografi di masa depan.
2. Proporsi Lansia Kecil: Kelompok usia tua jumlahnya semakin mengerucut di bagian atas piramida.
3. Tingkat Kelahiran Tinggi: Dasar piramida yang lebar mengindikasikan bahwa tingkat kelahiran bayi masih cukup tinggi.
4. Pertumbuhan Penduduk Tinggi: Secara agregat, wilayah ini masih mengalami pertumbuhan penduduk yang cepat, yang menuntut penyediaan lapangan kerja dan layanan dasar yang masif.

C. Persebaran Penduduk & Rasio Jenis Kelamin Menurut Kecamatan

Dinamika persebaran penduduk merefleksikan pola konsentrasi pemukiman yang dipengaruhi oleh daya dukung wilayah dan aktivitas ekonomi. Berdasarkan analisis data demografi Kabupaten Pasuruan dari tahun 2020 hingga 2024 yang mencakup 24 kecamatan, terlihat adanya pola distribusi yang tidak merata antarwilayah.

Kecamatan Gempol secara konsisten tercatat sebagai wilayah dengan densitas demografi tertinggi, dengan jumlah penduduk mencapai 133.197 jiwa pada tahun 2024. Tingginya angka ini menempatkan Gempol sebagai pusat konsentrasi penduduk utama di kabupaten. Sebaliknya, Kecamatan Tosari menjadi wilayah dengan jumlah penduduk paling sedikit, yakni hanya 18.925 jiwa pada tahun 2024. Jumlah ini merepresentasikan proporsi yang sangat kecil, yakni hanya sekitar 1,2% dari total keseluruhan penduduk Kabupaten Pasuruan, yang mengindikasikan karakteristik wilayah yang mungkin lebih didominasi oleh kawasan lindung atau topografi pegunungan dengan pemukiman yang terbatas.

Rincian komprehensif mengenai rekapitulasi data tren persebaran penduduk yang terdistribusi secara spesifik di setiap wilayah kecamatan dalam periode kumulatif lima tahun terakhir disajikan secara terstruktur. Pemetaan data riwayat fluktuasi ini memfasilitasi evaluasi administratif terhadap dinamika konsentrasi populasi secara

spasial pada tingkat daerah. Seluruh rekam jejak kuantitatif tersebut dapat ditelaah secara sistematis pada tabel berikut:

Tabel 2.3 Persebaran Penduduk di Kabupaten Pasuruan Tahun 2020-2024

No	Kecamatan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Purwodadi	70.015	70.438	70.601	71.345	72.781
2	Tutur	53.743	53.887	53.830	55.107	56.187
3	Puspo	27.722	27.771	27.778	28.164	28.762
4	Tosari	18.799	18.818	18.837	18.550	18.925
5	Lumbang	35.174	35.385	35.464	35.879	36.681
6	Pasrepan	52.396	52.594	52.596	53.259	54.556
7	Kejayan	65.374	65.603	65.589	67.235	68.733
8	Wonorejo	59.864	60.186	60.286	61.112	62.326
9	Purwosari	84.137	84.706	84.962	86.266	88.051
10	Prigen	87.227	87.649	87.745	88.671	90.372
11	Sukorejo	87.477	88.069	88.336	88.839	90.568
12	Pandaan	111.062	111.563	111.651	112.299	114.237
13	Gempol	129.990	130.596	130.719	130.809	133.197
14	Beji	87.022	87.864	88.385	89.930	91.405
15	Bangil	83.307	83.671	83.724	84.241	85.504
16	Rembang	66.711	67.294	67.631	68.840	70.810
17	Kraton	88.525	88.912	88.969	88.535	90.315
18	Pohjentrek	31.296	31.581	31.751	31.436	31.900
19	Gondangwetan	56.264	56.589	56.705	57.339	58.533
20	Rejoso	46.766	47.036	47.132	48.366	49.070
21	Winongan	44.287	44.569	44.686	45.565	46.331
22	Grati	78.930	79.368	79.512	80.858	82.186
23	Lekok	77.514	78.176	78.551	78.286	80.139
24	Nguling	62.367	63.095	63.595	63.091	64.353
Kabupaten Pasuruan		1.605.969	1.615.420	1.619.035	1.634.022	1.665.922

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan, 2025

Indikator kepadatan penduduk merupakan parameter krusial dalam perencanaan tata ruang, karena menggambarkan intensitas tekanan demografis terhadap daya dukung lingkungan. Secara teoritis, standar kepadatan penduduk yang dianggap ideal untuk kenyamanan ruang hidup adalah 500 jiwa per kilometer persegi (km^2). Semakin tinggi angka kepadatan di atas ambang batas tersebut, semakin besar pula tantangan dalam penyediaan infrastruktur, sanitasi, dan ruang terbuka hijau.

Berdasarkan analisis data Badan Pusat Statistik tahun 2024, distribusi kepadatan penduduk di Kabupaten Pasuruan menunjukkan disparitas yang sangat tajam antarwilayah. Secara agregat, rata-rata kepadatan penduduk Kabupaten Pasuruan telah mencapai 1.130,19 jiwa/km², angka yang jauh melampaui ambang batas ideal.

Tingkat kepadatan tertinggi terkonsentrasi di Kecamatan Pohjentrek, dengan angka densitas mencapai 2.685,19 jiwa/km². Angka ini mengindikasikan kondisi wilayah yang sangat padat (*overcrowded*), yang juga diikuti oleh wilayah urban lainnya seperti Kecamatan Pandaan (2.640,10 jiwa/km²) dan Kecamatan Beji (2.290,85 jiwa/km²). Tingginya kepadatan di wilayah-wilayah ini menuntut prioritas pada penataan kawasan kumuh dan manajemen limbah domestik.

Di sisi lain, spektrum kepadatan terendah berada di Kecamatan Tosari, dengan angka densitas hanya sebesar 193,11 jiwa/km². Wilayah ini, bersama dengan Kecamatan Lumbang (292,16 jiwa/km²) dan Kecamatan Puspo (492,92 jiwa/km²), menjadi satu-satunya tiga kecamatan di Kabupaten Pasuruan yang masih berada dalam kategori kepadatan ideal (di bawah 500 jiwa/km²). Rendahnya kepadatan di wilayah-wilayah ini umumnya berkorelasi dengan karakteristik topografi pegunungan dan fungsi kawasan sebagai area konservasi atau pertanian.

Rincian lengkap mengenai tren kepadatan penduduk di seluruh kecamatan dari tahun 2021 hingga 2024 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.4 Kepadatan Penduduk per Kecamatan di Kabupaten Pasuruan Tahun 2021-2024

No	Kecamatan	2021	2022	2023	2024
1	Purwodadi	687,47	689,06	696,32	710,34
2	Tutur	624,41	623,75	638,55	651,07
3	Puspo	475,94	476,06	482,67	492,92
4	Tosari	192,02	192,21	189,29	193,11
5	Lumbang	281,84	282,47	285,77	292,16
6	Pasrepan	584,70	584,72	592,10	606,51
7	Kejayan	828,84	828,67	849,46	868,39
8	Wonorejo	1.272,43	1.274,55	1.292,01	1.317,67
9	Purwosari	1.414,83	1.419,11	1.440,89	1.470,70

No	Kecamatan	2021	2022	2023	2024
10	Prigen	719,02	719,81	728,79	741,36
11	Sukorejo	1.513,73	1.518,32	1.524,08	1.556,69
12	Pandaan	2.578,30	2.580,33	2.595,31	2.640,10
13	Gempol	2.011,65	2.013,54	2.014,93	2.051,71
14	Beji	2.202,11	2.215,16	2.253,88	2.290,85
15	Bangil	1.876,03	1.877,22	1.888,81	1.917,13
16	Rembang	1.582,64	1.590,57	1.619,00	1.665,33
17	Kraton	1.751,96	1.753,08	1.744,53	1.779,61
18	Pohjentrek	2.658,33	2.672,64	2.646,13	2.685,19
19	Gondangwetan	2.155,77	2.160,19	2.184,34	2.229,83
20	Rejoso	1.271,24	1.273,84	1.307,19	1.326,22
21	Winongan	969,52	972,07	991,19	1.007,85
22	Grati	1.562,98	1.565,81	1.592,32	1.618,47
23	Lekok	1.678,68	1.686,73	1.681,04	1.720,83
24	Nguling	1.481,10	1.492,84	1.481,01	1.510,63
Kabupaten Pasuruan		1.095,93	1.098,38	1.108,55	1.130,19

Hasil Proyeksi Penduduk Interim 2020-2023 (Pertengahan tahun/Juni)

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan, 2025

Rasio Jenis Kelamin (*Sex Ratio*) merupakan indikator demografi vital yang mengukur perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dan jumlah penduduk perempuan di suatu wilayah pada periode waktu tertentu. Indikator ini biasanya dinyatakan dalam banyaknya penduduk laki-laki per 100 penduduk perempuan. Keseimbangan rasio ini memiliki implikasi strategis dalam perencanaan pembangunan yang responsif gender.

Berdasarkan analisis, terlihat adanya dinamika pergeseran struktur gender penduduk di Kabupaten Pasuruan selama empat tahun terakhir. Pada periode tahun 2021 hingga 2022, Kabupaten Pasuruan masih didominasi oleh penduduk laki-laki, ditandai dengan angka rasio di atas 100, yakni 100,13 pada tahun 2021 dan 100,11 pada tahun 2022.

Namun, memasuki tahun 2023 dan 2024, terjadi titik balik (*turning point*) di mana komposisi penduduk perempuan mulai lebih mendominasi dibandingkan laki-laki. Hal ini tecermin dari penurunan angka rasio menjadi 99,45 pada tahun 2023 dan sedikit naik namun tetap di bawah seratus pada angka 99,56 di tahun 2024.

Fenomena ini menunjukkan bahwa saat ini jumlah penduduk perempuan secara agregat lebih banyak dibandingkan penduduk laki-laki.

Jika ditinjau lebih spesifik per wilayah kecamatan pada tahun 2024, terdapat variasi yang cukup mencolok. Beberapa kecamatan masih mempertahankan dominasi laki-laki, seperti Kecamatan Prigen dengan rasio tertinggi sebesar 101,78. Sebaliknya, wilayah dengan dominasi perempuan (rasio terendah) terdapat di Kecamatan Nguling dengan angka rasio 96,40, yang mengindikasikan jumlah perempuan jauh melampaui laki-laki di wilayah tersebut.

Pergeseran dominasi jumlah penduduk ke arah perempuan ini membawa dampak turunan yang signifikan baik secara sosial maupun ekonomi:

1. Dampak Ekonomi: Peningkatan jumlah perempuan berpotensi mendorong partisipasi angkatan kerja wanita yang lebih besar. Hal ini menjadi peluang untuk memacu pertumbuhan ekonomi daerah melalui pemberdayaan UMKM dan peningkatan kesetaraan pendapatan keluarga.
2. Dampak Sosial: Perubahan ini dapat mengubah dinamika peran dalam keluarga dan masyarakat, yang menuntut adanya kebijakan yang lebih inklusif untuk menjamin kesetaraan gender dan akses layanan publik yang setara bagi perempuan.

Data lengkap mengenai perbandingan rasio jenis kelamin di setiap kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.5 Rasio Jenis Kelamin per Kecamatan di Kabupaten Pasuruan Tahun 2021-2024

No	Kecamatan	2021	2022	2023	2024
1	Purwodadi	103,00	103,10	101,09	101,62
2	Tutur	101,78	101,72	100,76	101,09
3	Puspo	99,06	99,10	98,51	99,49
4	Tosari	99,47	99,29	99,36	99,78
5	Lumbang	98,90	98,90	98,07	98,35
6	Pasrepan	97,32	97,35	96,82	96,89
7	Kejayan	96,96	97,15	96,52	96,62
8	Wonorejo	97,77	97,87	97,28	97,32

No	Kecamatan	2021	2022	2023	2024
9	Purwosari	101,45	101,47	100,93	100,88
10	Prigen	102,20	102,14	101,73	101,78
11	Sukorejo	99,43	99,32	99,23	99,55
12	Pandaan	100,28	100,32	100,30	100,29
13	Gempol	101,41	101,30	101,20	101,11
14	Beji	101,09	101,07	100,38	100,55
15	Bangil	99,80	99,63	99,38	99,32
16	Rembang	97,23	97,20	96,54	96,75
17	Kraton	103,06	102,88	100,09	100,08
18	Pohjentrek	102,27	102,25	101,49	101,26
19	Gondangwetan	102,31	102,62	100,91	100,89
20	Rejoso	101,89	101,83	101,63	101,65
21	Winongan	99,40	99,30	99,47	99,30
22	Grati	99,09	98,99	97,98	98,02
23	Lekok	98,37	98,49	97,80	98,24
24	Nguling	96,40	96,33	96,42	96,40
Kabupaten Pasuruan		100,13	100,11	99,45	99,56

Hasil Proyeksi Penduduk Interim 2020-2023 (Pertengahan tahun/Juni)

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan, 2025

D. Komposisi Penduduk berdasarkan Ketenagakerjaan

Indikator ketenagakerjaan merupakan parameter fundamental untuk mengukur dinamika ekonomi dan produktivitas daerah. Berdasarkan data periode 2021-2024, struktur ketenagakerjaan di Kabupaten Pasuruan menunjukkan tren pemulihan dan penguatan yang positif.

Secara kuantitas, jumlah Angkatan Kerja di Kabupaten Pasuruan mengalami peningkatan yang konsisten setiap tahunnya, bergerak dari 893.726 jiwa pada tahun 2021 menjadi 978.581 jiwa pada tahun 2024. Tren kenaikan ini berbanding terbalik dengan kelompok Bukan Angkatan Kerja (seperti mereka yang bersekolah, mengurus rumah tangga, atau lainnya) yang terus mengalami penurunan dari 401.053 jiwa (2021) menjadi 320.809 jiwa (2024). Pergeseran ini mengindikasikan semakin banyaknya penduduk usia produktif yang beralih status untuk aktif masuk ke pasar kerja.

Meskipun jumlah Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas sempat mengalami fluktuasi berupa penurunan pada tahun 2023 menjadi 1.285.630 jiwa, namun indikator Tingkat

Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) justru menunjukkan tren positif yang terus meningkat, mencapai 71,31% pada tahun 2024. Kenaikan TPAK ini merefleksikan tingginya semangat dan ketersediaan penduduk untuk bekerja.

Di sisi lain, keberhasilan penyerapan tenaga kerja tecermin dari penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang signifikan, dari 6,03% pada tahun 2021 turun menjadi 5,02% pada tahun 2024. Hal ini didorong oleh kenaikan jumlah penduduk yang bekerja yang mencapai 929.468 jiwa pada tahun 2024, sementara jumlah pengangguran berhasil ditekan menjadi 49.113 jiwa. Rincian indikator makro ketenagakerjaan tersebut disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.6 Kondisi Ketenagakerjaan di Kabupaten Pasuruan Tahun 2021-2024

No	Jenis Kegiatan Utama	Satuan	2021	2022	2023	2024
1	Angkatan Kerja	Jiwa	893726	916175	915507	978581
	Bekerja	Jiwa	839861	862062	865336	929468
	Pengangguran	Jiwa	53865	54113	50171	49113
2	Bukan Angkatan Kerja	Jiwa	401053	389023	370123	320809
	Sekolah	Jiwa	80310	70415	82044	78547
	Mengurus Rumah Tangga	Jiwa	247535	258013	237580	201369
	Lainnya	Jiwa	73208	60595	50499	40893
3	Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas	Jiwa	1294779	1305198	1285630	1299390
4	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	69,03	70,19	71,21	71,31
5	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	6,03	5,91	5,48	5,02

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan, 2025

Ditinjau dari jenis pekerjaannya, struktur ekonomi Kabupaten Pasuruan terlihat didominasi oleh sektor formal dan industri. Berdasarkan Tabel tersebut, mayoritas penduduk Kabupaten Pasuruan bekerja sebagai Karyawan Swasta/BUMN/BUMD/Honorer, dengan jumlah mencapai 359.929 jiwa pada tahun 2024. Dominasi ini selaras dengan karakteristik wilayah Kabupaten Pasuruan sebagai salah satu kawasan industri utama di Jawa Timur, yang menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.

Sektor pertanian juga masih memegang peranan penting, terlihat dari jumlah Petani/Peternak/Nelayan yang stabil di angka 189.490 jiwa pada tahun 2024. Sementara itu, jenis pekerjaan dengan jumlah paling sedikit tercatat pada profesi Pembantu Rumah Tangga yang hanya berjumlah 626 jiwa pada tahun 2024.

Secara implisit, komposisi struktur pekerjaan tersebut menunjukkan tingkat ketergantungan ekonomi Kabupaten Pasuruan yang cukup tinggi terhadap sektor industri dan pertanian sebagai penopang utama penyerapan tenaga kerja. Kondisi ini mencerminkan karakter ekonomi yang relatif produktif, namun sekaligus menuntut perhatian pada aspek perlindungan tenaga kerja, stabilitas pendapatan, serta keberlanjutan sektor-sektor dominan tersebut agar ketahanan ekonomi daerah tetap terjaga dalam jangka panjang.

Data lengkap mengenai sebaran jenis pekerjaan penduduk dapat dilihat pada kelanjutan tabel berikut:

Tabel 2.7 Komposisi Penduduk Menurut Pekerjaan

No	Pekerjaan	2021	2022	2023	2024
1	Belum/Tidak Bekerja	366672	378282	391685	397661
2	Mengurus Rumah Tangga	230025	238608	246299	249523
3	Pelajar/Mahasiswa	235356	224234	213833	208582
4	PNS/TNI/Polri/Pensiunan	16834	16664	16565	16465
5	Petani/Peternak/Nelayan	189977	189391	189410	189490
6	Buruh Tani/Ternak/Nelayan	20114	20111	21479	21818
7	Perdagangan/Industri/Konstruksi/Transportasi	1862	1814	1844	1839
8	Buruh Harian Lepas	8948	9122	11640	12448
9	Karyawan Swasta/BUMN/BUMD/Honorar	351171	357574	359011	359929
10	Guru/Dosen	11896	12306	12524	12693
11	Pembantu Rumah Tangga	638	622	625	626
12	Tukang Batu/Kayu	2149	2184	2650	2730
13	Pedagang/Wiraswasta	157972	159497	154107	161038
14	Kepala/Perangkat Desa	1186	1152	1106	1089
15	Lainnya	7123	4629	11244	4807

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, 2025
(Data diolah)

E. Komposisi Penduduk berdasarkan Pendidikan

Tingkat pendidikan penduduk merupakan indikator fundamental dalam mengukur Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sekaligus cerminan kualitas tenaga kerja di suatu wilayah. Berdasarkan data runtun waktu tahun 2021-2024, profil pendidikan penduduk Kabupaten Pasuruan menunjukkan pola distribusi yang mengerucut pada pendidikan dasar.

Secara kuantitas, penduduk dengan kualifikasi pendidikan Tamat SD/ sederajat masih mendominasi struktur demografi pendidikan, dengan proporsi mencapai 30,33% atau sebanyak 497.614 jiwa pada tahun 2024. Sementara itu, jenjang pendidikan tertinggi yakni S2/S3 memiliki jumlah populasi paling sedikit, yakni hanya 2.122 jiwa (0,13%). Ketimpangan ini menjadi tantangan tersendiri dalam upaya peningkatan daya saing daerah di era ekonomi berbasis pengetahuan.

Meskipun demikian, terdapat pergeseran tren yang positif jika dilihat dari kontribusi per jenjang pendidikan. Kelompok penduduk dengan pendidikan rendah, khususnya yang Belum Tamat SD/ sederajat dan Tamat SD/ sederajat, menunjukkan tren penurunan persentase dari tahun ke tahun. Hal ini mengindikasikan adanya perbaikan akses pendidikan dasar dan keberhasilan program wajib belajar.

Di sisi lain, terjadi peningkatan yang menggembirakan pada jenjang pendidikan menengah dan tinggi. Penduduk yang menamatkan pendidikan SLTA/ sederajat mengalami kenaikan konsisten hingga mencapai 278.598 jiwa pada tahun 2024. Tren kenaikan serupa juga terjadi pada lulusan pendidikan tinggi (D1-D3, D4/S1, hingga S2/S3), yang menandakan semakin membaiknya kesadaran masyarakat akan pentingnya investasi pendidikan tinggi. Namun, perlu menjadi catatan khusus bahwa kelompok Tidak/ Belum Sekolah juga mengalami peningkatan angka yang cukup signifikan, yang kemungkinan besar berkorelasi dengan tingginya angka kelahiran (penduduk usia prasekolah) sebagaimana terlihat pada piramida penduduk ekspansif.

Rincian komprehensif mengenai dinamika perkembangan komposisi tingkat pendidikan penduduk disajikan secara terstruktur untuk memfasilitasi evaluasi administratif. Seluruh representasi data faktual terkait kualifikasi akademis tersebut dapat ditelaah dan dicermati secara sistematis pada format tabel berikut:

Tabel 2.8 Komposisi Penduduk Menurut Pendidikan

No	Pendidikan	2021 Jiwa	2022 Jiwa	2023 Jiwa	2024 Jiwa
1	Tidak/belum sekolah	324914	341313	357417	364634
2	Belum tamat SD/ sederajat	244233	235317	229615	226048
3	Tamat SD/ sederajat	505584	501397	498965	497614
4	Tamat SLTP/ sederajat	217145	216089	216327	217241
5	Tamat SLTA/ sederajat	260185	269151	276243	278598
6	D1/D2/D3	9614	9871	10118	10237
7	D4/S1	38552	41085	43275	44244
8	S2/S3	1825	1967	2062	2122
Total		1602052	1616190	1634022	1640738

*Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, 2025,
diolah*

Tabel 2.9 Presentase Komposisi Penduduk Menurut Pendidikan

No	Pendidikan	2021 %	2022 %	2023 %	2024 %
1	Tidak/belum sekolah	20,28	21,12	21,87	22,22
2	Belum tamat SD/ sederajat	15,25	14,56	14,05	13,78
3	Tamat SD/ sederajat	31,56	31,02	30,54	30,33
4	Tamat SLTP/ sederajat	13,55	13,37	13,24	13,24
5	Tamat SLTA/ sederajat	16,24	16,65	16,91	16,98
6	D1/D2/D3	0,6	0,61	0,62	0,62
7	D4/S1	2,41	2,54	2,65	2,7
8	S2/S3	0,11	0,12	0,13	0,13
Total		100	100	100	100

*Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, 2025,
diolah*

F. Proyeksi Demografi

Proyeksi penduduk merupakan instrumen perencanaan strategis yang dibangun melalui perhitungan ilmiah, dengan mempertimbangkan asumsi dinamika komponen

pertumbuhan penduduk yakni fertilitas (kelahiran), mortalitas (kematian), dan migrasi (perpindahan). Keakuratan estimasi jumlah dan struktur penduduk untuk lima tahun mendatang menjadi basis fundamental bagi Pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang presisi dan antisipatif.

Pemanfaatan data proyeksi demografi ini memiliki urgensi yang mencakup berbagai dimensi pembangunan strategis:

1. Perencanaan Infrastruktur dan Wilayah: Data ini menjadi acuan dalam menghitung beban kebutuhan dasar di masa depan, memastikan ketersediaan infrastruktur vital seperti jaringan jalan, pasokan listrik, dan akses air bersih mampu mengimbangi laju pertumbuhan populasi.
2. Optimalisasi Layanan Publik: Estimasi jumlah penduduk usia sekolah dan kelompok rentan memungkinkan pemerintah merencanakan kapasitas fasilitas pendidikan dan layanan kesehatan yang memadai.
3. Ekonomi dan Kesejahteraan: Proyeksi ini krusial untuk memetakan kebutuhan perumahan (*housing backlog*), menyiapkan strategi penciptaan lapangan kerja bagi angkatan kerja baru, serta merancang kebijakan ekonomi yang efektif.
4. Keberlanjutan Lingkungan: Data ini membantu dalam pengelolaan sumber daya alam agar tidak melampaui daya dukung lingkungan, serta memperkuat kesiapsiagaan dalam manajemen bencana berbasis kepadatan wilayah.

Dengan demikian, proyeksi penduduk memastikan bahwa pembangunan di Kabupaten Pasuruan tidak hanya berjalan untuk memenuhi kebutuhan saat ini, tetapi juga berkelanjutan (*sustainable*) bagi generasi mendatang.

1. Proyeksi Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Pasuruan
Berdasarkan hasil pemodelan demografi untuk periode jangka menengah (2025-2030), estimasi jumlah dan kepadatan penduduk di Kabupaten Pasuruan menunjukkan tren pertumbuhan yang positif, meskipun laju pertumbuhannya cenderung melambat. Data ini krusial sebagai landasan alokasi sumber daya daerah agar pembangunan dapat berjalan efektif.

Mengacu pada Tabel tersebut, jumlah penduduk Kabupaten Pasuruan diproyeksikan akan terus mengalami peningkatan dari 1.669,40 ribu jiwa pada tahun 2025 menjadi 1.721,87 ribu jiwa pada tahun 2030. Kenaikan populasi ini secara langsung berdampak pada tingkat kepadatan penduduk yang diprediksi akan meningkat dari 1.132,55 jiwa/km² di tahun 2025 hingga mencapai angka di kisaran 1.161 jiwa/km² menjelang tahun 2030. Peningkatan densitas ini menuntut perhatian khusus pada penataan ruang dan penyediaan fasilitas publik.

Menariknya, struktur komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin menunjukkan pergeseran tren. Jika pada tahun 2025 rasio jenis kelamin diperkirakan masih seimbang di angka 100,00 (jumlah laki-laki dan perempuan setara), maka pada tahun-tahun berikutnya jumlah perempuan diproyeksikan akan mulai melampaui jumlah laki-laki. Hal ini terlihat dari penurunan angka rasio jenis kelamin (sex ratio) secara bertahap menjadi 99,54 pada tahun 2030.

Selain itu, terdapat indikasi perlambatan laju pertumbuhan penduduk yang cukup signifikan. Laju pertumbuhan yang berada di angka 0,73% pada tahun 2025 diproyeksikan akan melandai menjadi 0,47% pada tahun 2030. Penurunan laju pertumbuhan ini dapat menjadi indikator keberhasilan program pengendalian penduduk atau perubahan pola fertilitas masyarakat.

Rincian lengkap data proyeksi jumlah, komposisi gender, dan kepadatan penduduk lima tahun ke depan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.10 Proyeksi Jumlah dan Kepadatan Penduduk di Kabupaten Pasuruan Tahun 2025-2030

Uraian	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Jumlah Penduduk (Ribuan Jiwa)	1669,4	1681,02	1692,08	1702,57	1712,51	1721,87
Laki-Laki (Ribuan Jiwa)	834,72	840,21	845,38	850,23	854,76	858,96
Perempuan (Ribuan Jiwa)	834,68	840,82	846,7	852,34	857,74	862,91
Laju Pertumbuhan (%)	0,73	0,7	0,66	0,62	0,58	0,47

Uraian	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Rasio Jenis Kelamin (%)	100	99,93	99,84	99,75	99,65	99,54
Kepadatan (Jiwa/Km2)	1132,55	1140,43	1147,94	1155,05	1161,8	1153,05

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, 2024, diolah

2. Proyeksi Penduduk Menurut Kelompok Umur

Pemetaan proyeksi penduduk berdasarkan kelompok umur memegang peranan vital dalam perencanaan pembangunan sektoral. Data ini memungkinkan pemerintah daerah untuk mengantisipasi kebutuhan spesifik di masa depan, mulai dari penyediaan sarana pendidikan dasar, kesiapan lapangan kerja, hingga layanan kesehatan geriatri. Berdasarkan proyeksi tahun 2025-2030, struktur umur penduduk Kabupaten Pasuruan menunjukkan adanya transisi demografi yang signifikan.

Mengacu pada Tabel tersebut, terlihat tren penurunan yang konsisten pada kelompok penduduk usia dini dan sekolah. Kelompok umur 0-4 tahun diproyeksikan menurun dari 116,68 ribu jiwa pada tahun 2025 menjadi 111,48 ribu jiwa pada tahun 2030. Penurunan serupa juga terjadi pada kelompok umur 5-14 tahun. Hal ini mengindikasikan keberhasilan program pengendalian kelahiran serta perubahan pola fertilitas di masyarakat, yang di satu sisi akan meringankan beban ketergantungan usia muda (young dependency ratio).

Sebaliknya, terjadi lonjakan yang sangat signifikan pada kelompok penduduk lanjut usia. Kelompok umur 60-64 tahun diprediksi meningkat tajam dari 83,06 ribu jiwa (2025) menjadi 96,33 ribu jiwa (2030). Kenaikan yang lebih dramatis terlihat pada kelompok lansia tua (75+ tahun), yang melonjak dari 36,72 ribu jiwa menjadi 52,88 ribu jiwa pada akhir periode proyeksi.

Fenomena ini menandakan bahwa Kabupaten Pasuruan sedang bergerak menuju struktur penduduk tua (aging population). Pergeseran ini menuntut adanya reorientasi kebijakan, di mana fokus pembangunan ke depan tidak hanya pada penciptaan lapangan kerja bagi usia produktif, tetapi juga perluasan akses perlindungan sosial dan layanan kesehatan jangka panjang yang ramah lansia.

Rincian lengkap proyeksi penduduk per kelompok umur dapat dicermati pada tabel berikut:

Tabel 2.11 Proyeksi Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur di Kabupaten Pasuruan Tahun 2025-2030

Kelompok Umur	2025	2026	2027	2028	2029	2030
0-4	116,68	115,51	114,41	113,36	112,38	111,48
5-9	119,32	118,11	116,66	115,32	114,72	116,14
10-14	122,46	122,97	123,41	123,47	122,45	119,01
15-19	119,49	119,84	120,33	120,87	121,41	121,95
20-24	120,88	119,94	119,22	118,74	118,53	118,59
25-29	126,64	125,25	123,77	122,29	120,93	119,79
30-34	130,29	129,64	128,85	127,91	126,82	125,57
35-39	129,71	130,16	130,27	130,09	129,71	129,19
40-44	123,59	124,11	125,14	126,43	127,64	128,5
45-49	123,63	123,93	123,51	122,74	122,13	122,03
50-54	111,75	113,7	115,96	118,23	120,08	121,22
55-59	101,45	103,18	104,5	105,61	106,83	108,34
60-64	83,06	85,88	88,77	91,61	94,16	96,33
65-69	63,4	66,17	68,73	71,14	73,57	76,1
70-74	40,34	43,18	46,14	49,14	52,04	54,75
75+	36,72	39,47	42,44	45,64	49,12	52,88
Jumlah	1669,4	1681,02	1692,08	1702,57	1712,51	1721,87

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, 2024, diolah

3. Proyeksi Penduduk Usia Produktif, Penduduk Usia Lanjut, Angka Ketergantungan, dan Bonus Demografi

Analisis terhadap struktur umur penduduk khususnya perbandingan antara kelompok usia produktif dan non-produktif merupakan landasan vital dalam merancang kebijakan ekonomi makro daerah. Berdasarkan hasil proyeksi tahun 2025-2030, Kabupaten Pasuruan diprediksi akan mengalami dinamika

demografi yang menuntut adaptasi kebijakan yang cepat, terutama terkait pemanfaatan bonus demografi dan kesiapan menghadapi penuaan penduduk.

Secara umum, penduduk Kabupaten Pasuruan diprediksi menunjukkan tren pertumbuhan yang stabil dengan rata-rata pertumbuhan per tahunnya sebesar 0,66%. Namun, pergeseran struktur demografis yang terjadi di dalamnya memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai tantangan dan peluang di masa depan.

Pertama, terkait Penduduk Usia Produktif (15-64 tahun). Kabupaten Pasuruan masih berada dalam fase Bonus Demografi yang optimal. Hal ini terlihat dari proporsi penduduk usia produktif yang sangat dominan, yakni mencapai 70,11% pada tahun 2025. Meskipun diproyeksikan mengalami fluktuasi dan sedikit penurunan menjadi 69,20% pada tahun 2030, angka ini menunjukkan bahwa mayoritas penduduk masih berada pada usia kerja yang potensial untuk menggerakkan roda perekonomian daerah.

Kedua, terjadi tren penurunan pada Penduduk Usia Muda (0-14 tahun). Persentase kelompok ini diproyeksikan menyusut secara bertahap dari 21,47% pada tahun 2025 menjadi 20,13% pada tahun 2030. Penurunan ini mengindikasikan bahwa beban tanggungan dari kelompok usia muda semakin berkurang seiring dengan keberhasilan pengendalian kelahiran.

Ketiga, tantangan utama muncul dari lonjakan Penduduk Usia Lanjut (65 tahun ke atas). Data menunjukkan percepatan pertumbuhan populasi lansia yang signifikan, bergerak dari 8,41% pada tahun 2025 hingga menembus angka dua digit menjadi 10,67% pada tahun 2030. Kenaikan proporsi ini menandakan bahwa Kabupaten Pasuruan mulai bertransisi menuju struktur penduduk tua (aging population), yang membawa konsekuensi pada perlunya peningkatan layanan kesehatan geriatri dan sistem jaminan sosial yang lebih inklusif.

Implikasi dari kombinasi tren di atas bermuara pada Angka Ketergantungan (Dependency Ratio). Meskipun jumlah penduduk usia muda menurun, pesatnya pertumbuhan lansia menyebabkan beban ketergantungan penduduk secara total justru mengalami peningkatan. Angka ketergantungan diproyeksikan naik dari 42,62 pada tahun 2025 menjadi 44,51 pada tahun 2030. Secara statistik, angka 44,51 ini bermakna bahwa setiap 100 orang penduduk

usia produktif di Kabupaten Pasuruan menanggung beban ekonomi sekitar 45 orang penduduk non-produktif (anak-anak dan lansia). Tren peningkatan beban ini menjadi sinyal bagi pemerintah daerah untuk segera mengoptimalkan produktivitas tenaga kerja sebelum beban demografi menjadi semakin berat di masa depan.

2.6. Kondisi Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat

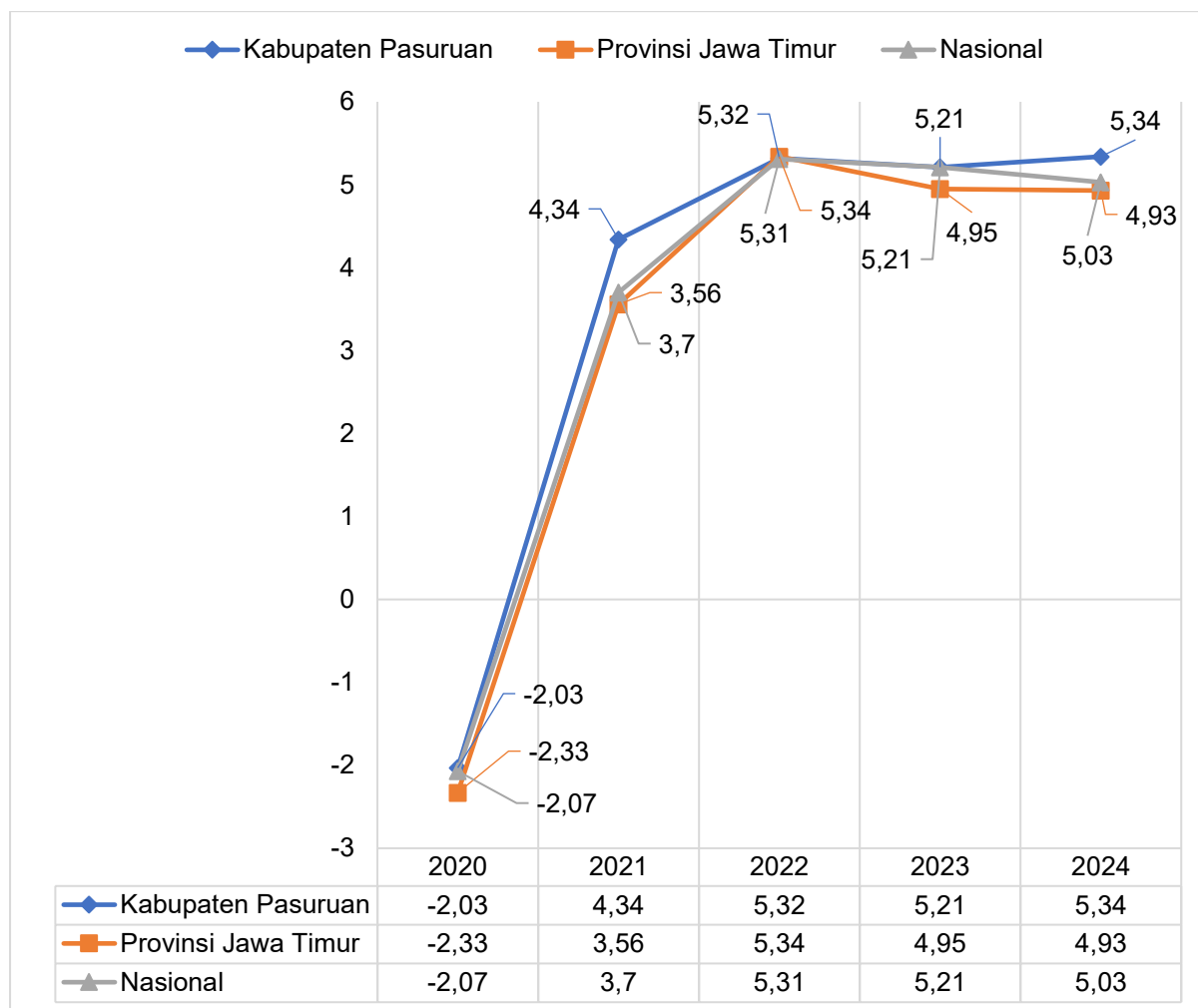
A. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Proyeksi demografi Kabupaten Pasuruan periode 2025-2030 menunjukkan laju pertumbuhan penduduk yang stabil di angka rata-rata 0,66% per tahun, yang diiringi dengan perubahan fundamental pada struktur kelompok umur. Secara ekonomi, daerah ini masih menikmati masa Bonus Demografi dengan ketersediaan suplai tenaga kerja yang melimpah. Kelompok penduduk usia produktif (15-64 tahun) mendominasi populasi dengan proporsi sebesar 70,11% pada tahun 2025, dan diproyeksikan hanya mengalami koreksi alami menjadi 69,20% pada tahun 2030. Cadangan sumber daya manusia yang masif ini merupakan aset vital yang siap digerakkan untuk menopang percepatan roda aktivitas ekonomi dan pembangunan daerah.

Di balik dominasi usia produktif, terjadi dinamika yang kontras pada struktur kelompok non-produktif. Kelompok usia muda (0-14 tahun) diproyeksikan mengalami tren penurunan proporsi dari 21,47% pada tahun 2025 menjadi 20,13% pada tahun 2030, yang mengindikasikan keberhasilan program pengendalian fertilitas. Sebaliknya, fenomena penuaan penduduk (*aging population*) mulai terlihat nyata dengan lonjakan proporsi penduduk lanjut usia (65 tahun ke atas) dari 8,41% menjadi 10,67% pada periode yang sama. Peningkatan yang menembus ambang 10% ini menjadi sinyal peringatan penting bagi pemerintah daerah untuk segera memperkuat infrastruktur layanan kesehatan geriatri serta sistem perlindungan sosial lansia yang komprehensif.

Akumulasi dari pergeseran struktur umur tersebut secara langsung bermuara pada peningkatan Angka Ketergantungan (*Dependency Ratio*). Meskipun beban tanggungan kelompok anak-anak secara statistik berkurang, pesatnya pertumbuhan jumlah lansia memicu kenaikan rasio ketergantungan dari 42,62 pada tahun 2025

menjadi 44,51 pada tahun 2030. Secara riil, angka ini bermakna bahwa setiap 100 penduduk usia produktif harus menanggung beban ekonomi bagi sekitar 45 penduduk non-produktif. Tren peningkatan ini menuntut upaya strategis yang mendesak untuk memaksimalkan produktivitas angkatan kerja saat ini sebelum beban demografi menjadi semakin kompleks di masa depan.



Gambar 2.8 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, dan Nasional Tahun 2020-2024

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

B. Indeks/Rasio Gini

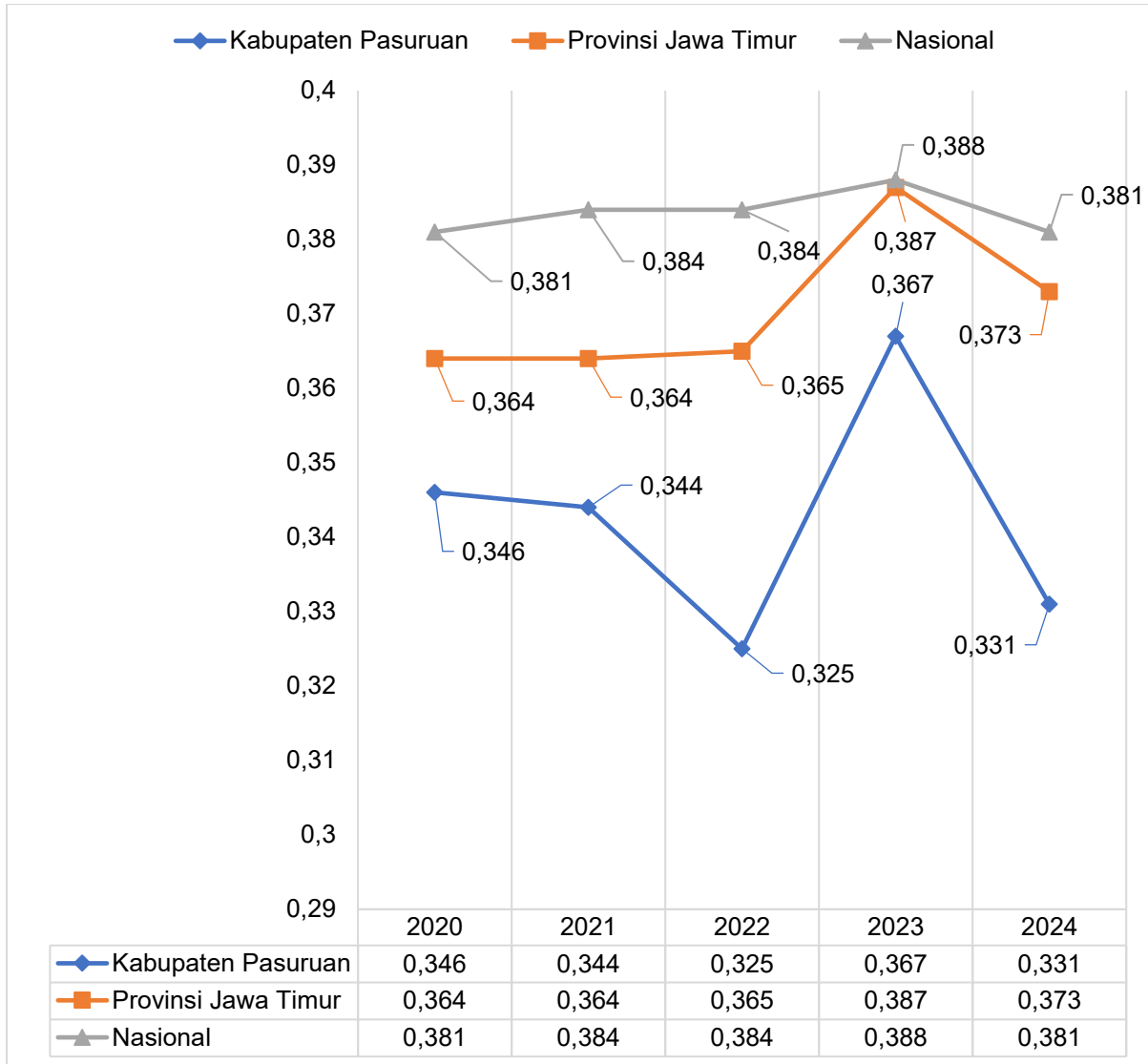
Indeks Gini atau Rasio Gini merupakan indikator makro ekonomi utama yang digunakan untuk mengukur derajat ketimpangan pengeluaran atau kesenjangan pendapatan antar penduduk di suatu wilayah. Nilai Indeks Gini bergerak dalam

rentang 0 hingga 1. Apabila koefisien bernilai 0, hal itu menandakan pemerataan sempurna, sedangkan nilai 1 menandakan ketimpangan sempurna. Secara umum, semakin rendah nilai Indeks Gini, semakin merata distribusi pendapatan di wilayah tersebut. Berdasarkan standar internasional, angka Indeks Gini yang berkisar antara 0,3 hingga 0,5 dikategorikan sebagai tingkat ketimpangan moderat (sedang).

Berdasarkan analisis data periode 2020-2024, dinamika ketimpangan pendapatan di Kabupaten Pasuruan menunjukkan pola yang fluktuatif namun tetap terkendali dalam kategori moderat. Pada paruh pertama periode pengamatan, terjadi perbaikan pemerataan yang signifikan di mana Indeks Gini menyentuh titik terendah (paling merata) pada tahun 2022 dengan angka 0,325. Meskipun sempat mengalami lonjakan ketimpangan pada tahun 2023 menjadi 0,367, kondisi ini berhasil dipulihkan kembali pada tahun 2024 dengan penurunan angka menjadi 0,331. Penurunan kembali angka Gini Ratio pada akhir periode ini mengindikasikan perbaikan distribusi pendapatan yang positif, di mana kue pembangunan dinikmati secara lebih merata oleh masyarakat.

Dalam konteks komparasi kewilayahan, capaian pemerataan ekonomi Kabupaten Pasuruan menunjukkan performa yang lebih unggul dibandingkan rata-rata regional maupun nasional. Data menunjukkan konsistensi di mana angka Indeks Gini Kabupaten Pasuruan selalu lebih rendah (lebih merata) dibandingkan Provinsi Jawa Timur dan Nasional di setiap tahun pengamatan. Sebagai ilustrasi nyata pada tahun 2024, saat ketimpangan Nasional berada di angka 0,381 dan Jawa Timur di angka 0,373, Kabupaten Pasuruan mampu menekan ketimpangan jauh lebih rendah di angka 0,331. Hal ini menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pasuruan memiliki kualitas yang baik karena bersifat inklusif (merata) dan kesenjangan antara penduduk kaya dan miskin relatif lebih kecil dibandingkan daerah lain.

Data lengkap mengenai perbandingan Indeks Gini tersebut dapat dilihat pada bagan di bawah ini:



Gambar 2.9 Indeks Gini Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur dan Nasional
Tahun 2020-2024

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

C. Angka Kemiskinan

Dalam kerangka *Sustainable Development Goals* (SDGs), pengentasan kemiskinan (*No Poverty*) menempati Tujuan Pertama sebagai agenda prioritas global. Kemiskinan didefinisikan sebagai kondisi ketidakmampuan penduduk dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar, baik makanan maupun bukan makanan, yang diukur melalui pendekatan pengeluaran. Penduduk dikategorikan miskin apabila memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan (GK). Garis Kemiskinan sendiri merupakan nilai rupiah minimum yang diperlukan seseorang untuk

hidup layak, yang terdiri dari komponen makanan (setara 2.100 kilokalori) dan komponen non-makanan (perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan).

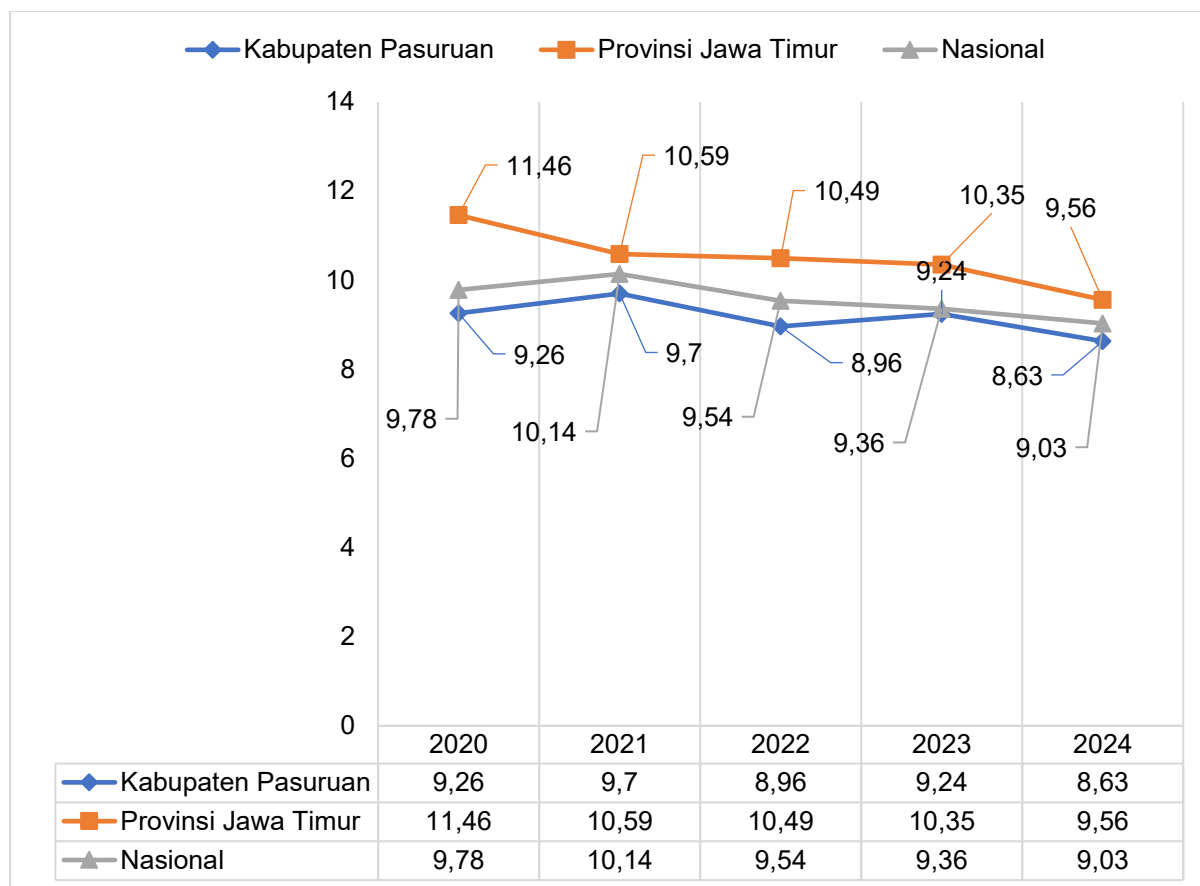
Berdasarkan analisis data periode 2020-2024, kinerja penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Pasuruan menunjukkan capaian yang positif dan kompetitif. Secara umum, Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Pasuruan selalu berada di bawah (lebih baik) dibandingkan rata-rata Provinsi Jawa Timur maupun Nasional. Pada tahun 2024, tingkat kemiskinan Kabupaten Pasuruan tercatat sebesar 8,63%, angka ini jauh lebih rendah dibandingkan Jawa Timur (9,56%) dan Nasional (9,03%). Hal ini mengindikasikan bahwa program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi di daerah berjalan cukup efektif dalam menjaga daya beli masyarakat rentan.

Selain melihat persentase (Head Count Index), kualitas kemiskinan juga diukur melalui Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2).

- Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) turun dari 1,22 (2023) menjadi 1,09 (2024). Penurunan ini menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin mendekati Garis Kemiskinan, yang berarti beban pengeluaran mereka untuk keluar dari kemiskinan semakin ringan.
- Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) juga mengalami perbaikan, turun dari 0,26 (2023) menjadi 0,21 (2024). Penurunan ini mengindikasikan bahwa ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin itu sendiri semakin mengecil (distribusi pengeluaran di kalangan warga miskin semakin merata).

Namun, tantangan terlihat pada kenaikan Garis Kemiskinan (GK) yang terus meningkat setiap tahunnya. GK naik dari Rp429.624 (2023) menjadi Rp450.088 per kapita/bulan (2024). Kenaikan standar biaya hidup ini menuntut adanya peningkatan pendapatan masyarakat yang lebih progresif agar penduduk yang berada di sekitar garis kemiskinan (*near poor*) tidak jatuh kembali ke jurang kemiskinan akibat inflasi atau kenaikan harga kebutuhan pokok.

Berikut adalah data rincian indikator kemiskinan di Kabupaten Pasuruan serta tabel perbandingannya dengan tingkat Provinsi dan Nasional:



Gambar 2.10 Tingkat Kemiskinan Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur dan Nasional
Tahun 2020-2024

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Tabel 2.12 Perkembangan Kemiskinan di Kabupaten Pasuruan Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Penduduk Miskin (Ribuan Jiwa)	151,43	159,78	148,62	154,09	144,84
Persentase Penduduk Miskin (%)	9,26	9,7	8,96	9,24	8,63
Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)	355.299	368.686	394.016	429.624	450.088

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	1,15	1,17	1,29	1,22	1,09
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	0,23	0,24	0,29	0,26	0,21

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Berdasarkan data pada kedua tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Pasuruan berhasil memulihkan kondisi kesejahteraan masyarakat pasca-pandemi dengan capaian tahun 2024 yang sangat baik. Keberhasilan menekan angka kemiskinan hingga 8,63% (terendah dalam 5 tahun terakhir) yang dibarengi dengan penurunan indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan, membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah bersifat inklusif. Meskipun demikian, kenaikan standar Garis Kemiskinan harus terus diwaspadai sebagai sinyal perlunya pengendalian inflasi daerah yang efektif.

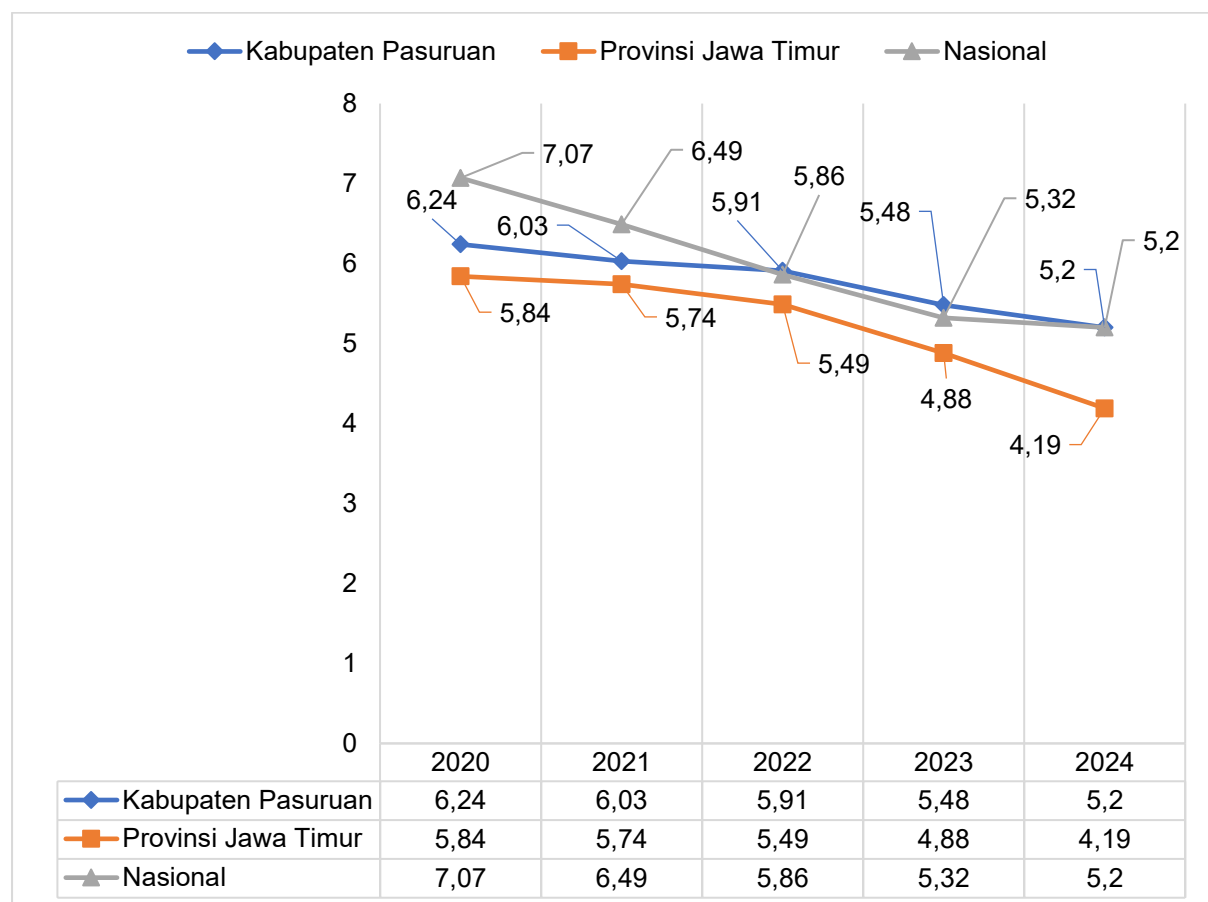
D. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator makro ekonomi yang menggambarkan proporsi jumlah pengangguran terhadap jumlah total angkatan kerja. Tingginya angka TPT biasanya dipicu oleh ketidakseimbangan antara ketersediaan lapangan pekerjaan (permintaan tenaga kerja) dengan jumlah pencari kerja (penawaran tenaga kerja). Oleh karena itu, penurunan TPT menjadi salah satu prioritas utama Pemerintah Kabupaten Pasuruan, bersandingan dengan upaya peningkatan pendapatan masyarakat sebagai strategi komprehensif penanggulangan kemiskinan.

Berdasarkan analisis data periode 2020-2024, kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten Pasuruan menunjukkan tren pemulihan yang konsisten. TPT Kabupaten Pasuruan terus mengalami penurunan setiap tahunnya, bergerak dari angka 6,24% pada tahun 2020 menjadi 5,20% pada tahun 2024. Penurunan bertahap ini mengindikasikan adanya perbaikan penyerapan tenaga kerja di sektor riil dan efektivitas pemulihan ekonomi pasca-pandemi.

Namun, jika dilihat dari perspektif komparasi regional, Kabupaten Pasuruan masih menghadapi tantangan struktural. Data menunjukkan bahwa Tingkat Pengangguran di Kabupaten Pasuruan selalu lebih tinggi dibandingkan rata-rata Provinsi Jawa Timur di sepanjang periode pengamatan. Pada tahun 2024, saat Jawa Timur berhasil menekan pengangguran hingga angka 4,19%, Kabupaten Pasuruan masih berada di angka 5,20% (setara dengan angka Nasional). Kesenjangan ini menjadi sinyal bagi Pemerintah Daerah untuk lebih agresif dalam meningkatkan kualitas pendidikan vokasi dan pelatihan keterampilan (skilling, reskilling, upskilling) agar kompetensi tenaga kerja lokal sesuai dengan kebutuhan industri, sekaligus mendorong penciptaan lapangan kerja baru yang padat karya.

Rincian perkembangan data TPT dan perbandingannya dapat dilihat pada gambar bagan berikut:



Gambar 2.11 Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, dan Nasional Tahun 2020-2024

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Berdasarkan gambar di atas, dapat disimpulkan bahwa pasar kerja di Kabupaten Pasuruan terus membaik yang ditandai dengan penurunan angka pengangguran secara berturut-turut selama lima tahun terakhir. Meskipun demikian, fakta bahwa angka TPT daerah masih berada di atas rata-rata Provinsi Jawa Timur menuntut fokus kebijakan yang lebih tajam pada sisi *supply* (peningkatan *skill* SDM) dan sisi *demand* (investasi padat karya) untuk mengakselerasi penyerapan tenaga kerja di masa mendatang.

E. PDRB Perkapita

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita merupakan indikator ekonomi makro yang digunakan untuk mengukur estimasi pendapatan rata-rata penduduk suatu wilayah dalam periode tertentu. Nilai ini diperoleh dari total nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan (PDRB) dibagi dengan jumlah penduduk. Secara teoritis, semakin tinggi angka PDRB per kapita, semakin tinggi pula tingkat kemakmuran atau standar hidup rata-rata penduduk di wilayah tersebut.

Berdasarkan analisis data periode 2020-2024, kinerja PDRB per kapita Kabupaten Pasuruan menunjukkan tren yang positif dan kompetitif. Secara nominal, nilai PDRB per kapita terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Bahkan, dalam komparasi kewilayahan, capaian Kabupaten Pasuruan selama lima tahun terakhir selalu lebih tinggi dibandingkan rata-rata PDRB per kapita Provinsi Jawa Timur maupun Nasional. Hal ini mengukuhkan posisi Kabupaten Pasuruan sebagai salah satu penyangga ekonomi utama di Jawa Timur.

Namun, tingginya angka PDRB per kapita ini perlu dimaknai dengan cermat. Struktur ekonomi Kabupaten Pasuruan didominasi oleh sektor industri pengolahan (kontribusi mencapai 60%) yang bertipologi padat modal. Kondisi ini menyebabkan perputaran nilai tambah ekonomi cenderung terkonsentrasi pada korporasi besar dan tidak serta-merta mencerminkan pendapatan riil yang diterima oleh setiap rumah tangga. Dengan kata lain, tingginya rata-rata tersebut "ditarik ke atas" oleh output industri besar, sementara masih terdapat kemungkinan kesenjangan pendapatan antar wilayah atau kelompok masyarakat. Oleh karena itu, angka ini lebih tepat dipandang sebagai indikator potensi ekonomi daerah ketimbang indikator tunggal kesejahteraan individu.

Dalam konstelasi regional Jawa Timur tahun 2024, Kabupaten Pasuruan menempati peringkat ke-5 tertinggi. Posisi ini berada di bawah Kota Kediri, Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, dan Kabupaten Gresik, namun tetap berada jauh di atas rata-rata kabupaten/kota lainnya. Fakta ini menegaskan bahwa meskipun terdapat tantangan dalam pemerataan, skala ekonomi Kabupaten Pasuruan sangatlah masif.

Kabupaten Pasuruan masuk dalam jajaran "Top 5" ekonomi raksasa di Jawa Timur. Meskipun angka PDRB per kapita terlihat impresif, tantangan utama bagi pemerintah daerah adalah memastikan terjadinya pemerataan pembangunan. Fokus kebijakan tidak boleh hanya terpaku pada pertumbuhan angka rata-rata, melainkan harus diarahkan pada mekanisme redistribusi yang memungkinkan seluruh lapisan masyarakat menikmati kue pertumbuhan ekonomi tersebut, guna meminimalisir ketimpangan antara wilayah industri dan non-industri.

F. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator strategis untuk mengukur keberhasilan upaya pembangunan kualitas hidup manusia. IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar: umur panjang dan hidup sehat (diukur dari Angka Harapan Hidup), pengetahuan (diukur dari Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah), serta standar hidup layak (diukur dari Pengeluaran Per Kapita yang disesuaikan).

Dalam melihat tren jangka panjang, data IPM Kabupaten Pasuruan dibagi menjadi dua periode berdasarkan metodologi perhitungan, yaitu metode lama (SP2010) untuk tahun 2017-2021 dan metode baru (Long Form SP2020) untuk tahun 2022-2024. Berikut adalah perkembangan IPM periode pertama:

Tabel 2.13 Perkembangan IPM dan Komponen IPM di Kabupaten Pasuruan Tahun 2017-2021 (Metode SP2010)

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
IPM	66,69	67,41	68,29	68,60	70,54
Angka Harapan Hidup (Tahun)	69,90	70,17	70,17	70,23	70,25

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Angka Harapan Sekolah (Tahun)	12,05	12,30	12,31	12,41	12,58
Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	6,82	6,38	7,11	7,40	7,41
Pengeluaran Per Kapita (Ribu Rupiah)	-	-	10.381	10.164	10.297

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan, 2022

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa selama periode 2017-2021, status pembangunan manusia di Kabupaten Pasuruan mengalami peningkatan status dari kategori "Sedang" menjadi "Tinggi" ($IPM \geq 70$) tepat pada tahun 2021 dengan nilai 70,54. Meskipun terjadi pandemi COVID-19 pada tahun 2020 yang menyebabkan penurunan pada sisi ekonomi (Pengeluaran Per Kapita turun dari Rp10,38 juta menjadi Rp10,16 juta), nilai total IPM tetap tumbuh positif. Hal ini disebabkan oleh indikator kesehatan (Angka Harapan Hidup) dan pendidikan (Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah) yang tetap menunjukkan tren kenaikan, membuktikan resiliensi sektor sosial dasar di tengah guncangan ekonomi.

Selanjutnya, mulai tahun 2022 perhitungan IPM menggunakan metode baru berbasis *Long Form* SP2020 yang memberikan potret kependudukan lebih akurat, khususnya pada indikator kematian dan umur harapan hidup.

Tabel 2.14 Perkembangan IPM dan Komponen IPM di Kabupaten Pasuruan Tahun 2022-2024 (Metode Long Form SP2020)

Uraian	2022	2023	2024
IPM	71,29	71,91	72,36
Angka Harapan Hidup (Tahun)	74,15	74,41	74,61
Angka Harapan Sekolah (Tahun)	12,76	12,77	12,78

Uraian	2022	2023	2024
Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	7,42	7,44	7,46
Pengeluaran Per Kapita (Ribu Rupiah)	10.726	11.239	11.617

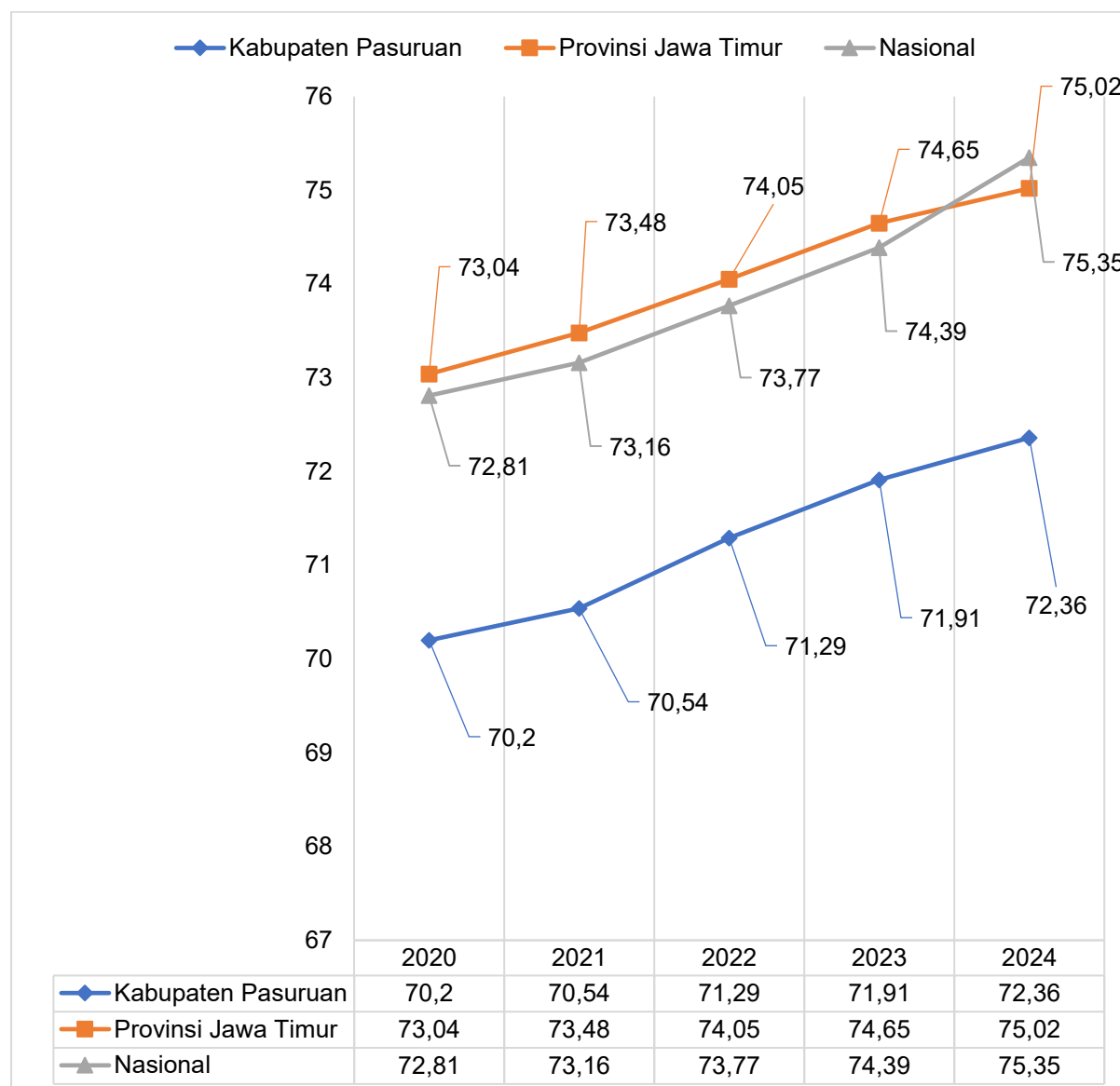
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan, 2025

Data yang dihasilkan melalui penerapan metode terbaru menunjukkan adanya lonjakan kualitas hidup masyarakat yang bersifat signifikan dan terukur. Pada tahun 2024, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Pasuruan tercatat mencapai 72,36, yang menempatkan daerah ini pada kategori pembangunan manusia yang relatif baik dan mencerminkan keberhasilan akumulatif dari kebijakan di sektor kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Angka tersebut tidak sekadar menunjukkan peningkatan numerik, tetapi juga merepresentasikan perbaikan struktural dalam kualitas hidup penduduk secara menyeluruh.

Perubahan metodologi penghitungan memberikan dampak yang sangat nyata, terutama pada komponen Angka Harapan Hidup (AHH). Dengan metode terbaru, AHH Kabupaten Pasuruan pada tahun 2024 tercatat mencapai 74,61 tahun, jauh melampaui hasil perhitungan dengan metode sebelumnya yang hanya berada di kisaran 70 tahun. Selisih ini menunjukkan bahwa kualitas kesehatan masyarakat, akses terhadap layanan medis, serta efektivitas intervensi kesehatan publik selama beberapa tahun terakhir mengalami peningkatan yang substansial. Koreksi metodologis ini sekaligus memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai kondisi riil kesehatan penduduk.

Di sisi ekonomi, indikator Pengeluaran Per Kapita menunjukkan tren pemulihan yang konsisten dan berkelanjutan pasca-pandemi. Pada tahun 2024, nilai pengeluaran per kapita mencapai Rp11,617 juta per tahun, menandakan meningkatnya daya beli masyarakat serta mulai pulihnya aktivitas ekonomi rumah tangga. Kenaikan ini mengindikasikan adanya perbaikan pendapatan, stabilitas konsumsi, dan kepercayaan ekonomi masyarakat. Secara keseluruhan, data dalam tabel tersebut mengonfirmasi bahwa kualitas kesehatan, akses pendidikan, dan kemampuan ekonomi masyarakat Kabupaten Pasuruan berada dalam lintasan pertumbuhan yang solid dan saling memperkuat. Meskipun demikian, capaian positif

ini tetap perlu ditempatkan dalam kerangka komparatif yang lebih luas, sehingga posisi Kabupaten Pasuruan dapat dievaluasi secara objektif melalui perbandingan dengan capaian regional pada wilayah sekitarnya.



Gambar 2.12 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2020-2024

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

BAB III

CAPAIAN KINERJA DAN HASIL PELAKSANAAN

Pelaksanaan program percepatan penurunan *stunting* di Kabupaten Pasuruan pada Semester II Tahun 2025 tidak lagi sekadar dijalankan sebagai rutinitas program kesehatan semata, melainkan telah bertransformasi menjadi sebuah gerakan masif yang terstruktur, sistematis, dan akuntabel. Bab ini disusun untuk menyajikan potret utuh mengenai capaian kinerja pemerintah daerah dalam mengawal masa depan generasi penerus bangsa.



Gambar 3.1 Roda Aksi Konvergensi

Analisis capaian kinerja yang tertuang dalam bab ini didasarkan pada kerangka kerja regulasi terbaru, yakni Petunjuk Teknis (Juknis) Pelaksanaan Aksi Konvergensi Tahun 2025. Sesuai dengan regulasi tersebut, mekanisme pelaksanaan program kini difokuskan melalui 4 (empat) tahap siklus pelaksanaan aksi konvergensi yang berkelanjutan. Kerangka kerja 8 Aksi Konvergensi yang sebelumnya menjadi acuan tunggal, kini diintegrasikan secara holistik ke dalam siklus baru ini untuk memastikan orkestrasi program yang lebih sinergis. Keempat tahapan siklus yang menjadi landasan analisis dalam laporan ini meliputi:

1. Tahap 1: Analisis Situasi (Integrasi Aksi 1 dan Aksi 7)

Tahap ini merupakan fondasi utama yang mengintegrasikan proses analisis situasi dengan pengukuran dan publikasi data *stunting*. Tujuan strategisnya adalah mengidentifikasi peta sebaran kasus, ketersediaan layanan, dan

kendala operasional. Dalam konteks Semester II ini, Bappelitbangda selaku koordinator fungsional telah memastikan terbitnya produk hukum berupa Peta Sebaran Keluarga Berisiko Stunting dan Peta Sebaran Sasaran Prioritas, yang menjadi basis data (*baseline*) fundamental bagi seluruh intervensi yang dilaporkan dalam bab ini.

2. Tahap 2: Penguatan Perencanaan (Integrasi Aksi 2, Aksi 3, dan Aksi 4)

Tahap ini menjamin bahwa hasil analisis situasi diterjemahkan secara konkret ke dalam dokumen perencanaan (RKPD/Renja) dan penganggaran (APBD). Melalui mekanisme Rembuk Stunting, Pemerintah Kabupaten Pasuruan telah menggalang komitmen politik dan operasional lintas sektor. Keberhasilan tahap ini dibuktikan dengan adanya penandaan (*tagging*) anggaran spesifik pada DPA Perangkat Daerah serta regulasi tentang peran desa, yang realisasi keuangannya akan dibahas pada bagian akhir bab ini.

3. Tahap 3: Penguatan Pelaksanaan (Integrasi Aksi 6 dan Aksi 5)

Tahap ini adalah inti dari operasional lapangan, yang mengintegrasikan manajemen data dengan pembinaan pelaku di tingkat desa. Fokus utamanya adalah memastikan intervensi sampai ke sasaran rumah tangga secara *by name by address* (BNBA). Penguatan kapasitas Tim Pendamping Keluarga (TPK) dan Kader Pembangunan Manusia (KPM) menjadi kunci dalam tahap ini untuk memverifikasi validitas data sebelum intervensi dilakukan.

4. Tahap 4: Penilaian Hasil Monev (Pelaksanaan Aksi 8)

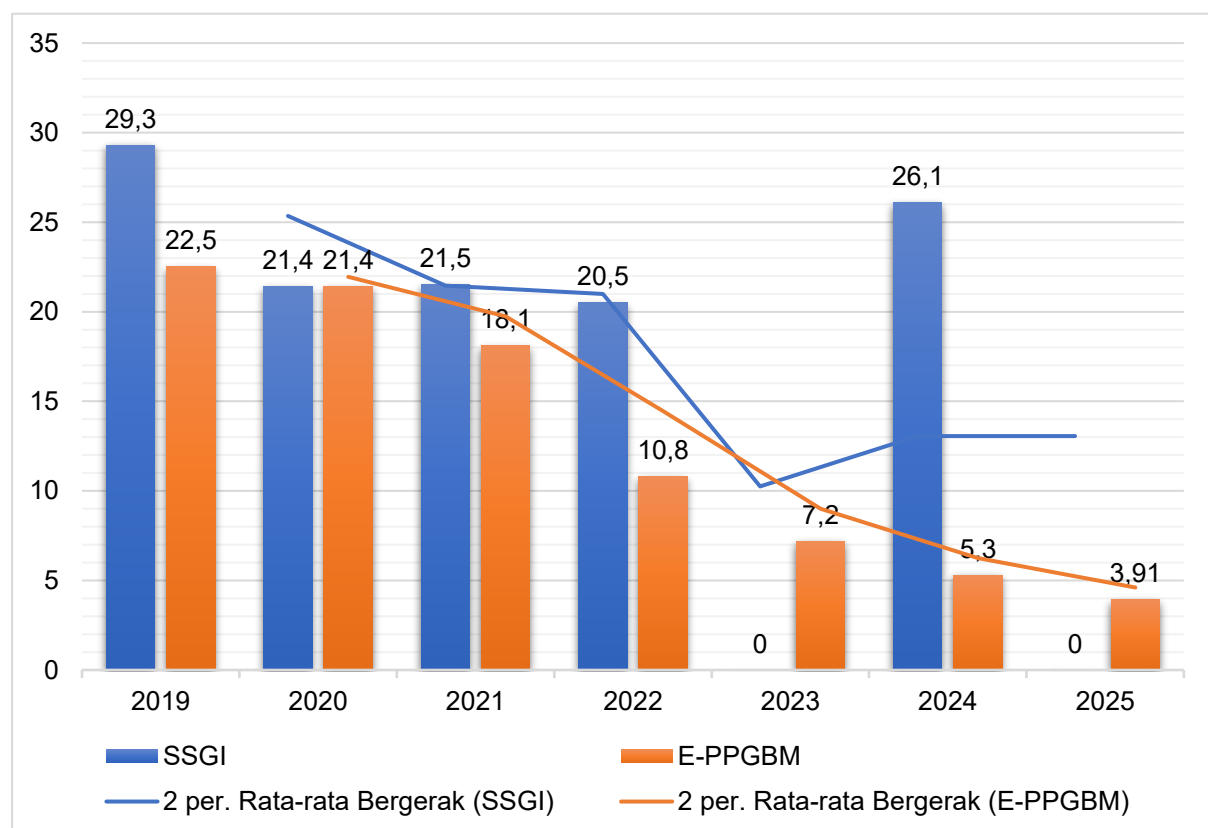
Tahap terakhir adalah evaluasi sistemik yang menjadi cerminan dari laporan ini. Tahap ini bertujuan menilai kemajuan pelaksanaan, mengukur *output* dan *outcome*, serta memberikan umpan balik untuk perbaikan siklus tahun berikutnya.

Untuk memastikan keempat tahapan tersebut berjalan efektif, Pemerintah Kabupaten Pasuruan juga telah menerapkan struktur tata kelola data yang ketat. Di tingkat Kabupaten, Bappelitbangda bertindak sebagai *Approval* (Persetujuan) yang mengoordinasikan seluruh tahapan, sedangkan Perangkat Daerah bertindak sebagai

Verifikator dan Operator. Struktur ini diduplikasi hingga ke tingkat Kecamatan, di mana Camat bertindak sebagai *Approval*, serta Puskesmas dan PLKB sebagai Verifikator. Mekanisme berjenjang ini diterapkan untuk menjamin bahwa data capaian kinerja yang disajikan dalam Bab III ini telah melalui proses validasi bertingkat dan dapat dipertanggungjawabkan akuntabilitasnya.

3.1. Perkembangan Angka Prevalensi Stunting

Indikator dampak utama (*ultimate outcome*) dalam evaluasi kinerja penurunan *stunting* diukur melalui angka prevalensi, yang menggambarkan proporsi balita *stunting* terhadap total populasi balita yang diukur. Pada Semester II Tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Pasuruan melakukan analisis komparatif yang mendalam dan kritis terhadap dua rezim data utama, yakni data survei makro nasional dan data pencatatan rutin masyarakat (*community-based recording*). Analisis ini sangat krusial untuk mendudukkan posisi kinerja daerah secara objektif di tengah tantangan disparitas data yang terjadi.



Catatan: 0 = Tidak Diketahui

Gambar 3.2 Perbandingan SSGI dan E-PPGBM

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan, diolah

A. Analisis Komparatif Data SSGI dan E-PPGBM

Dalam mengevaluasi status gizi masyarakat, Pemerintah Kabupaten Pasuruan dihadapkan pada fenomena divergensi data yang cukup tajam antara hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) dengan data Elektronik-Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (E-PPGBM).

Merujuk pada publikasi data SSGI Tahun 2024, angka prevalensi *stunting* di Kabupaten Pasuruan tercatat sebesar 26,10%. Angka ini menempatkan Kabupaten Pasuruan pada posisi yang cukup menantang karena masih berada di atas ambang batas standar toleransi WHO sebesar 20%. Secara metodologis, data SSGI ini diperoleh melalui metode survei sampling pada blok sensus terpilih. Meskipun metode ini sah secara statistik untuk memotret kondisi makro, namun memiliki keterbatasan *margin of error* dan seringkali tidak mampu menangkap dinamika perubahan cepat yang terjadi di tingkat mikro (desa/kelurahan). Tingginya angka SSGI ini diterima oleh Pemerintah Daerah sebagai *early warning* atau peringatan eksternal untuk melakukan evaluasi ulang terhadap efektivitas program, namun tidak dijadikan satu-satunya patokan kinerja.

Di sisi lain, potret yang jauh berbeda dan lebih optimis ditunjukkan oleh data E-PPGBM. Data ini merupakan basis data operasional utama Pemerintah Kabupaten Pasuruan karena menggunakan metode sensus (*total coverage*) yang dihimpun langsung dari hasil penimbangan dan pengukuran balita di Posyandu secara *real-time*. Berdasarkan data E-PPGBM Bulan Timbang Agustus 2025, angka prevalensi *stunting* di Kabupaten Pasuruan tercatat sebesar 3,91%.

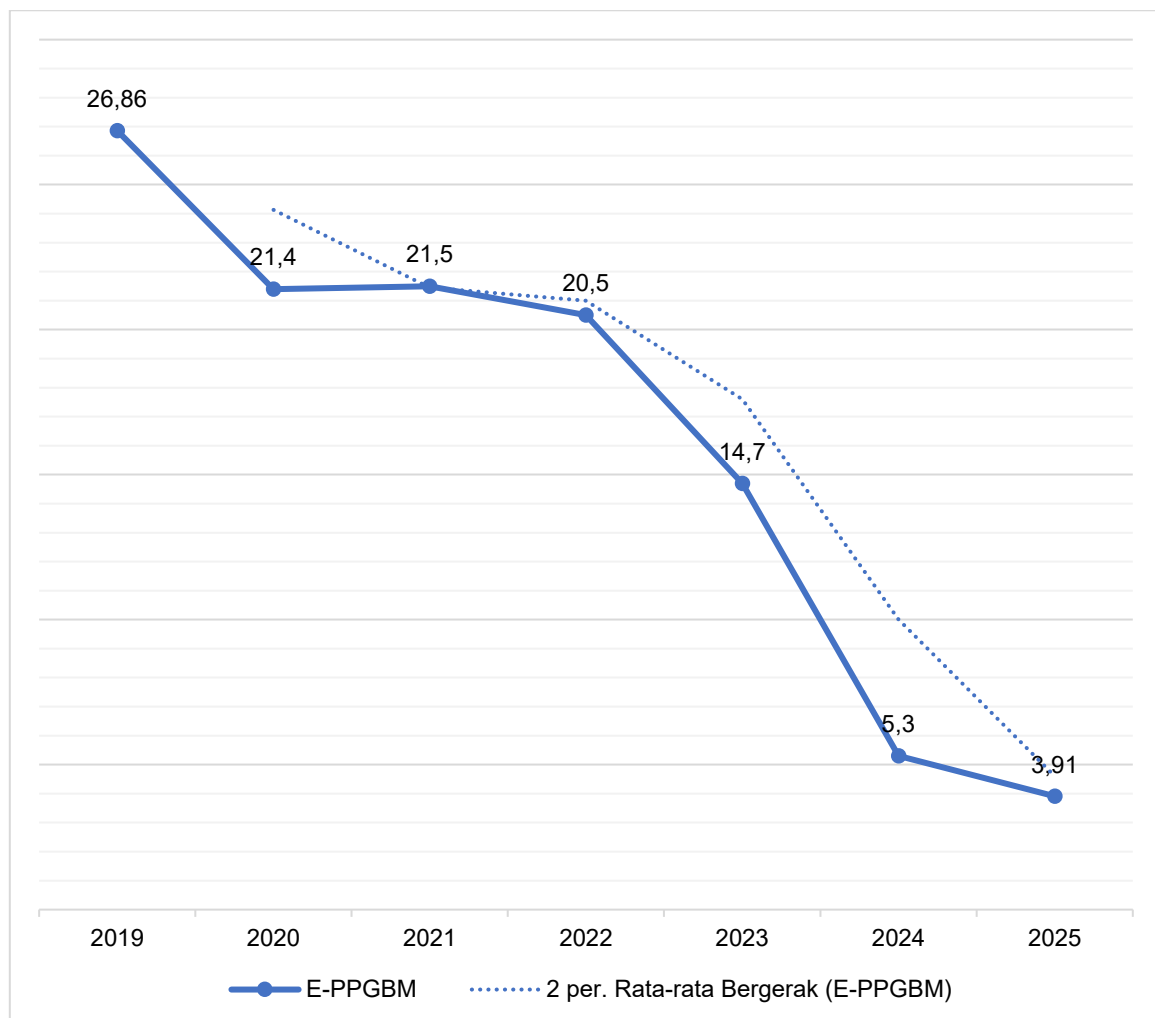
Disparitas angka yang sangat signifikan antara 26,10% (SSGI) dan 3,91% (E-PPGBM) ini dapat dijelaskan melalui pendekatan cakupan data. Data E-PPGBM dinilai lebih valid dan reliabel untuk menggambarkan kondisi faktual di lapangan karena mencakup hampir seluruh populasi balita di Kabupaten Pasuruan, sehingga meminimalisir bias sampling. Bagi TPPS Kabupaten Pasuruan, data 3,91% ini adalah cerminan hasil kerja keras ribuan kader dan tenaga kesehatan yang melakukan intervensi spesifik setiap hari, bukan sekadar anomali statistik. Oleh karena itu, dalam laporan Semester II ini, rujukan utama kinerja yang digunakan adalah data E-PPGBM

yang memungkinkan intervensi dilakukan tepat sasaran pada individu yang membutuhkan (*precision public health*).

B. Tren Penurunan Stunting Berdasarkan Bulan Timbang

Konsistensi kinerja penurunan *stunting* di Kabupaten Pasuruan dapat dibuktikan melalui analisis tren longitudinal data E-PPGBM. Jika ditarik garis data historis sejak tahun 2019 hingga 2025, terlihat adanya pola penurunan yang sangat konsisten, progresif, dan meyakinkan. Hal ini mengonfirmasi bahwa strategi konvergensi yang diterapkan telah berada di jalur yang tepat (*on the right track*).

Berikut adalah rekam jejak penurunan prevalensi stunting berdasarkan E-PPGBM:



Gambar 3.3 Tren Prevalensi Stunting Berdasarkan E-PPGBM Tahun 2019-2025

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan, diolah

Capaian angka prevalensi 3,91% pada Bulan Timbang Agustus 2025 ini memiliki legitimasi data yang sangat kuat. Berdasarkan laporan agregat, dari total populasi sasaran balita riil yang datang dan diukur di Posyandu (*D*) sebanyak 101.252 balita, ditemukan jumlah balita *stunting* secara absolut sebanyak 3.962 balita.

Angka partisipasi pengukuran sebesar 101.252 balita ini merupakan indikator kunci validitas data. Tingginya angka partisipasi masyarakat (*D/S*) ke Posyandu membuktikan bahwa angka 3,91% tersebut bukan dihasilkan dari sampel kecil, melainkan dari pengukuran massal yang merepresentasikan kondisi populasi sesungguhnya. Penurunan drastis hingga ke level satu digit (di bawah 5%) ini mengindikasikan keberhasilan intervensi spesifik di sektor kesehatan, seperti efektivitas pemberian Makanan Tambahan (*PMT*) lokal, keberhasilan promosi *ASI Eksklusif*, serta pemantauan pertumbuhan yang ketat. Data ini menjadi modal sosial dan politik yang kuat bagi Pemerintah Kabupaten Pasuruan untuk meyakinkan seluruh pemangku kepentingan bahwa Kabupaten Pasuruan semakin dekat menuju status *Zero New Stunting*.

3.2. Capaian Indikator Intervensi Spesifik (Sektor Kesehatan)

Intervensi spesifik merupakan pilar utama dalam penanganan *stunting* yang menasar langsung penyebab-penyebab fundamental (kausalitas langsung) terjadinya gagal tumbuh, yakni inagurasi asupan gizi dan pengendalian penyakit infeksi. Merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021, meskipun intervensi spesifik hanya berkontribusi sekitar 30% terhadap penurunan prevalensi, namun peranannya bersifat mutlak dan tidak tergantikan, khususnya dalam menyelamatkan periode kritis 1.000 Hari Pertama Kehidupan (*HPK*).

Pada Semester II Tahun 2025, Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan selaku *leading sector* telah melakukan transformasi pendekatan layanan. Fokus kinerja tidak lagi semata-mata mengejar kuantitas cakupan (*coverage*), melainkan beralih pada peningkatan kualitas layanan (*Quality of Care*) dan ketepatan sasaran (*targeting accuracy*). Seluruh Puskesmas, Pustu, dan Polindes digerakkan secara masif untuk memastikan setiap rantai layanan kesehatan terdistribusi secara merata.

Berikut adalah analisis komprehensif mengenai capaian kinerja indikator intervensi spesifik berdasarkan klaster siklus hidup:

A. Pelayanan Kesehatan Remaja Putri

Remaja putri menempati posisi yang sangat strategis sebagai sasaran hulu (*upstream target*) dalam siklus panjang pencegahan stunting. Intervensi pada fase ini didasarkan pada urgensi medis untuk memutus mata rantai stunting antar-generasi sedini mungkin, bahkan sebelum masa kehamilan terjadi. Secara fisiologis, remaja putri yang menderita anemia (kekurangan sel darah merah/hemoglobin) memiliki risiko sangat tinggi untuk tumbuh menjadi ibu hamil yang anemia. Kondisi ini berbahaya karena berpotensi besar menyebabkan ibu melahirkan bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) dan panjang badan yang tidak optimal, yang merupakan indikator awal stunting. Oleh karena itu, investasi kesehatan pada remaja putri bukan sekadar perbaikan gizi sesaat, melainkan investasi jangka panjang untuk menjamin kualitas generasi masa depan yang bebas stunting.

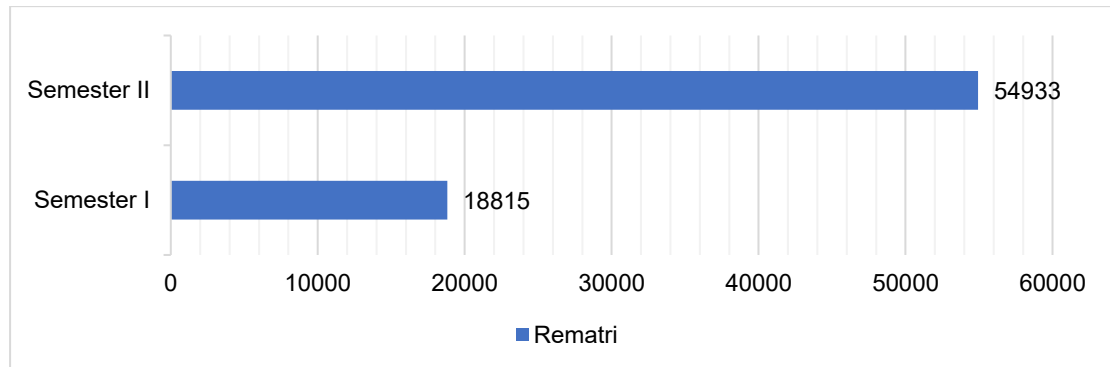
1. Intensifikasi Skrining Anemia di Institusi Pendidikan

Pada Semester II Tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Pasuruan melalui jejaring Puskesmas melakukan akselerasi kegiatan penjangkauan kesehatan (*skrining*) anak sekolah secara masif. Fokus utama kegiatan ini adalah pemeriksaan kadar Hemoglobin (Hb) yang menyoroti siswi kelas 7 (tingkat SMP/ sederajat) dan kelas 10 (tingkat SMA/ sederajat) sebagai titik masuk pemantauan. Kegiatan ini bertujuan untuk memetakan status anemia remaja putri secara presisi dengan metode *by name by address*, sehingga intervensi lanjutan dapat dilakukan tepat sasaran.

Berdasarkan data lapangan, tantangan terbesar dan paling kompleks yang dihadapi adalah menjangkau remaja putri yang berada di lingkungan pendidikan non-formal, khususnya Pondok Pesantren, serta remaja putri yang putus sekolah. Seringkali, akses masuk ke lingkungan pesantren memerlukan pendekatan khusus. Untuk mengatasi hal ini, Dinas Kesehatan telah memperkuat kolaborasi lintas sektor dengan Kementerian Agama Kabupaten Pasuruan untuk membuka akses, serta membentuk pos-pos "Posyandu Remaja" di tingkat desa. Langkah ini diambil untuk menyisir remaja yang tidak terjangkau lewat jalur sekolah formal agar tetap mendapatkan hak pelayanan kesehatan yang setara.

2. Efektivitas dan Kepatuhan Konsumsi Tablet Tambah Darah (TTD)

Indikator kinerja utama pada klaster ini adalah persentase remaja putri yang tidak hanya menerima, tetapi benar-benar mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) secara rutin. Target kepatuhan yang ditetapkan adalah konsumsi minimal 1 tablet per minggu sepanjang tahun (52 tablet per tahun).



Gambar 3.4 Grafik Tren Kepatuhan Konsumsi TTD Rematri Semester I vs Semester II

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan, diolah

Realisasi capaian pada semester ini menunjukkan lonjakan positif yang signifikan berkat implementasi dan replikasi inovasi "Aksi Bergizi" yang dilakukan secara serentak di berbagai sekolah. Perubahan paradigma terjadi di sini; jika pada periode sebelumnya pembagian TTD seringkali hanya sampai pada tahap distribusi (obat diterima siswa tapi disimpan atau dibuang), maka pada Semester II ini telah diterapkan mekanisme pengawasan minum obat bersama (*supervised administration*).

Kegiatan ini dirangkaikan dengan aktivitas fisik berupa senam bersama dan sarapan pagi bersama di sekolah setiap hari Jumat. Sarapan bersama ini krusial untuk mencegah efek samping mual yang sering menjadi alasan siswi menolak minum TTD. Peran guru UKS dan kader kesehatan remaja menjadi sangat vital dalam memantau kartu kontrol minum TTD setiap minggunya. Peningkatan kepatuhan ini berkorelasi langsung dengan peningkatan konsentrasi belajar siswi di kelas dan kebugaran fisik mereka (mengurangi gejala 5L: Lemah, Letih, Lesu, Lunglai, Lalai). Secara medis, menjaga kadar Hb remaja putri konsisten di atas 12 g/dL merupakan benteng pertahanan pertama agar kelak saat mereka memasuki masa pra-konsepsi dan

kehamilan, tubuh mereka telah memiliki cadangan zat besi yang adekuat untuk mendukung pertumbuhan janin yang sehat.

B. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil dan Nifas

Intervensi pada masa kehamilan dan nifas merupakan "medan pertempuran" utama dalam pencegahan *stunting*. Fase ini adalah periode di mana pertumbuhan sel-sel otak dan organ vital janin terjadi sangat pesat. Kegagalan pemenuhan nutrisi pada fase ini bersifat *irreversible* (tidak dapat dipulihkan sempurna). Oleh karena itu, pada Semester II Tahun 2025, standar pelayanan kesehatan bagi ibu hamil dan nifas diperketat dengan protokol pemantauan yang intensif.

1. Transformasi Kualitas Pemeriksaan Kehamilan (Antenatal Care/ANC)

Pemerintah Kabupaten Pasuruan telah mengadopsi standar nasional terbaru dalam pelayanan ANC, yaitu minimal 6 kali pemeriksaan (K6) selama masa kehamilan. Kualitas pemeriksaan ditingkatkan dengan mewajibkan minimal 2 kali pemeriksaan dilakukan langsung oleh Dokter Umum/Dokter Spesialis Kandungan, disertai pemeriksaan USG (*Ultrasonography*) pada Trimester 1 dan Trimester 3.

Pada Semester II ini, ketersediaan alat USG di seluruh Puskesmas Kabupaten Pasuruan telah dioptimalkan pemanfaatannya. Hal ini merupakan lompatan besar dalam deteksi dini risiko *stunting*. Melalui USG, tenaga kesehatan dapat memantau perkembangan janin secara visual, mendeteksi kelainan letak plasenta, serta mengukur taksiran berat janin secara presisi. Kasus-kasus Pertumbuhan Janin Terhambat (*Intrauterine Growth Restriction/IUGR*) yang menjadi cikal bakal bayi lahir pendek, kini dapat dideteksi lebih dini untuk segera dilakukan intervensi gizi atau rujukan ke RSUD. Aplikasi pemantauan ibu hamil berbasis digital juga telah diintegrasikan untuk memantau jadwal kunjungan, sehingga angka *drop-out* pemeriksaan dapat ditekan seminimal mungkin.

2. Penanganan Terfokus Ibu Hamil Kurang Energi Kronis (KEK)

Ibu hamil dengan Lingkar Lengan Atas (LiLA) kurang dari 23,5 cm dikategorikan sebagai Ibu Hamil KEK. Kondisi ini mencerminkan malnutrisi kronis pada ibu yang sangat berbahaya bagi janin. Strategi intervensi yang diterapkan pada semester ini adalah pemberian Makanan Tambahan (PMT) berbahan pangan

lokal yang kaya protein hewani, menggantikan model PMT biskuit pabrikan yang cenderung membosankan. PMT Lokal ini dikelola oleh kader kesehatan desa dengan menu yang variatif dan disesuaikan dengan kearifan lokal. Pendampingan dilakukan selama minimal 90 hari makan (HMA) untuk memastikan asupan kalori dan protein benar-benar masuk. Evaluasi Semester II menunjukkan keberhasilan signifikan, di mana mayoritas Ibu Hamil KEK yang diintervensi mengalami kenaikan berat badan sesuai grafik kehamilan, dan berhasil melahirkan bayi dengan berat badan normal (>2500 gram) serta panjang badan normal (>48 cm).

3. Penguatan Pelayanan Nifas dan Keluarga Berencana (KB) Pasca Persalinan Pasca persalinan, fokus layanan beralih pada pemulihan kesehatan ibu dan manajemen laktasi. Kunjungan nifas (KF) dilakukan lengkap 4 kali untuk memastikan tidak ada komplikasi pasca salin dan ibu mampu memberikan ASI Eksklusif. Selain itu, indikator strategis yang digenjut pada semester ini adalah KB Pasca Persalinan (KBPP).

KB Pasca Persalinan memiliki korelasi kuat dengan penurunan *stunting*. Melalui edukasi intensif sejak masa kehamilan (KIE saat ANC), ibu didorong untuk langsung menggunakan kontrasepsi segera setelah melahirkan. Tujuannya adalah mengatur jarak kehamilan (*birth spacing*). Jarak kehamilan yang terlalu dekat (<2 tahun) terbukti secara ilmiah mengganggu proses menyusui (penyapihan dini) dan memecah fokus pengasuhan ibu, yang berisiko menyebabkan anak sebelumnya menjadi *stunting*. Peningkatan cakupan KBPP, khususnya Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) seperti IUD dan Implan, menjadi bukti keberhasilan sinergi antara Bidan Desa dan Penyuluh KB (PLKB) di lapangan.

C. Pelayanan Kesehatan Balita

Balita adalah kelompok sasaran hilir (*downstream target*) yang menjadi indikator akhir keberhasilan program. Intervensi pada balita dibagi menjadi dua rezim: rezim pencegahan (promotif-preventif) bagi balita sehat, dan rezim tata laksana (kuratif-rehabilitatif) bagi balita bermasalah gizi.

1. Pemantauan Pertumbuhan dan Perkembangan yang Berkualitas

Sebagaimana telah disinggung pada analisis data prevalensi, partisipasi masyarakat (D/S) pada Bulan Timbang Agustus 2025 mencapai angka fenomenal 101.252 balita. Angka ini bukan sekadar statistik, melainkan cerminan dari berjalannya fungsi Posyandu sebagai sentra deteksi dini.

Kualitas pemantauan pertumbuhan pada semester ini semakin valid dengan penggunaan alat Antropometri Kit terstandar (Timbangan Digital, *Infantometer*, *Stadiometer*) di seluruh Posyandu, menggantikan alat dacin tradisional yang rawan bias. Tenaga kesehatan dan kader telah dilatih untuk mendeteksi *Weight Faltering* (T) atau kondisi berat badan tidak naik sesuai grafik KMS. Deteksi dini "T" ini sangat krusial karena merupakan pintu masuk terjadinya *stunting*. Balita yang terdeteksi "T" langsung dirujuk untuk mendapatkan konseling gizi dan investigasi penyebab (apakah karena pola makan atau infeksi tersembunyi).

2. Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) dan Lanjutan Penyakit infeksi berulang adalah "pencuri" zat gizi dalam tubuh balita. Energi yang seharusnya digunakan untuk tumbuh kembang, habis terkuras untuk melawan penyakit. Oleh karena itu, Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) adalah intervensi gizi sensitif yang sangat *cost-effective*.

Meskipun dihadapkan pada tantangan penolakan kelompok masyarakat tertentu dan isu *hoax* vaksin, Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan terus melakukan pendekatan persuasif. Strategi *sweeping* (kunjungan rumah), *Defaulter Tracking* (melacak anak yang putus imunisasi), dan program "Bulan Imunisasi Anak Sekolah" (BIAS) dijalankan secara konsisten. Tercapainya target *Universal Child Immunization* (UCI) di sebagian besar desa menjadi benteng *Herd Immunity* yang melindungi balita dari penyakit PD3I (Penyakit Dapat Dicegah Dengan Imunisasi) seperti Campak, Polio, dan Difteri.

3. Tata Laksana Gizi Buruk, Gizi Kurang, dan Stunting Bagi balita yang telah terlanjur mengalami masalah gizi, intervensi dilakukan dengan protokol medis yang ketat.
 - Balita Gizi Buruk: Dirawat dengan protokol Tata Laksana Gizi Buruk (TLGB) menggunakan F-75, F-100, atau Pangan Olahan untuk Keperluan Medis Khusus (PKMK) di bawah pengawasan Dokter Spesialis Anak.

- Balita Gizi Kurang & Stunting: Mendapatkan intervensi PMT Pemulihan berbahan pangan lokal tinggi protein hewani (telur, ikan, ayam) selama 90 hari. Pada Semester II ini, dilakukan evaluasi dampak pemberian PMT Lokal. Hasilnya menunjukkan tren perbaikan status gizi (kenaikan berat badan dan tinggi badan) yang signifikan. Hal ini membuktikan bahwa edukasi "Isi Piringku" yang menyertai pemberian PMT berhasil mengubah perilaku pemberian makan ibu balita di rumah, sehingga keberlanjutan perbaikan gizi tetap terjaga pasca program selesai.

3.3. Capaian Indikator Intervensi Sensitif (Lintas Sektor)

Keberhasilan percepatan penurunan *stunting* tidak dapat dilepaskan dari peran vital intervensi sensitif yang secara teoritis berkontribusi sebesar 70% dalam mengatasi akar permasalahan gizi. Berbeda dengan intervensi spesifik yang bersifat medis, intervensi sensitif menyoroti determinan sosial, lingkungan, dan ekonomi yang mempengaruhi tumbuh kembang anak secara tidak langsung. Pada Semester II Tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Pasuruan memperkuat orkestrasi lintas sektor ini dengan strategi konvergensi yang lebih solid, memastikan bahwa setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bergerak dalam satu komando untuk menciptakan ekosistem yang kondusif bagi pencegahan *stunting*. Capaian kinerja intervensi sensitif pada semester ini diuraikan dalam narasi analisis sebagai berikut:

A. Pelayanan dan Pendampingan Calon Pengantin (Catin)

Strategi penanganan *stunting* di Kabupaten Pasuruan telah bertransformasi secara fundamental ke arah pencegahan hulu (*upstream preventive strategy*). Pemerintah daerah menempatkan pasangan Calon Pengantin (Catin) dan akseptor Keluarga Berencana (KB) sebagai titik intervensi paling krusial dengan logika dasar bahwa memutus mata rantai *stunting* harus dimulai sebelum kehidupan itu sendiri terbentuk, atau pada fase pra-konsepsi. Dalam konteks persiapan kehidupan berkeluarga, Dinas P3AP2KB bersinergi erat dengan Kementerian Agama Kabupaten Pasuruan untuk menegakkan protokol skrining kesehatan pranikah yang ketat dan tidak dapat ditawar. Instrumen teknologi utama yang dioptimalkan penggunaannya pada semester ini adalah aplikasi Elektronik Siap Nikah dan Hamil (Elsimil). Aplikasi ini tidak lagi sekadar diposisikan sebagai syarat administratif semata untuk mendapatkan sertifikat nikah,

melainkan difungsikan secara vital sebagai alat deteksi dini (*early warning system*). Mekanisme kerjanya melibatkan Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang terdiri dari Bidan, Kader PKK, dan Kader KB untuk memantau input data Catin secara *real-time*. TPK memantau parameter kesehatan vital meliputi status anemia (Hb), ukuran Lingkar Lengan Atas (LiLA) untuk mendeteksi Kekurangan Energi Kronis (KEK), Indeks Massa Tubuh (IMT), serta perilaku merokok. Catin yang terdeteksi memiliki faktor risiko kesehatan diwajibkan mendapatkan pendampingan intensif selama 3 bulan sebelum menikah berupa edukasi gizi dan fasilitasi rujukan, guna memastikan kondisi fisik calon ibu benar-benar prima dan "siap hamil" sebelum memasuki masa konsepsi.

Sejalan dengan upaya penyiapan Catin, penguatan layanan Keluarga Berencana (KB) pasca persalinan juga menjadi prioritas utama pada semester ini sebagai strategi pengendalian jarak kelahiran. Pemerintah daerah menyadari sepenuhnya bahwa jarak kehamilan yang terlalu dekat (kurang dari 3 tahun) memiliki korelasi positif yang kuat dengan risiko kejadian stunting pada anak berikutnya, serta berpotensi mengganggu proses pemberian ASI Eksklusif dan pola asuh optimal bagi anak sebelumnya. Oleh karena itu, promosi penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) seperti IUD (*Intrauterine Device*) dan Implan digencarkan secara masif di seluruh fasilitas kesehatan, jejaring praktik mandiri bidan, hingga rumah sakit. Pendekatan persuasif melalui Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) dilakukan secara intensif bahkan sejak ibu masih dalam masa kehamilan (trimester III), sehingga keputusan ber-KB dapat diambil segera setelah proses persalinan selesai. Penggunaan MKJP dinilai jauh lebih strategis dibandingkan metode jangka pendek karena meminimalisir risiko lupa (*drop-out*). Sinergitas antara kesiapan fisik Catin dan pengaturan jarak kelahiran melalui KB ini diharapkan mampu memutus mata rantai lahirnya bayi stunting baru di Kabupaten Pasuruan secara sistemik.

B. Dukungan Sanitasi dan Lingkungan Hidup

Faktor lingkungan memegang peranan yang sangat determinan dalam status gizi balita, mengingat studi kesehatan masyarakat menegaskan hubungan kausalitas yang erat antara sanitasi yang buruk dengan kejadian penyakit infeksi berulang seperti diare dan cacingan. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan terus berupaya keras memutus jalur

transmisi penyakit melalui perbaikan sanitasi dasar dengan fokus utama pada percepatan status Desa *Open Defecation Free* (ODF) atau Desa Bebas Buang Air Besar Sembarangan. Upaya ini dilakukan secara holistik, tidak hanya mengandalkan pendekatan infrastruktur fisik seperti pembangunan jamban sehat dan IPAL Komunal, tetapi lebih menekankan pada pendekatan perubahan perilaku masyarakat melalui metode Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). Tantangan kultural di beberapa kantong wilayah yang masih mempraktikkan buang air di sungai direspon dengan pemucuan intensif yang melibatkan tokoh agama dan tokoh masyarakat setempat untuk membangun kesadaran kolektif. Hal ini sangat krusial secara medis karena paparan kotoran manusia di lingkungan tempat tinggal dapat memicu kondisi *Environmental Enteropathy* (EED), yakni peradangan kronis pada usus halus balita yang menyebabkan dinding usus rusak sehingga menghambat penyerapan nutrisi makanan. Akibatnya, meskipun anak diberi asupan makan bergizi, ia tetap berisiko stunting karena nutrisinya tidak terserap tubuh secara optimal.

Melengkapi perbaikan sanitasi, jaminan ketersediaan akses air minum yang aman dan layak juga terus diperluas jangkauannya sebagai syarat mutlak kehidupan sehat. Pemerintah daerah menyadari bahwa air merupakan kebutuhan dasar vital, khususnya dalam penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) seperti mencuci tangan pakai sabun dan mengolah Makanan Pendamping ASI (MPASI). Pada Semester II Tahun 2025, kegiatan pengawasan kualitas air minum (*water quality surveillance*) diperketat di desa-desa yang menjadi lokus stunting. Petugas Sanitarian Puskesmas melakukan pengambilan sampel air atau uji petik secara berkala di sumber-sumber air masyarakat untuk memastikan air bebas dari kontaminasi bakteri *E. coli* maupun zat kimia berbahaya. Jika ditemukan pencemaran, intervensi berupa klorinasi atau perbaikan konstruksi sumber air segera dilakukan. Integrasi antara penyediaan sarana sanitasi yang layak (bebas tinja) dan akses air bersih yang aman ini menjadi fondasi pertahanan kesehatan lingkungan yang mutlak diperlukan untuk mendukung optimalisasi pertumbuhan fisik balita di Kabupaten Pasuruan.

C. Penguatan Pola Asuh dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Selain aspek kesehatan fisik dan lingkungan, dimensi pengasuhan (*parenting*) dan stimulasi psikososial juga mendapatkan perhatian serius dalam kerangka intervensi sensitif, karena stunting bukan hanya masalah tubuh pendek melainkan juga

hambatan perkembangan otak. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengambil peran strategis melalui pengembangan layanan Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD HI). Konsep PAUD HI ini diimplementasikan untuk memastikan bahwa lembaga pendidikan usia dini tidak hanya berfungsi sebagai tempat belajar kognitif, melainkan bertransformasi menjadi pos pelayanan terpadu yang memantau kesehatan, gizi, dan perlindungan anak. Di satuan PAUD HI, pengukuran pertumbuhan berat dan tinggi badan anak didik dilakukan secara rutin setiap bulan bekerjasama dengan tenaga kesehatan dari Puskesmas, dan datanya disinkronkan dengan sistem E-PPGBM sehingga deteksi keterlambatan tumbuh kembang dapat dilakukan sedini mungkin. Kurikulum pembelajaran juga diselaraskan dengan muatan edukasi gizi, misalnya melalui kegiatan makan bersama dengan menu gizi seimbang, untuk membiasakan anak-anak mengenal dan menyukai makanan sehat sejak dini.

Sinergi intervensi di sekolah kemudian diperkuat dengan peningkatan kapasitas orang tua di rumah melalui kelompok Bina Keluarga Balita (BKB). Forum ini menjadi wadah edukasi vital bagi orang tua untuk memahami pola asuh yang benar, urgensi periode emas 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), serta cara menstimulasi perkembangan otak anak menggunakan Kartu Kembang Anak (KKA). Pada semester ini, materi edukasi diperkaya secara signifikan dengan penekanan pada praktik Pemberian Makan Bayi dan Anak (PMBA) yang tepat, baik dari segi tekstur, frekuensi, maupun porsi. Selain itu, terdapat inovasi program pelibatan peran ayah dalam pengasuhan atau "Kelas Ayah", yang didasarkan pada pemahaman bahwa pengasuhan anak dan pemantauan tumbuh kembang bukan beban ibu semata. Keterlibatan ayah dalam memberikan dukungan emosional dan bantuan fisik terbukti menurunkan tingkat stres ibu yang berdampak positif pada kualitas pengasuhan. Dengan demikian, kolaborasi antara PAUD HI dan BKB menciptakan ekosistem pengasuhan yang konsisten dan suportif, baik di sekolah maupun di rumah, demi terwujudnya generasi emas Kabupaten Pasuruan yang sehat, cerdas, dan berkualitas.

3.4. Kinerja Tim Pendamping keluarga (TPK)

Perubahan paradigma penanganan *stunting* dari sekadar pendekatan programatis menjadi gerakan masyarakat menempatkan sumber daya manusia (SDM) di lini lapangan sebagai variabel penentu keberhasilan utama. Dalam arsitektur strategi

nasional percepatan penurunan *stunting*, Tim Pendamping Keluarga (TPK) didesain sebagai garda terdepan (*frontliner*) yang bertugas melakukan penyuluhan, fasilitasi pelayanan rujukan, dan fasilitasi penerimaan bantuan sosial kepada sasaran prioritas. Pada Semester II Tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Pasuruan telah melakukan penguatan kelembagaan dan operasional TPK secara masif untuk memastikan bahwa setiap keluarga berisiko *stunting* mendapatkan pendampingan yang komprehensif, tepat sasaran, dan berkelanjutan. Kinerja TPK pada periode ini dapat dianalisis melalui dimensi-dimensi strategis berikut:

A. Konsolidasi Kekuatan Personil dan Sinergitas Peran

Kekuatan utama TPK terletak pada struktur komposisinya yang unik dan saling melengkapi, terdiri dari Bidan Desa sebagai tenaga kesehatan profesional, Kader PKK sebagai penggerak sosial masyarakat, dan Kader KB sebagai pengelola data basis keluarga. Sinergitas ketiga unsur ini menciptakan kolaborasi mikro yang efektif di tingkat desa/kelurahan. Pada Semester II Tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Pasuruan berhasil memobilisasi ribuan personil TPK yang tersebar di seluruh desa dan kelurahan.

Dinamika kinerja di lapangan menunjukkan adanya peningkatan kohesivitas tim yang signifikan dibandingkan semester sebelumnya. Jika pada tahap awal pembentukan sering terjadi tumpang tindih peran, maka pada semester ini pembagian tugas telah berjalan lebih cair dan terorganisir. Bidan Desa berperan sebagai penanggung jawab medis yang memastikan intervensi kesehatan berjalan sesuai standar, Kader PKK berperan melakukan pendekatan persuasif kultural untuk mengubah perilaku pengasuhan ibu sasaran, sedangkan Kader KB memastikan validitas data sasaran yang didampingi terinput dalam sistem pelaporan. Konsolidasi ini menjadi modal sosial yang sangat berharga bagi Kabupaten Pasuruan, mengingat tantangan geografis dan sosiologis masyarakat yang beragam membutuhkan pendekatan personal *door-to-door* yang hanya bisa dilakukan oleh kader setempat yang memahami karakteristik wilayahnya.

B. Efektivitas Pendampingan Berbasis Aplikasi Elsimil

Transformasi digital menjadi ciri khas kinerja TPK pada tahun 2025. Aplikasi Elektronik Siap Nikah dan Hamil (Elsimil) telah menjadi instrumen kerja harian yang wajib

digunakan untuk memantau kondisi sasaran secara *real-time*. Pada semester ini, fokus kinerja TPK tidak hanya sekadar pada kuantitas kunjungan, melainkan pada kualitas pendampingan yang tercatat dalam sistem digital. TPK melakukan pendampingan intensif kepada empat kelompok sasaran utama, yakni Calon Pengantin, Ibu Hamil, Ibu Pasca Persalinan, dan Balita (0-59 bulan).

Analisis terhadap data Elsimil menunjukkan bahwa responsivitas TPK dalam menindaklanjuti notifikasi "Berisiko" semakin cepat. Ketika sistem mendeteksi adanya Ibu Hamil dengan risiko tinggi (misalnya KEK atau Anemia) atau balita dengan pertumbuhan tidak optimal, TPK segera melakukan kunjungan rumah untuk memberikan edukasi gizi dan memastikan sasaran tersebut mengakses layanan kesehatan di Puskesmas. Kinerja pendampingan ini juga mencakup fungsi advokasi, di mana TPK aktif memfasilitasi keluarga sasaran yang belum memiliki jaminan kesehatan (BPJS/KIS) atau dokumen kependudukan (Admuduk) untuk segera mendapatkannya, sehingga hambatan administratif dalam mengakses layanan publik dapat teratasi.

C. Peningkatan Kapasitas dan Manajemen Insentif Kinerja

Menyadari beban kerja TPK yang cukup berat dan kompleks, Pemerintah Kabupaten Pasuruan melalui DP3AP2KB memberikan perhatian serius pada aspek peningkatan kapasitas (*capacity building*). Sepanjang Semester II Tahun 2025, serangkaian pelatihan dan orientasi teknis telah dilaksanakan untuk membekali TPK dengan kemampuan komunikasi antarpribadi (*interpersonal communication*) dan pemahaman teknis gizi terkini. Materi pelatihan difokuskan pada keterampilan konseling menyusui, pemantauan pertumbuhan, serta penggunaan fitur-fitur pemutakhiran data pada aplikasi Elsimil. Hal ini bertujuan agar kehadiran TPK di rumah sasaran tidak sekadar menggugurkan kewajiban, tetapi benar-benar mampu menjadi konselor yang solutif bagi permasalahan keluarga.

Selain aspek kompetensi, aspek kesejahteraan kader juga menjadi bagian dari evaluasi kinerja. Penyaluran biaya operasional pendampingan (*visum*) bagi TPK pada semester ini telah diupayakan berjalan tepat waktu dan transparan sesuai dengan juknis BOKB (Bantuan Operasional Keluarga Berencana). Mekanisme pembayaran berbasis kinerja (*performance-based incentive*) mulai diterapkan secara bertahap, di

mana insentif dikaitkan langsung dengan pelaporan aktivitas pendampingan di aplikasi. Langkah ini terbukti efektif meningkatkan motivasi dan disiplin kader dalam melakukan pelaporan data. Meskipun demikian, evaluasi lapangan masih menemukan beberapa kendala teknis, seperti keterbatasan sinyal internet di wilayah pegunungan dan spesifikasi gawai milik kader yang belum merata, yang menjadi catatan perbaikan untuk dukungan sarana prasarana di tahun anggaran berikutnya.

3.5. Realisasi Kinerja Keuangan dan Pemanfaatan Insentif Fiskal

Salah satu indikator paling nyata dari keseriusan pemerintah daerah dalam menangani isu prioritas nasional adalah besaran dukungan fiskal yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pada Semester II Tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Pasuruan tidak hanya menunjukkan rencana kerja, tetapi membuktikan komitmen anggaran yang sangat kuat (*strong budget commitment*) sebagai tulang punggung percepatan penurunan stunting. Berdasarkan data rekapitulasi realisasi anggaran Aksi Konvergensi per Triwulan 3 Tahun 2025, total pagu anggaran yang teralokasi untuk program stunting yang mencakup intervensi spesifik di sektor kesehatan maupun intervensi sensitif di sektor non-kesehatan mencapai angka yang sangat signifikan, yakni Rp 182.219.203.998 (Seratus delapan puluh dua miliar dua ratus sembilan belas juta dua ratus tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah). Besarnya alokasi ini merefleksikan bahwa penanganan stunting telah ditempatkan sebagai arus utama pembangunan daerah, di mana setiap rupiah yang dianggarkan dirancang untuk memberikan dampak langsung terhadap perbaikan status gizi balita.

Tabel 3.1 Alokasi Pemanfaatan Dana Insentif Fiskal Stunting

No	Perangkat Daerah (OPD)	Alokasi Anggaran (Rp)	Fokus Pemanfaatan
1	Dinas Kesehatan	Rp 3.209.646.000	PMT Lokal Bumil/Balita & Alkes Posyandu
2	Dinas Lingkungan Hidup	Rp 2.907.590.000	Pengelolaan Persampahan & Sanitasi Kumuh
3	Dinas Sosial	Rp 365.000.000	Jaminan Sosial Keluarga 1000 HPK

4	Dinas P3AP2KB	Rp 340.000.000	KIE KB dan Bangga Kencana
5	Dinas SDA, Cipta Karya & TR	Rp 278.500.000	Penyediaan Air Minum (SPAM)
6	Dinas Peternakan & Keswan	Rp 46.500.000	Kesehatan Masyarakat Veteriner (Pangan ASUH)
-	TOTAL	Rp 7.147.236.000	-

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pasuruan, 2025

Dari total pagu anggaran yang cukup fantastis tersebut, kinerja penyerapan anggaran menunjukkan tren yang positif, progresif, dan akuntabel. Hingga posisi akhir November 2025, tercatat total realisasi anggaran telah mencapai Rp 124.303.649.350 (Seratus dua puluh empat miliar tiga ratus tiga juta enam ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh rupiah). Angka realisasi ini merepresentasikan belanja program yang tersebar secara luas di berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengampu, mulai dari sektor kesehatan, ketahanan pangan, sanitasi lingkungan, hingga jaring pengaman sosial. Tingginya angka realisasi penyerapan ini mengonfirmasi bahwa program-program penurunan stunting di Kabupaten Pasuruan tidak hanya berhenti pada tataran perencanaan administratif di atas kertas, melainkan benar-benar dieksekusi secara riil di lapangan. Belanja barang/jasa dan belanja modal yang dilakukan telah dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat sasaran, yang pada akhirnya berkontribusi pada penurunan prevalensi stunting secara agregat.

Selain mengandalkan kekuatan kemandirian APBD murni, prestasi kinerja penurunan stunting Kabupaten Pasuruan juga mendapatkan pengakuan dan apresiasi konkret dari Pemerintah Pusat. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 330 Tahun 2025, Kabupaten Pasuruan ditetapkan sebagai salah satu daerah penerima Dana Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2025 untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Kategori Penurunan Stunting. Total alokasi dana insentif yang diterima sebesar Rp 7.147.236.000 (Tujuh miliar seratus empat puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah). Penerimaan dana insentif ini merupakan bukti validasi eksternal yang prestisius, yang menegaskan bahwa kinerja Kabupaten Pasuruan dinilai "berprestasi" dan memiliki tata kelola data serta hasil

capaian penurunan prevalensi stunting yang lebih unggul dibandingkan daerah lain di Indonesia.

Pemanfaatan Dana Insentif Fiskal tersebut dikelola dengan prinsip kecepatan dan ketepatan; dana tidak dibiarkan mengendap sebagai SiLPA, melainkan langsung didistribusikan secara strategis kepada Perangkat Daerah kunci untuk mengakselerasi intervensi di sisa tahun anggaran 2025. Berdasarkan usulan rencana penggunaan dana (*spending plan*) yang telah disetujui, alokasi terbesar diarahkan untuk memperkuat dua pilar utama, yaitu sektor kesehatan dan sektor lingkungan hidup. Dinas Kesehatan mendapatkan alokasi sebesar Rp 3.209.646.000 yang dialokasikan untuk Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKP/UKM). Anggaran ini difokuskan secara tajam untuk belanja intervensi spesifik yang bersifat mendesak, seperti pengadaan Makanan Tambahan (PMT) berbahan pangan lokal yang kaya protein hewani untuk Ibu Hamil Kurang Energi Kronis (KEK) dan Balita Gizi Kurang, serta pemenuhan alat kesehatan antropometri standar di Puskesmas dan Posyandu guna menjamin validitas dan akurasi pengukuran status gizi di lapangan.

Sementara itu, Dinas Lingkungan Hidup mendapatkan porsi alokasi terbesar kedua, yakni senilai Rp 2.907.590.000 untuk Program Pengelolaan Persampahan. Strategi pengalokasian ini dinilai sangat tepat sasaran mengingat faktor kebersihan lingkungan dan sanitasi memiliki korelasi kausalitas yang kuat dengan kejadian penyakit infeksi berulang pada balita. Dana ini digunakan secara intensif untuk membenahi manajemen sanitasi dan persampahan di wilayah-wilayah yang menjadi lokus stunting dan terindikasi kumuh, sehingga dapat memutus mata rantai penularan penyakit berbasis lingkungan yang menghambat pertumbuhan anak. Selain kedua sektor tersebut, distribusi dana insentif juga menyentuh aspek perlindungan sosial melalui Dinas Sosial dengan alokasi Rp 365.000.000. Dana ini dialokasikan untuk Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, sebuah langkah afirmasi untuk memastikan keluarga sasaran 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) yang rentan secara ekonomi mendapatkan bantalan sosial yang memadai agar tetap mampu mengakses pangan bergizi.

Dukungan infrastruktur dasar juga diperkuat melalui alokasi kepada Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang sebesar Rp 278.500.000. Anggaran ini

difokuskan pada Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), yang bertujuan menjamin ketersediaan air bersih yang layak konsumsi bagi rumah tangga sasaran, demi mencegah penyakit diare yang sering menjadi pemicu stunting. Di sektor penguatan keluarga, Dinas P3AP2KB mengelola dana insentif sebesar Rp 340.000.000 yang terbagi untuk dua program vital, yaitu Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) sebesar Rp 240 juta dan Program Pembangunan Keluarga Sejahtera (Bangga Kencana) sebesar Rp 100 juta. Dana ini digunakan untuk intensifikasi penyuluhan, konseling, dan pelayanan kontrasepsi di lini lapangan guna mengatur jarak kelahiran yang aman. Terakhir, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan mendapatkan alokasi Rp 46.500.000 untuk Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, yang secara tidak langsung mendukung ketersediaan rantai pasok pangan protein hewani yang Aman, Sehat, Utuh, dan Halal (ASUH) bagi konsumsi masyarakat luas.

Sinergitas yang solid antara realisasi APBD Reguler yang telah mencapai lebih dari Rp 124 Miliar dan suntikan Dana Insentif Fiskal sebesar Rp 7,1 Miliar ini menciptakan ruang fiskal yang sangat memadai dan fleksibel bagi Kabupaten Pasuruan. Kombinasi sumber pendanaan ini menjadi amunisi krusial untuk menuntaskan target penurunan stunting pada akhir tahun 2025. Pola penganggaran yang konvergen dan terintegrasi ini memastikan bahwa prinsip *Money Follows Program* telah berjalan efektif, di mana setiap rupiah anggaran negara benar-benar hadir melayani kebutuhan gizi, kesehatan, dan masa depan generasi penerus Kabupaten Pasuruan.

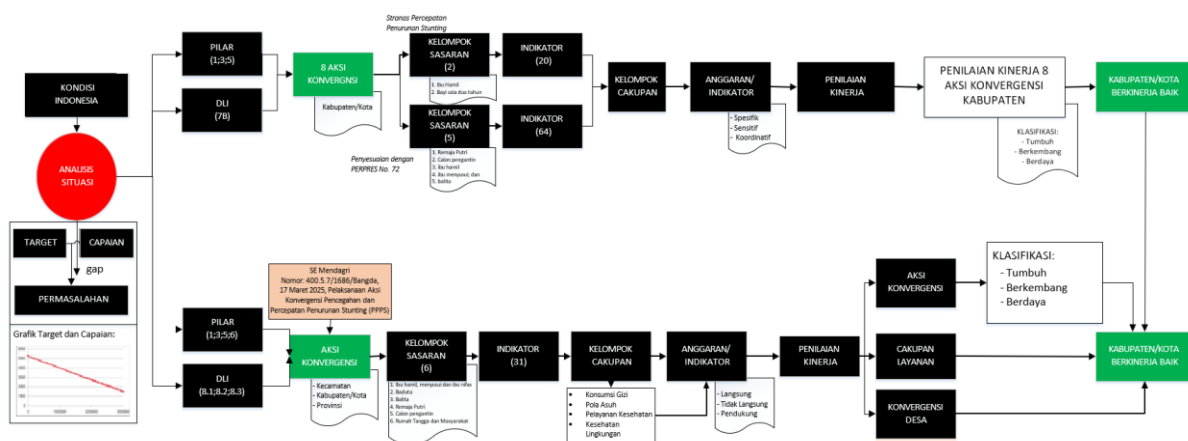
3.6. Analisis Kesenjangan (*Gap Analysis*) Indikator Kinerja

Sesuai dengan kerangka kerja 4 Tahap yang telah dibahas di awal Bab III, analisis kesenjangan (*gap analysis*) ini memiliki fungsi ganda yakni sebagai puncak dari Tahap 1 (Analisis Situasi) dan sebagai input fundamental bagi Tahap 4 (Penilaian Hasil Monev). Tujuan utamanya adalah untuk mengukur secara akuntabel dan kuantitatif sejauh mana realisasi capaian layanan baik intervensi spesifik maupun sensitif yang telah dipaparkan sebelumnya telah berhasil atau gagal bergerak menuju target yang telah ditetapkan. Kesenjangan (*gap*) yang teridentifikasi dalam sub-bab ini adalah selisih antara kondisi ideal (Target) dengan kondisi riil (Capaian) di lapangan.

Metodologi yang digunakan bersifat komparatif, yaitu melakukan perbandingan langsung antara dua set data utama:

1. Target Kinerja: Target ini bukanlah angka arbitrer, melainkan target resmi yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan strategis daerah (RPJMD/RKPD) dan merupakan output formal dari Tahap 2 (Penguatan Perencanaan).
2. Realisasi Capaian: Merupakan capaian riil intervensi untuk Indikator Aksi Konvergensi selama Semester II Tahun 2025.

Tujuan akhir dari analisis ini adalah untuk menyediakan sebuah diagnosis yang jernih. Dengan memetakan indikator-indikator mana yang berstatus "Merah" (mengalami kesenjangan kritis dan *off-track*), "Kuning" (mengalami kesenjangan minor), dan "Hijau" (*on-track*), kita dapat mengidentifikasi letak kegagalan sistemik. Alur pikir diagnostik ini dimulai dari penetapan Target, komparasi dengan Capaian, identifikasi *Gap*, hingga perumusan Permasalahan. Temuan-temuan inilah yang akan menjadi dasar penyusunan rekomendasi strategis di Bab IV. Adapun kerangka pikir analisis tersebut divisualisasikan dalam bagan berikut:



Gambar 3.5 Konseptual Alur Berpikir

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
Daerah Kabupaten Pasuruan, 2025

3.7. Penetapan Wilayah Prioritas (Lokus) Intervensi Tahun 2026

Penetapan wilayah prioritas atau Lokasi Fokus (Lokus) penanggulangan stunting di Kabupaten Pasuruan merupakan strategi pendekatan kewilayahan untuk mengonsolidasikan program dan anggaran antar-Organisasi Perangkat Daerah (OPD) secara terarah. Penetapan Lokus untuk Tahun Anggaran 2026 didasarkan pada analisis data E-PPGBM periode Agustus 2025 dan pendataan Keluarga Berisiko Stunting (KRS) BKKBN. Indikator penentuan ini secara komprehensif mencakup tingkat prevalensi stunting, jumlah kasus absolut, serta kondisi layanan dasar pendukung seperti ketersediaan air bersih, jamban sehat, dan kelayakan hunian.

Berdasarkan hasil analisis yang telah disahkan melalui Keputusan Bupati Pasuruan, ditetapkan 8 kecamatan dan 25 desa sebagai Lokus Intervensi Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2026. Seluruh wilayah prioritas tersebut difungsikan sebagai pusat pelaksanaan konvergensi intervensi spesifik dan sensitif secara terpadu. Berikut adalah rincian data sebaran wilayah Lokus Stunting Kabupaten Pasuruan Tahun 2026:

Tabel 3.2 Sebaran Wilayah Lokus Stunting Kabupaten Pasuruan Tahun 2026

No	Kecamatan	Jumlah Desa	Nama Desa Prioritas (Lokus)
1	Kraton	7 Desa	1. Tambaksari 2. Klampisrejo 3. Slambrit 4. Mulyorejo 5. Jeruk 6. Karanganyar 7. Curahdukuh
2	Wonorejo	4 Desa	1. Karang Asem 2. Karangjatianyar 3. Kluwut 4. Karangmenggah
3	Grati	4 Desa	1. Rebalas 2. Plososari 3. Sumber Dawesari 4. Sumberagung
4	Winongan	3 Desa	1. Karangtengah 2. Jaladri 3. Sumberejo

No	Kecamatan	Jumlah Desa	Nama Desa Prioritas (Lokus)
5	Pasrepan	3 Desa	1. Petung 2. Lemahbang 3. Mangguan
6	Puspo	2 Desa	1. Pusung Malang 2. Palangsari
7	Bangil	1 Desa	1. Masangan
8	Kejayan	1 Desa	1. Kurung

Sumber: SK Bupati Pasuruan tentang Penetapan Lokus Stunting Tahun 2026

Penetapan 25 desa di 8 kecamatan ini membawa konsekuensi logis pada perencanaan pembangunan tahun 2026. Seluruh OPD pengampu wajib memprioritaskan alokasi anggarannya ke wilayah-wilayah tersebut sesuai tupoksi masing-masing.

Dinas Kesehatan akan memfokuskan pemantauan pertumbuhan balita, pemberian PMT (Pemberian Makanan Tambahan), dan tata laksana gizi buruk di wilayah ini. Sementara itu, Dinas Perkim dan Dinas SDA akan memprioritaskan pembangunan infrastruktur sanitasi (jambanisasi) dan penyediaan air bersih di desa-desa tersebut untuk memutus mata rantai infeksi berulang. Selain itu, Tim Pendamping Keluarga (TPK) di 25 desa ini akan mendapatkan penguatan kapasitas khusus agar pendampingan terhadap Calon Pengantin, Ibu Hamil, dan Baduta dapat berjalan lebih intensif, memastikan target *Zero New Stunting* dapat tercapai di wilayah prioritas ini.

BAB IV

RENCANA AKSI LINTAS SEKTOR DAN PROYEKSI PENDANAAN

Penyusunan Rencana Aksi Lintas Sektor dan Proyeksi Pendanaan dalam bab ini difungsikan sebagai instrumen navigasi strategis Pemerintah Kabupaten Pasuruan untuk agenda Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2026. Momentum keberhasilan penekanan angka prevalensi riil (E-PPGBM) menjadi 3,91% pada Semester II Tahun 2025 diorkestrasikan menjadi landasan pacu yang kuat. Oleh karena itu, arah kebijakan pada tahun 2026 tidak lagi berfokus pada tahapan inisiasi, melainkan pada optimalisasi, ekspansi cakupan, dan peningkatan kualitas pelaksanaan aksi konvergensi lintas Perangkat Daerah.

Desain perencanaan teknokratis ini dikalibrasi secara presisi guna mengamankan target makro Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2026 sebesar 17,50%, menuju pencapaian target akhir 14,20% pada tahun 2029. Guna menjamin akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas pelaksanaan, penjabaran pada sub-bab berikut akan mengevaluasi dan menganalisis secara komprehensif postur intervensi beserta proyeksi pendanaan dari masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai eksekutor utama di lapangan.

4.1. Analisis Rencana Aksi dan Proyeksi Anggaran Perangkat Daerah

A. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah

Sebagai institusi hulu dalam arsitektur perencanaan daerah, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) memegang kendali strategis dalam orkestrasi percepatan penurunan stunting di Kabupaten Pasuruan. Permasalahan mendasar yang menjadi fokus intervensi Bapperida bertitik tolak pada masih tingginya prevalensi stunting di Kabupaten Pasuruan, yang tercatat sebesar 27,5 berdasarkan hasil tahun 2023. Untuk mengukur keberhasilan penyelesaian masalah tersebut, indikator utama yang dikawal oleh Bapperida adalah Angka Prevalensi Stunting daerah.

Dalam kerangka Rencana Aksi, arah kebijakan Bapperida difokuskan pada terlaksananya intervensi sensitif dan spesifik stunting secara terpadu. Agenda strategis ini dikonstruksikan melalui Program Sinergi dan Harmonisasi Perencanaan

Pembangunan. Secara lebih teknis, program tersebut diturunkan ke dalam kegiatan utama berupa Koordinasi TPPS (Tim Percepatan Penurunan Stunting), yang dioperasionalkan melalui sub-kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergi dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia. Konstruksi birokrasi ini mengonfirmasi fungsi Bapperida sebagai koordinator yang memastikan keselarasan intervensi antar-sektor.

Efektivitas dari program harmonisasi tersebut diukur melalui penetapan sasaran dan target kinerja yang definitif. Sasaran dari intervensi ini difokuskan pada Perangkat Organisasi Daerah Kabupaten Pasuruan. Melalui penguatan sinergitas tata kelola ini, Bapperida memproyeksikan pencapaian Target Prevalensi Stunting sebesar 17,40%, sebuah metrik yang dipedomani berdasarkan dokumen RPJMD. Selaras dengan fungsinya, sasaran penerima manfaat langsung dari fungsi manajerial dan koordinatif ini adalah Organisasi Perangkat Daerah.

Dari dimensi kapasitas fiskal dan alokasi sumber daya, intervensi manajerial ini didukung oleh proyeksi pendanaan yang terukur. Bapperida menetapkan total alokasi anggaran sebesar Rp36.000.000,00 untuk membiayai eksekusi kegiatan tersebut. Seluruh instrumen pembiayaan ini bersumber secara mutlak dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Secara entitas administratif, pelaksanaan program dikonsentrasikan di lokasi Bapperida. Postur anggaran ini diformulasikan untuk menjamin kelancaran fungsi koordinasi lintas sektor guna mengamankan target makro penurunan stunting daerah.

B. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman memiliki peran esensial dalam eksekusi Rencana Aksi Percepatan Penanganan Stunting Tahun 2026. Fokus permasalahan yang diintervensi oleh instansi ini dilatarbelakangi oleh masih tingginya angka prevalensi stunting di Kabupaten Pasuruan, yang tercatat sebesar 27,5 berdasarkan hasil SKI 2023. Untuk memantau progres penyelesaian masalah tersebut, indikator kinerja utama yang digunakan adalah Angka Prevalensi Stunting.

Langkah strategis dinas ini diwujudkan melalui rencana aksi yang bertumpu pada terlaksananya intervensi sensitif dan spesifik stunting. Kerangka kerja aksi tersebut dilembagakan melalui Program Kawasan Permukiman. Secara operasional,

penjabaran program tersebut diimplementasikan ke dalam kegiatan Peningkatan Kualitas Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha. Rangkaian intervensi ini kemudian ditajamkan dan dieksekusi pada tataran sub kegiatan berupa Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni.

Sasaran teknis dari intervensi perbaikan kelayakan tempat tinggal ini ditujukan secara definitif kepada masyarakat berpenghasilan rendah yang rumahnya tidak layak huni. Guna memberikan tolok ukur capaian kinerja yang kuantitatif dan akuntabel, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman menetapkan target fisik perbaikan sebanyak 177 unit RTLH. Sasaran penerima manfaat langsung dari kebijakan ini adalah masyarakat berpenghasilan rendah yang rumahnya menjadi lokus sasaran. Keseluruhan program penataan lingkungan dan perumahan ini dilaksanakan secara terpusat dengan lokasi di Kab Pasuruan.

Aspek kapasitas fiskal dan dukungan pembiayaan untuk merealisasikan target fisik tersebut telah diproyeksikan secara komprehensif. Perencanaan mencatat adanya alokasi anggaran sebesar Rp20.000.000,00 per unit RTLH dengan akumulasi Total Anggaran yang disiapkan mencapai Rp3.540.000.000,00. Seluruh instrumen pembiayaan untuk agenda strategis perumahan dan kawasan permukiman ini ditopang oleh sumber pembiayaan yang berasal dari DAU.

C. Dinas Kesehatan Daerah, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Dinas Kesehatan Daerah, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menempati posisi sentral sebagai eksekutor teknis dan klinis utama dalam Rencana Aksi Percepatan Penanganan Stunting Tahun 2026. Intervensi instansi ini secara langsung merespons permasalahan mendasar, yakni masih tingginya angka prevalensi stunting di Kabupaten Pasuruan yang tercatat sebesar 27,5 berdasarkan hasil SKI 2023. Untuk mengevaluasi efektivitas kerjanya, instansi ini menggunakan indikator Angka Prevalensi Stunting, dengan mandat untuk mencapai Target Prevalensi Stunting sebesar 17,50% sebagaimana diamanatkan dalam RPJMD Tahun 2026.

Arah kebijakan strategis perangkat daerah ini difokuskan pada terlaksananya intervensi sensitif dan spesifik stunting secara komprehensif. Konstruksi penanganan tersebut diorkestrasikan melalui tiga payung program utama: Pemenuhan Upaya

Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat, Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB), serta Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS). Portofolio program ini kemudian dioperasionalkan ke dalam berbagai kegiatan krusial, meliputi penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah, pelaksanaan advokasi dan KIE pengendalian penduduk, pendistribusian alat kontrasepsi, pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan, hingga peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pembangunan keluarga.

Pada tataran taktis, eksekusi lapangan dijabarkan ke dalam serangkaian sub-kegiatan yang ekstensif dan menyentuh akar rumput. Intervensi gizi dan klinis dilakukan melalui Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat. Di sektor keluarga berencana dan pembangunan keluarga, dilakukan Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (melalui Rakorcam, Rakordes, dan Minilok), Peningkatan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP), serta fasilitasi Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PIK R, UPPKA) yang didukung dengan Pengadaan Sarana BKB Kit Stunting 2025. Intervensi di ranah keluarga secara langsung diperkuat dengan kegiatan Pendampingan dan Pemantauan data keluarga berisiko stunting, yang secara spesifik menyasar calon pengantin/calon PUS, ibu hamil, ibu pasca salin/kelahiran, serta baduta/balita. Pelaksanaan program ini bersifat desentralistik dan tersebar di berbagai lokus, mencakup 23 Puskesmas di wilayah Kabupaten, Tim TPPS Pasuruan, Desa Lokus Stunting 2025, hingga berekspansi ke seluruh desa se-Kabupaten Pasuruan. Sasaran penerima manfaat dari ekosistem layanan ini sangat luas, mulai dari balita, ibu hamil, keluarga risiko stunting, tenaga dan kader kesehatan, akseptor KB MKJP, hingga Tim Pendamping Keluarga (TPK).

Untuk menopang beban intervensi yang masif tersebut, Dinas Kesehatan Daerah, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana didukung oleh postur fiskal yang sangat kuat. Total Anggaran yang dialokasikan untuk membiayai seluruh rangkaian rencana aksi ini mencapai Rp16.242.007.305,00. Arsitektur pendanaan ini diformulasikan dari diversifikasi sumber pembiayaan yang strategis, meliputi DAU SG, Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), DAK Non Fisik, serta Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB).

D. Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan memegang peranan esensial dalam mendukung percepatan penanganan stunting melalui jalur edukasi usia dini dan kelembagaan pendidik. Keterlibatan instansi ini merespons permasalahan utama di daerah, yaitu masih tingginya angka prevalensi stunting di Kabupaten Pasuruan sebesar 27,5 berdasarkan hasil SKI 2023. Evaluasi atas efektivitas program instansi ini diukur secara makro menggunakan indikator Angka Prevalensi Stunting.

Kerangka kerja Dinas Pendidikan diarahkan pada terlaksananya intervensi sensitif dan spesifik stunting. Agenda strategis ini dikonsolidasikan melalui Program Pengelolaan Pendidikan. Pada tataran operasional, fokus intervensi dikerucutkan pada kegiatan spesifik, yakni Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Langkah taktis di lapangan diimplementasikan melalui empat sub kegiatan yang berpusat pada Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD. Intervensi pembinaan ini didistribusikan ke dalam empat klaster manajemen, meliputi pembinaan untuk Bidang PAUD dan P, BOP PKG KAB, BOP IGTKI KAB, serta BOP HIMPAUDI KAB. Sasaran sekaligus penerima manfaat utama dari penguatan kapasitas ini adalah para tenaga pendidik, dengan rincian cakupan kelompok yang terdiri dari 100 pendidik, kelompok 240 hingga 245 pendidik, serta 106 pendidik. Seluruh orkestrasi kelembagaan ini bermuara pada upaya untuk mencapai Target Prevalensi Stunting sebesar 17,50% berdasarkan RPJMD Tahun 2026.

Dari dimensi tata kelola pelaksanaan, intervensi pembinaan PAUD ini menjangkau lokasi di 24 kecamatan. Seluruh daya dukung finansial untuk merealisasikan rencana aksi ini bersumber dari APBD Kabupaten. Rincian alokasi anggaran untuk keempat sub kegiatan tersebut masing-masing diproyeksikan sebesar Rp25.000.000,00, Rp40.000.000,00, Rp30.000.000,00, dan Rp30.000.000,00. Rencana pelaksanaan dan penyerapan dana dialokasikan sepenuhnya pada rentang waktu TB II. Secara kumulatif, instansi mencatat Total Anggaran yang dipersiapkan untuk menopang program tersebut adalah sebesar Rp128.000.000,00.

E. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan

Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan melaksanakan mandat krusial dalam Rencana Aksi Percepatan Penanganan Stunting Tahun 2026. Intervensi strategis yang diusung oleh instansi ini dirumuskan sebagai respons atas masalah mendasar, yaitu masih tingginya prevalensi stunting di Kabupaten Pasuruan, yang berada di angka 27,5 berdasarkan hasil SKI 2023. Untuk mengukur efektivitas kinerjanya, instansi ini menggunakan indikator Angka Prevalensi Stunting.

Rencana aksi instansi ini dikonseptualisasikan ke dalam serangkaian intervensi sensitif dan spesifik stunting. Sasaran akhir dari orkestrasi program tersebut diproyeksikan untuk mengamankan Target Prevalensi Stunting sebesar 17,50% berdasarkan RPJMD Tahun 2026. Untuk merealisasikan target tersebut, kerangka programatik disusun ke dalam lima pilar, yang meliputi: Program Pengawasan Keamanan Pangan, Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian, Program Kerawanan Pangan, Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, serta Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.

Pada level teknis operasional, kelima program tersebut diwujudkan melalui serangkaian kegiatan yang tajam dan berfokus pada ketahanan pangan, mulai dari Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota, Kegiatan penggunaan sarana pertanian, hingga kegiatan kerawanan pangan kewenangan kab/kota. Agenda ini diperkuat dengan upaya Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan secara spesifik mencakup Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.

Implementasi lapangan dari kegiatan-kegiatan tersebut dipertajam ke dalam sub kegiatan. Pada aspek keamanan pangan, dilakukan Penyediaan Sarana Pengujian Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota, dengan sasaran terlaksananya uji laboratorium Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) dan penerbitan nomor izin registrasi PSAT. Di sektor pertanian, dijalankan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Teknologi dan Spesifik Lokal, yang sarannya berupa pemberian bantuan rumah bibit benih sayuran, buah, umbi-umbian dan sarpras serta pelatihan budidaya sayuran ramah lingkungan. Untuk

mengatasi kerawanan pangan, dilaksanakan pengadaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup Kabupaten/Kota, yang ditargetkan berupa penyaluran pangan pokok kepada keluarga yang mempunyai balita stunting. Upaya ketahanan protein hewani didorong melalui sub kegiatan terkait Hewan dan Produk Hewan, serta Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota. Sasaran khusus dari keseluruhan intervensi gizi ini adalah ibu dengan baduta/balita stunting, calon pengantin, ibu hamil, dan kader gizi.

Eksekusi kebijakan lintas sektoral ini terkonsentrasi di wilayah Pasuruan, mencakup Lokus Stunting Kabupaten Pasuruan, serta menyasar desa-desa secara definitif seperti Desa Branang dan Rowogempol di Kec. Lekok; Desa Kalipang dan Kedawung Kulon di Kec. Grati; dan desa-desa lainnya (Kebotohan, Asem Kandang, Mulyorejo, Jeruk, Karanglo, Sumberglagah, Pekoren, Coban Blimbing, Rebono, Lebaksari, Jatigunting, Karanganyar, Sekarmojo, Sukalilo, Lumbangrejo, Prigen, Ngadiwono). Penerima manfaat langsung dari intervensi komprehensif ini mencakup ibu dengan baduta/balita stunting, calon pengantin, ibu hamil, dan kader gizi, didukung oleh integrasi data dari Dinkes.

Dukungan pendanaan untuk menjamin berjalannya lima pilar sub kegiatan tersebut telah dialokasikan dengan rinci, masing-masing sebesar Rp20.000.000,00, Rp100.000.000,00, Rp835.000.000,00, Rp1.500.000,00, dan Rp214.984.500,00. Rencana penyerapan dan realisasi anggaran didistribusikan pada Triwulan I dan Triwulan II. Secara komprehensif, total kapasitas fiskal yang dialokasikan oleh instansi ini mencapai Rp1.171.484.500,00, dengan pendanaan bersumber dari APBD 2 (DAU) dan APBD.

F. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memegang porsi strategis dalam ekosistem percepatan penurunan stunting melalui penguatan administrasi dan identitas kependudukan. Intervensi kelembagaan ini diwujudkan sebagai respons atas dua permasalahan utama, yaitu masih tingginya angka di Kabupaten Pasuruan sebesar 27,5 berdasarkan hasil SKI 2023, serta adanya kendala sosiologis di

lapangan di mana terkadang sasaran tidak mau didampingi oleh Tim Pendamping Keluarga (TPK).

Untuk memetakan progres penyelesaian isu tersebut, instansi ini mempedomani Angka Prevalensi Stunting sebagai indikator makro. Secara teknis administratif, indikator kinerja instansi turut diukur melalui pemenuhan instrumen kependudukan selain blangko KTP-EL, formulir dan buku terkait pendaftaran penduduk sesuai dengan kebutuhan yang tersedia, serta jumlah laporan hasil pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting terkait pencatatan sipil. Konstruksi indikator ini menjadi fondasi bagi rencana aksi yang difokuskan pada terlaksananya intervensi sensitif dan spesifik stunting, tersedianya blangko KIA, serta optimalisasi pelayanan.

Arsitektur intervensi birokrasi ini dikonsolidasikan ke dalam dua pilar utama, yakni Program Penduduk dan Program Pencatatan Sipil. Pada tingkat operasional, program ini dijabarkan melalui kegiatan Penduduk dan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil. Aksi afirmatif di lapangan kemudian dieksekusi melalui sub kegiatan yang terukur, meliputi penyediaan instrumen kependudukan selain blangko, formulir dan buku terkait pendaftaran penduduk sesuai dengan kebutuhan, serta pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting terkait pencatatan sipil.

Lokus sasaran dari integrasi sistem administrasi ini adalah Kabupaten Pasuruan, dengan muara akhir untuk mendukung pencapaian target 17,50% berdasarkan RPJMD Tahun 2026. Intervensi pemenuhan hak sipil ini secara definitif menysasar penerima manfaat yang terdiri dari anak usia 6-17 tahun serta masyarakat yang membutuhkan dokumen adminduk.

Dari dimensi kapasitas fiskal, kelancaran operasional pelayanan dokumen kependudukan ini sepenuhnya didukung oleh sumber pembiayaan yang berasal dari APBD. Proyeksi pendanaan untuk menopang sub kegiatan tersebut dialokasikan secara spesifik sebesar Rp221.500.000,00 dan Rp24.700.000,00. Melalui konsolidasi sumber daya tersebut, total anggaran yang diproyeksikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mencapai Rp246.200.000,00.

G. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang

Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang memiliki peran fundamental dalam penyediaan infrastruktur dasar guna mendukung percepatan penurunan stunting di daerah. Pelibatan instansi ini merespons permasalahan utama di daerah, yakni masih tingginya angka prevalensi stunting di Kabupaten Pasuruan sebesar 27,5% berdasarkan hasil SKI 2023. Untuk mengukur efektivitas kinerjanya, instansi ini mempedomani Angka Prevalensi Stunting sebagai indikator. Seluruh kerangka kerja ini bermuara pada upaya untuk mencapai target prevalensi stunting sebesar 17,50% berdasarkan RPJMD Tahun 2026.

Fokus rencana aksi instansi ini secara definitif diarahkan pada terlaksananya intervensi sensitif dan spesifik stunting. Agenda strategis tersebut dikonsolidasikan melalui dua pilar program utama, yaitu Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum serta Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah. Pada tataran operasional, program pertama diwujudkan melalui kegiatan Pengelolaan dan Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota, sedangkan program kedua direalisasikan melalui kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota.

Implementasi teknis di lapangan dieksekusi secara presisi melalui sub kegiatan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan dan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman. Sasaran intervensi dari infrastruktur air minum ini difokuskan pada area yang bersinggungan dengan stunting, kekeringan, dan kemiskinan ekstrem. Sementara itu, sasaran dari sistem air limbah dikhususkan pada penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem. Sesuai dengan fokus pembangunan tersebut, penerima manfaat langsung dari intervensi fisik ini adalah rumah tangga terindikasi stunting, kekeringan, dan kemiskinan ekstrem, serta rumah tangga terindikasi stunting dan kemiskinan.

Dari dimensi kapasitas fiskal dan manajemen pembiayaan, pelaksanaan rencana aksi infrastruktur ini didukung sepenuhnya oleh sumber pembiayaan yang dialokasikan dari APBD. Proyeksi pendanaan teknis untuk sub kegiatan air minum masing-masing dialokasikan sebesar Rp2.793.589.500,00 dan Rp3.500.000.000,00.

Selanjutnya, alokasi anggaran untuk sub kegiatan infrastruktur air limbah diproyeksikan sebesar Rp400.000.000,00 dan Rp298.800.000,00. Melalui konsolidasi sumber daya yang masif tersebut, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang memproyeksikan Total Anggaran sebesar Rp6.993.380.000,00 guna memastikan perbaikan sanitasi dan akses air bersih yang terintegrasi dengan target pembangunan manusia.

H. Dinas Komunikasi dan Informatika

Dinas Komunikasi dan Informatika turut diintegrasikan ke dalam penyusunan Rencana Aksi Percepatan Penanganan Stunting Tahun 2026. Langkah intervensi dari instansi ini secara spesifik merespons permasalahan daerah, yakni masih tingginya angka di Kabupaten Pasuruan sebesar 27,5 berdasarkan hasil SKI 2021. Dalam rangka memantau dan mengevaluasi kinerja penanganan tersebut, instansi ini menggunakan Angka Prevalensi Stunting sebagai indikator ukur.

Arah kebijakan dari instansi ini bermuara pada terlaksananya intervensi sensitif dan spesifik stunting. Secara teknokratik, kerangka aksi tersebut diformulasikan ke dalam Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik. Pada tingkatan pelaksanaan, program strategis ini dioperasionisasikan melalui kegiatan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah. Sinergi tata kelola komunikasi ini secara langsung memiliki sasaran kepada publik yang efektif Kab Pasuruan. Keseluruhan intervensi ini dirancang untuk mendukung pencapaian target prevalensi sebesar 17,80% berdasarkan RPJMD Tahun 2020.

Dari aspek kapasitas fiskal, pelaksanaan kegiatan komunikasi publik ini disokong oleh perencanaan anggaran yang terdistribusi ke dalam beberapa tahapan pelaksanaan. Proyeksi pendanaan secara periodik dialokasikan pada kisaran angka Rp22.381.500,00. Melalui agregasi seluruh alokasi tahapan tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika menetapkan Total Anggaran sebesar Rp89.526.000,00 guna memastikan berjalannya kelancaran program di lokasi Pasuruan.

I. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengemban fungsi krusial dalam memberikan bantalan perlindungan sosial bagi kelompok rentan yang

terdampak isu kesehatan. Keterlibatan instansi ini dikonstruksikan sebagai respons langsung terhadap permasalahan masih tingginya angka prevalensi stunting di Kabupaten Pasuruan, yang berada di angka 27,5 berdasarkan hasil SKI 2023. Guna memastikan akuntabilitas kinerjanya, instansi ini secara konsisten menggunakan Angka Prevalensi stunting sebagai indikator utama.

Arah intervensi difokuskan secara definitif pada terlaksananya intervensi Sensitif dan Spesifik Stunting. Secara manajerial, kerangka kerja ini diinkubasi di dalam Program Perlindungan dan Jaminan Sosial. Pada tataran operasional lapangan, eksekusi program ini diterjemahkan ke dalam kegiatan Pengelolaan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota. Penajaman layanan secara langsung diaplikasikan melalui sub kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga.

Sasaran teknis dari jaring pengaman sosial ini difokuskan agar masyarakat dapat mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota. Secara spesifik, sasaran ini membidik Pasangan Usia Subur (PUS) dengan status miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang menerima bantuan tunai bersyarat. Selaras dengan hal tersebut, sasaran penerima manfaat secara nyata dialokasikan bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) yang mengikuti pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) dengan modul kesehatan dan gizi, serta Pasangan Usia Subur (PUS) dengan status miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang menerima bantuan tunai bersyarat.

Dari perspektif manajemen keuangan, orkestrasi perlindungan sosial ini ditopang oleh sumber pembiayaan yang bersumber dari DAU. Instansi memproyeksikan alokasi anggaran pada dua instrumen utama, yakni sebesar Rp250.500.000,00 dan Rp290.500.001,00. Rencana penyerapan anggaran didesain dengan tingkat presisi yang sangat merata pada setiap triwulan (TB I hingga TB IV), di mana masing-masing periode diproyeksikan menyerap dana sebesar Rp73.125.000,00 dan Rp73.125.001,00. Secara akumulatif, total anggaran yang diinvestasikan untuk mengamankan sub kegiatan ini mencapai Rp541.000.001,00.

J. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa memegang kendali strategis dalam menggerakkan partisipasi dan kelembagaan di tingkat akar rumput guna mendukung percepatan penurunan stunting. Keterlibatan instansi ini diinisiasi sebagai respons terhadap permasalahan stunting di Kabupaten Pasuruan yang tercatat sebesar 27,5 berdasarkan hasil SKI 2021. Untuk mengevaluasi efektivitas kinerjanya, instansi ini secara konsisten mengadopsi indikator Angka Prevalensi Stunting.

Fokus arah kebijakan Rencana Aksi instansi ini bertumpu pada terlaksananya intervensi Sensitif dan Spesifik Stunting. Kerangka kerja strategis tersebut diwadahi ke dalam Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat. Pada level teknis, implementasi program dijabarkan melalui kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelaku Hukum Adat yang Sama Kabupaten. Aksi di lapangan ini kemudian ditajamkan kembali melalui sub kegiatan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat.

Pelaksanaan intervensi sosial kemasyarakatan ini diarahkan dengan sasaran utama pada Lembaga Kemasyarakatan. Seluruh sinergi pemberdayaan kelembagaan yang terpusat di lokasi Pasuruan ini ditujukan untuk mengamankan pencapaian target makro sebesar 17,50% berdasarkan RPJMD Tahun 2020.

Dari dimensi dukungan pembiayaan, instansi memastikan ketersediaan kapasitas fiskal yang memadai melalui sumber pembiayaan APBD. Alokasi anggaran untuk mengeksekusi kerangka kerja tersebut diproyeksikan sebesar Rp140.180.000,00. Rencana penyerapan anggaran ini difokuskan secara penuh pada pelaksanaan Triwulan II (TB II) dengan nominal Rp140.180.000,00. Secara keseluruhan, Total Anggaran yang dikerahkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk agenda strategis ini adalah sebesar Rp140.180.000,00.



4.2. Kompilasi Matriks Rencana Aksi Lintas Sektor

Sebagai landasan operasional dan instrumen pengendalian teknis dari penjabaran analisis sebelumnya, sub-bab ini menyajikan kompilasi matriks yang merupakan kristalisasi dari pelaksanaan 8 Aksi Konvergensi lintas Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan. Seluruh rincian teknis yang mencakup nomenklatur sub-kegiatan, indikator kinerja, besaran target luaran, satuan keluaran, hingga proyeksi alokasi anggaran dari masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dikonsolidasikan secara utuh ke dalam format matriks ini. Konsolidasi data teknokratik tersebut dirancang sebagai parameter evaluasi yang terukur guna memastikan seluruh eksekusi program di lapangan tetap terkalibrasi secara presisi demi mengamankan target makro prevalensi stunting sebesar 17,50% pada tahun 2026.

Tabel 4.1 Matriks Rencana Aksi Percepatan Penanganan Stunting

OPD	PERMASALAHAN	INDIKATOR	RENCANA AKSI	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SASARAN	TARGET	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	RENCANA PELAKSANAAN				SUMBER PEMBIAYAAN	LOKASI	SASARAN PENERIMA MANFAAT
										TB I	TB II	TB III	TB IV			
Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	Masih tingginya angka prevalensi stunting di kabupaten pasuruan Sebesar (27,5) % Berdasarkan hasil SKI 2023	Angka Prevalensi Stunting	Terlaksananya intervensi Sensitif dan Spesifik Stunting	Program Sinergi dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan	Pelaksanaan rapat Koordinasi TPPS	Koordinasi Pelaksanaan Sinergi dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Perangkat Organisasi Daerah Kabupaten Pasuruan	Target Pravelensi Stunting 17,50% berdasarkan RPJMD Tahun 2026	Rp36.000.000,00	V	V	V	V	APBD	Bapperida	Organisasi Perangkat Daerah
									Total							
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Masih tingginya angka prevalensi stunting di kabupaten pasuruan Sebesar (27,5) % Berdasarkan hasil SKI 2023	Angka Prevalensi Stunting	Terlaksananya intervensi Sensitif dan Spesifik Stunting	Kawasan Permukiman	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Masyarakat berpenghasilan rendah yang rumahnya tidak layak huni	177 unit RTLH	Rp20.000.000,00	20	35	10	10	DAU	Kabupaten Pasuruan	Masyarakat berpenghasilan rendah yang rumahnya tidak layak huni
									Total							
Dinas Kesehatan Daerah, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Masih tingginya angka prevalensi stunting di kabupaten pasuruan Sebesar (27,5) % Berdasarkan hasil SKI 2023	Angka Prevalensi Stunting	Terlaksananya intervensi Sensitif dan Spesifik Stunting	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Balita, Ibu Hamil, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, Masyarakat	Target Pravelensi Stunting 17,50% berdasarkan RPJMD Tahun 2026	Rp4.683.262.325,00	V	V	V	V	DAU SG, DBHCHT	33 Puskesmas di wilayah Kabupaten Pasuruan	Balita, Ibu Hamil, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, Masyarakat di 33 Puskesmas wilayah Kabupaten Pasuruan
									Total							
				Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	24 Kecamatan		Rp360.000.000,00	Rp180.000.000,00			Rp1.800.000.000,00	DAK Non Fisik BOKB	24 Kecamatan	Keluarga Resiko Stunting
									Total							



OPD	PERMASALAHAN	INDIKATOR	RENCANA AKSI	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SASARAN	TARGET	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	RENCANA PELAKSANAAN				SUMBER PEMBIAYAAN	LOKASI	SASARAN PENERIMA MANFAAT
										TB I	TB II	TB III	TB IV			
						Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Tim TPPS Kabupaten Pasuruan		Rp200.000.000,00	Rp67.200.000,00		Rp66.400.000,00	Rp66.400.000,00		Tim TPPS Kabupaten Pasuruan	Tim TPPS Kabupaten Pasuruan
					Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Calon Akseptor KB MKJP		Rp1.700.445.000,00	Rp851.722.500,00	Rp848.722.500,00				24 Kecamatan	Calon Akseptor KB MKJP
				Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UJPPKA)	Kelompok BKB Desa Lokus Stunting 2025		Rp130.000.000,00	Rp130.000.000,00					Desa Lokus Stunting 2025	Kelompok BKB Desa Lokus Stunting 2025
					Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tk. Daerah Kab/Kota dalam Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja calon pengantin/calon PUS, ibu hamil, pasca salin/kelahiran, baduta/balita)	Tim Pendamping Keluarga (TPK)		Rp4.453.200.000,00	Rp890.640.000,00	Rp1.335.960.000,00	Rp1.335.960.000,00	Rp890.640.000,00		Seluruh Desa se Kabupaten Pasuruan	Tim Pendamping Keluarga (TPK)
						Pemantauan data dan informasi keluarga berisiko stunting (Termasuk remaja calon pengantin/calon PUS, ibu hamil, pasca salin/kelahiran, baduta/balita)			Rp3.716.000.000,00	Rp742.200.000,00	Rp1.113.300.000,00	Rp1.113.300.000,00	Rp747.200.000,00			
									Total	Rp15.242.907.325,00						
Dinas Pendidikan	Masih tingginya angka prevalensi stunting di kabupaten pasuruan Sebesar (27,5) % Berdasarkan hasil SKI 2023	Angka Prevalensi Stunting	Terlaksananya intervensi Sensitif dan Spesifik Stunting	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD (Bidang PAUD dan PNF)	100 Pendidik	Target Pravelensi Stunting 17,50% berdasarkan RPJMD Tahun 2026	Rp25.000.000,00		25.000.000			APBD Kab	24 Kec	100 Pendidik
						Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD (BOP PKG KAB)	240 Pendidik		Rp40.000.000,00		40.000.000					240 Pendidik
						Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD (BOP IGTKI KAB)	100 Pendidik		Rp30.000.000,00		30.000.000					100 Pendidik



OPD	PERMASALAHAN	INDIKATOR	RENCANA AKSI	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SASARAN	TARGET	ALOKASI ANGGARAN (Rp)		RENCANA PELAKSANAAN				SUMBER PEMBIAYAAN	LOKASI	SASARAN PENERIMA MANFAAT
											TB I	TB II	TB III	TB IV			
						Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD (BOP HIMPAUDI KAB)			Rp30.000.000,00			30.000.000					100 Pendidik
									Total	Rp125.000.000,00							
Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	Masih tingginya angka prevalensi stunting di kabupaten pasuruan Sebesar (27,5) % Berdasarkan hasil SKI 2023	Angka Prevalensi Stunting	Terlaksananya intervensi Sensitif dan Spesifik Stunting	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Pengujian Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Uji laboratorium Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) dan penerbitan nomor izin registrasi PSAT	Target Pravelensi Stunting 17,50% berdasarkan RPJMD Tahun 2026	Rp20.000.000,00		Rp4.000.000,00	Rp16.000.000,00					
				Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Kegiatan pengawasan penggunaan sarana pertanian	Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Komoditas Tehnologi dan Spesifik Lokasi	Pemberian bantuan rumah bibit, benih sayuran, buah, umbi-umbian dan sarpras serta pelatihan budidaya sayuran ramah lingkungan (Desa Branang Kec. Lekok, Rowogempol Kec Lekok, Desa Kalipang Kec. Grati, Desa Kedawung Kulon Kec. Grati)		Rp100.000.000,00			Rp100.000.000,00					
				Program Penanganan Kerawanan Pangan	Kegiatan penanganan kerawanan pangan kewenangan kab /kota	Sub kegiatan pelaksanaan pengadaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup satu daerah Kabupaten/Kota	Pemberian bantuan berupa pangan pokok kepada keluarga yang mempunyai balita stunting (Desa Kebotohan, Asem Kandang, Mulyorejo, Jeruk, Kanigoro, Sumberglagah, Pekoren, Coban Blimbing, Rebono, Lebaksari, Jatigunting, Karangjatiyanyar, Sekarjoho, Sukolelo, Lumbangrejo, Prigen, Ngadiwono)		Rp835.000.000,00		Rp788.640.000,00	Rp46.360.000,00					
				PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Ibu Hamil beresiko		Rp1.500.000,00			V			APBD 2 (DAU)	Kabupaten Pasuruan	Ibu Hamil beresiko (Sesuai data dari Dinkes)
				Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	PENYEDIAAN DAN PENYALURAN BAHAN BAKU INDUSTRI PENGOLAHAN IKAN DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	PENINGKATAN KETERSEDIAAN IKAN UNTUK KONSUMSI DAN USAHA PENGOLAHAN DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN /KOTA	Ibu dengan baduta/balita stunting, calon hamil dan kader gizi desa		Rp214.984.600,00			Rp21.494.600,00			APBD	Lokus Stunting Kabupaten Pasuruan	Ibu dengan baduta/balita stunting, calon pengantin, ibu hamil dan kader gizi desa



OPD	PERMASALAHAN	INDIKATOR	RENCANA AKSI	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SASARAN	TARGET	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	RENCANA PELAKSANAAN				SUMBER PEMBIAYAAN	LOKASI	SASARAN PENERIMA MANFAAT
										TB I	TB II	TB III	TB IV			
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Masih tingginya angka prevalensi stunting di kabupaten pasuruan Sebesar (27,5) % Berdasarkan hasil SKI 2023	Angka Prevalensi Stunting	Terlaksananya intervensi Sensitif dan Spesifik Stunting				Kabupaten Pasuruan	Target Pravelensi Stunting 17,50% berdasarkan RPJMD Tahun 2026	Total Rp1.171.484.600,00							
	Terkadang sasaran tidak mau di dampingi oleh Tim Pendamping Keluarga TPK	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-el, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	Tersedianya blangko KIA	Program Pendaftaran Penduduk	Penataan Pendaftaran Penduduk	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-el, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan			Rp221.500.000,00	V	V	V	V	APBD	Kab. Pasuruan	Anak Usia 0-17 Tahun (-1 Hari)
		Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	Terselenggaranya pelayanan	Program Pencatatan Sipil	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil			Rp24.700.000,00	V	V	V	V			Masyarakat yang membutuhkan dokumen adminduk
Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang	Masih tingginya angka prevalensi stunting di kabupaten pasuruan Sebesar (27,5) % Berdasarkan hasil SKI 2023	Angka Prevalensi Stunting	Terlaksananya intervensi Sensitif dan Spesifik Stunting	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Rumah Tangga Terindikasi Stunting dan Kekeringan dan Kemiskinan Ekstrem	Target Pravelensi Stunting 17,50% berdasarkan RPJMD Tahun 2026	Total Rp246.200.000,00		V	V	V	APBD	Lokus Stunting, Kekeringan dan Kemiskinan Ekstrem Kabupaten Pasuruan	Rumah Tangga Terindikasi Stunting, Kekeringan dan Kemiskinan Ekstrem
									Rp2.793.589.500,00		V	V	V			
									Rp3.500.000.000,00		V	V	V			
									Rp400.000.000,00		V	V	V			
				PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Rumah Tangga Terindikasi Stunting dan Kemiskinan Ekstrem		Rp299.800.000,00		V	V	V			Rumah Tangga Terindikasi Stunting dan Kemiskinan Ekstrem
Dinas Komunikasi dan Informatika	Masih tingginya angka prevalensi stunting di kabupaten pasuruan Sebesar (27,5) % Berdasarkan hasil SKI 2023	Angka Prevalensi Stunting	Terlaksananya intervensi Sensitif dan Spesifik Stunting					Target Pravelensi Stunting 17,50% berdasarkan RPJMD Tahun 2026	Total Rp6.993.389.500,00							
				PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Konten	Meningkatnya Informasi Publik yang efektif Kab. Pasuruan		Rp89.526.000,00	Rp22.381.500,00	Rp22.381.500,00	Rp22.381.500,00	Rp22.381.500,00		wilayah Kab. Pasuruan	Masyarakat Kab. Pasuruan
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Masih tingginya angka prevalensi stunting di kabupaten pasuruan Sebesar (27,5) % Berdasarkan hasil SKI 2023	Angka Prevalensi Stunting	Terlaksananya intervensi Sensitif dan Spesifik Stunting	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	PENGELOLAAN DATA FAKIR MISKIN CAKUPAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga		Total Rp89.526.000,00							
									Rp292.500.000,00	Rp73.125.000,00	Rp73.125.000,00	Rp73.125.000,00	Rp73.125.000,00	DAU	Kabupaten Pasuruan	kelompok Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) yang mengikuti Pertemuan



OPD	PERMASALAHAN	INDIKATOR	RENCANA AKSI	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SASARAN	TARGET	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	RENCANA PELAKSANAAN				SUMBER PEMBIAYAAN	LOKASI	SASARAN PENERIMA MANFAAT
										TB I	TB II	TB III	TB IV			
							Kewenangan Kabupaten/Kota									Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) dengan modul kesehatan dan gizi
							Pasangan Usia Subur (PUS) dengan status miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang menerima bantuan tunai bersyarat		Rp292.500.001,00	Rp73.125.001,00	Rp73.125.001,00	Rp73.125.001,00	Rp73.125.001,00			Pasangan Usia Subur (PUS) dengan status miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang menerima bantuan tunai bersyarat
									Total	Rp585.000.001,00						
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	Masih tingginya angka prevalensi stunting di kabupaten pasuruan Sebesar (27,5) % Berdasarkan hasil SKI 2023	Angka Prevalensi Stunting	Terlaksananya intervensi Sensitif dan Spesifik Stunting	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Pengurus Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa	Target Pravelensi Stunting 17,50% berdasarkan RPJMD Tahun 2026	Rp140.180.000,00		Rp140.180.000,00			APBD	Kabupaten Pasuruan	
									Total	Rp140.180.000,00						

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Dokumen Rencana Aksi Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Pasuruan Tahun 2026 merupakan instrumen navigasi strategis yang memformulasikan upaya lintas sektor secara komprehensif guna mengamankan target Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah. Percepatan penurunan stunting disadari bukan sekadar persoalan pemenuhan gizi fisik semata, melainkan agenda prioritas pembangunan sumber daya manusia untuk mencegah dampak *irreversible* terhadap kognitif dan produktivitas dalam menyongsong visi Indonesia Emas 2045. Melalui evaluasi kinerja daerah yang terukur, Kabupaten Pasuruan telah mencatatkan pencapaian fundamental berdasarkan data sensus riil *by name by address* melalui instrumen E-PPGBM. Pada Semester II Tahun 2025, angka prevalensi berhasil ditekan secara drastis pada posisi 3,91% dari total pengukuran terhadap 101.252 sasaran balita. Momentum positif dari pencapaian tersebut diorkestrasikan menjadi landasan pacu (*springboard*) yang kuat. Oleh karena itu, fokus perencanaan tahun 2026 tidak lagi berada pada tahap inisiasi, melainkan pada optimalisasi, ekspansi cakupan, dan peningkatan kualitas pelaksanaan 8 Aksi Konvergensi guna mengeksekusi target makro Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang dipatok pada angka progresif 17,50%, menuju target akhir 14,20% pada tahun 2029.

Berdasarkan analisis komprehensif terhadap postur matriks dari sepuluh Organisasi Perangkat Daerah, strategi penanganan di Kabupaten Pasuruan telah terdistribusi secara proporsional ke dalam kerangka intervensi spesifik dan sensitif. Dukungan fiskal daerah disalurkan secara terpusat dan strategis pada program-program yang memiliki daya ungkit langsung terhadap lima determinan utama penyebab stunting. Hal ini direpresentasikan melalui alokasi anggaran yang sangat masif di sektor kesehatan untuk Jaminan Kesehatan Masyarakat, pelayanan gizi balita, dan kesehatan ibu hamil, serta pada sektor infrastruktur permukiman untuk perbaikan ribuan unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan ketahanan pangan melalui penyediaan puluhan ribu ton ikan konsumsi. Di sisi lain, instrumen tata kelola administrasi, pengawasan kelembagaan desa, pemenuhan akses air minum perpipaan, pengelolaan belasan ribu ton persampahan, hingga pemutakhiran data

dan fasilitasi bagi ratusan ribu keluarga fakir miskin dioptimalkan pelaksanaannya melalui instrumen operasional reguler kedinasan. Langkah taktis ini direpresentasikan dengan efisiensi alokasi anggaran senilai nol di dalam dokumen matriks, yang membuktikan bahwa integrasi tugas pokok Perangkat Daerah dapat didayagunakan secara maksimal tanpa membebani postur pembiayaan baru.

5.2. Rekomendasi

Sebagai upaya mengawal keberlanjutan konvergensi program lintas sektor dan memastikan tercapainya trayektori IKU secara efektif, terdapat serangkaian rekomendasi teknokratis yang menuntut tindak lanjut strategis. Rekomendasi pertama berfokus pada penguatan validasi dan harmonisasi tata kelola data. Mengingat adanya dinamika anomali antara fluktuasi data survei makro dengan hasil pencatatan sensus riil E-PPGBM di tingkat Posyandu, pemerintah daerah diwajibkan melakukan konsolidasi data secara berkelanjutan. Akurasi peta sasaran *by name by address* harus terus dijaga dan diintegrasikan antar-Perangkat Daerah guna memastikan bahwa seluruh intervensi, baik untuk pemenuhan gizi spesifik, penyediaan sanitasi, maupun fasilitasi perlindungan sosial dasar, jatuh secara presisi pada kelompok sasaran dan tidak mengalami tumpang tindih kewenangan.

Rekomendasi kedua menitikberatkan pada keharusan inovasi manajerial dan efisiensi birokrasi di setiap instansi pelaksana. Analisis matriks memperlihatkan adanya beban volume target kinerja yang sangat masif seperti penyusunan ribuan dokumen evaluasi, pendampingan kapasitas kelembagaan, operasional penyediaan fasilitas air bersih, hingga pengelolaan persampahan yang secara administratif tidak didampingi oleh alokasi pembiayaan khusus. Dalam menyikapi kondisi ini, setiap Perangkat Daerah dituntut untuk mengorkestrasikan kapasitas sumber daya aparatur secara mandiri dan inovatif. Ketiadaan alokasi anggaran khusus tidak boleh mendegradasi kualitas luaran program. Seluruh fungsi pembinaan, pengawasan infrastruktur, dan pelayanan dasar masyarakat harus dipastikan tetap beroperasi dengan standar mutu yang tinggi dan berkelanjutan.

Rekomendasi ketiga menuntut implementasi mekanisme pengendalian, pengawasan, dan evaluasi berlapis terhadap program-program padat modal. Pelaksanaan kegiatan intervensi yang menyerap Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah dalam porsi yang besar, khususnya pada sektor penyediaan layanan fasilitas kesehatan, perlindungan jaminan sosial, perbaikan kawasan permukiman kumuh, dan pengadaan sarana ketahanan pangan, wajib dikawal secara ketat oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah. Evaluasi realisasi kinerja secara berkala harus diimplementasikan untuk memitigasi risiko deviasi sumber daya di lapangan. Pengawasan melekat ini merupakan syarat mutlak untuk menjaga resiliensi pembangunan sumber daya manusia, memastikan setiap investasi daerah secara riil menekan faktor determinan stunting, dan mengamankan capaian target akhir prevalensi 14,20% pada penghujung RPJMD di tahun 2029.

Tenaga Ahli Bidang Pemerintahan
dan Pengembangan Manusia



HERU MAULANA, S.Sos.